

# MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

SESUAI  
DI PROGRAM,  
TAK ROYAL  
DI PENDANAAN





## Matra Pembaruan

Matra Pembaruan (MP) merupakan jurnal baru di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, yang fokus pada publikasi hasil penelitian tentang inovasi kebijakan pemerintah. MP terbit sebanyak tiga kali setahun (Maret, Juli, dan November).

MP memuat naskah hasil penelitian terkait pelbagai inovasi kebijakan. Oleh karenanya, kami mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan para pemerhati inovasi untuk mengirimkan naskah hasil penelitiannya agar dapat dimuat di Matra Pembaruan.

## Ketentuan Penulisan

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.

Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespon isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.

Sumber referensi minimal 10 buah dan 50% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (*American Psychological Association style*).

Lampirkan biodata ringkas dan nomor telepon seluler penulis.

## Informasi

Informasi lebih lanjut di  
[redaksi@matrapembaruan.com](mailto:redaksi@matrapembaruan.com)  
Moh. Ilham A Hamudy  
0821 1139 3927

Submit artikel Anda ke  
[matrapembaruan.com](http://matrapembaruan.com)

Diindeks oleh:



Badan Penelitian  
dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri

Memasuki awal 2018, BPP Kemendagri telah banyak menyusun program kerja ke depan selama satu tahun. Ragam kegiatan seperti IGA (*Innovative Government Award*), Indeks *Leadership Award*, Indeksasi Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel, serta ragam kajian penelitian lainnya semua siap dilaksanakan pada tahun ini.

Beberapa program kegiatan pada tahun ini merupakan evaluasi dari kesuksesan program kegiatan tahun lalu yang banyak menuai pujian sekaligus masukan dari berbagai macam pihak, terutama IGA dan *Leadership Award*. Menteri Dalam Negeri bahkan berharap kegiatan macam ini bisa berlangsung setiap tahun guna memacu daerah inovatif dan menghadirkan bibit-bibit pemimpin ideal lainnya.

Tidak hanya itu ragam kegiatan kelit-bangan juga telah banyak dilakukan oleh Puslitbang Kemendagri dalam kajian dan penelitian mengenai Pemerintahan Dalam Negeri, dan akan terus disempurnakan pada 2018 di antaranya: Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah membuat indikator daerah yang bersih dan transparan, Puslitbang Otonomi Daerah, Politik, PUM membuat indikator kepemimpinan daerah yang ideal, bersih, berinovasi, dan Puslitbang Adwil,

Pemdes dan Kependudukan membuat kajian terkait pilkada serentak yang bersih, dan jujur.

Semua ragam kegiatan tersebut kami sajikan pada Laporan Utama, sekaligus memperkenalkan ide dan gagasan tiga pimpinan Puslitbang baru di BPP Kemendagri yang diharapkan menjadi jauh lebih baik dan menghilangkan stigma Litbang "Sulit Berkembang".

Tidak hanya itu, sepanjang perjalanan liputan *Tim Media BPP* ke Cirebon dan Brebes pada akhir 2017 pun berhasil kami rangkum dalam rubrik BPP Daerah dan rubrik daerah yang menambah khasanah pengetahuan kita mengenai potensi-potensi daerah dan permasalahan BPP Daerah dalam penelitian dan pengembangan. Diharapkan BPP Daerah dan BPP Kemendagri bisa saling sinergi menciptakan ujung tombak dari lahirnya sebuah kebijakan pemerintah melalui penelitian dan pengembangan yang berinovasi, seperti yang digadag-gadag Puslitbang Inovasi Daerah dan menciptakan Nawa Cita Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari daerah pingiran. Semoga!



Redaksi...

# MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO  
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	SRINANI KURNIASIH SYABNIKMAT NIZAM HORAS MAURITZ PANJAITAN SAFRIZAL LITA DEWI WULANTIKA MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	FRISCA NATALIA ALEXANDER YANUARD DALLA
PELIPUTAN	INDAH F. ROSALINA SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI  
JALAN KRATAM RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT  
REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM

### Day Care untuk Anak Pegawai

Menjadi seorang ibu memanglah dambaan setiap perempuan, tidak terkecuali perempuan karir yang bekerja di Pemerintahan. Namun, jatah cuti 3 bulan paska melahirkan dirasa begitu cepat, apalagi mencari pengasuh anak yang selama 3 bulan sudah melekat dengan kita. Berat rasanya. Untuk itu, saya berharap BPP Kemendagri menyediakan ruang khusus penitipan anak atau *day care* bagi mereka perempuan karir sekaligus ibu rumah tangga yang masih kesulitan membagi waktunya antara bekerja dengan mengurus anak. Kalau ada *day care* di tempat kerja sendiri, hati ibu siapapun akan tenang saat bekerja, dan bisa sesekali menengok si kecil saat jam istirahat.

Hazel Anggia Putri, JFU pada Bagian Umum

Terimakasih sekali Sdri. Hazel atas masukannya terkait tempat penitipan anak bagi pegawai BPP yang sibuk bekerja dan mengurus anak. Menurut Kepala Bagian Umum, Ibu Lita Dewi, memang saat ini BPP Kemendagri tengah merenov bangunan yang suda tidak terpakai untuk ruangan penitipan anak semacam *day care*. Ruangan ini bersebelahan dengan poliklinik, jadi kalau anak tiba-tiba sakit pun bisa langsung dibawa ke poliklinik. Nanti juga rencananya akan ada semacam pengasuh yang mengawasi anak-anak bermain. Anak-anak pegawai BPP juga bisa bersosialisasi dan lebih dekat dengan ibunya. Tidak hanya itu, ruangan itu juga diperuntukkan bagi ibu yang sedang menyusui atau yang seringkali *pumping* namun kebingungan mencari tempat yang aman dan bersih. Tentu kita semua berharap, anak dapat tumbuh kembang, tidak lepas dari perhatian ibunya dan ibu juga bisa konsentrasi bekerja.

Redaksi

### Toilet Gedung Baru Rusak

Sejak akhir 2017, ke-empat Puslitbang dan Perpustakaan berpindah ruangan ke gedung baru BPP Kemendagri. Memang beberapa fasilitas di gedung baru sudah jauh modern dan bagus ketimbang fasilitas di ruangan lama. Namun sayangnya, ada beberapa fasilitas di gedung baru yang mulai rusak dan butuh perawatan lebih. Seperti Toilet yang seringkali mampet dan mengeluarkan bau tak sedap, bahkan atap toilet bocor dari hasil tetesan toilet pada lantai-lantai di atasnya. Saya berharap permasalahan fasilitas ini tidak terjadi lagi di gedung baru, sehingga kami dapat bekerja optimal.

Staf BPP Kemendagri

Terimakasih untuk segala masukannya, gedung baru BPP memang telah langsung dihuni oleh sebagian besar warga BPP, dan kami segenap redaksi Media BPP juga berharap pendapat dan masukan Sdr bisa dibaca oleh Sub Bagian Rumah Tangga untuk segera diperbaiki

Redaksi

### Lambat Buka Website BPP Kemendagri

Saya salah satu pegawai di BPP Daerah. Sebagai peneliti, informasi kelitbang tentu sangat penting. BPP melalui websitenya yang direformasi telah berhasil menyuguhkan informasi seputar dunia riset yang kekinian, meski kadang mengutip dari berbagai media lain, namun lebih akurat dan sangat menarik karena tampilan yang lebih moderat. BPP pun dalam hal informasi sekelas K/L berada di jalan yang benar. Namun informasi yang bagus tersebut tidak dibarengi dengan kemudahan aksesnya. Misalnya, untuk membuka *website litbang.kemendagri.go.id/website* kita harus menunggu hingga 10-20 detik, padahal untuk *website* yang terbilang baru dan *website* berita itu tidak perlu *loading*. Kedua, sangat disayangkan jika *website* BPP yang *eye catching* tersebut hanya menyuguhkan berita saja, akan lebih baik dibumbui dengan suguhan infografis, videografis dari hasil-hasil kajian atau hasil capaian kinerja setahun terakhir BPP Kemendagri. Tentu ini akan menarik minat tidak hanya kalangan internal, namun juga semua BPP yang ada di daerah.

-NN, Peneliti BPP Daerah-

Kami menyadari tentu informasi menjadi hal penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, akses informasi yang memudahkan dan menyenangkan menjadi pilihan utama ditengah banyaknya situs penyedia informasi yang lebih baik. Kami berharap saran saudara bisa segera diaplikasikan oleh pengelola *website* kami. Masukan anda sangat berharga bagi perkembangan dunia informasi tidak hanya untuk BPP Kemendagri, namun juga untuk *website* K/L lainnya. Kreativitas pengelola *website* sangat dibutuhkan ditengah gempuran informasi yang tidak berimbang. *website-website* K/L sudah selayaknya dikelola secara profesional, karena menyuguhkan informasi secara akurat. Dan sebaiknya juga menjadi rujukan informasi yang bisa dikutip oleh media-media lainnya.

Redaksi

# MEDIA BPP

VOLUME 3 NO 1 | FEBRUARI 2018

BPP DAERAH 28  
CIREBON BUTUH PENELITI  
BAPPEDALITBANG KABUPATEN CIREBON

### TOKOH 40

Mengawali karier sebagai wartawan menjadikan REFLY HARUN banyak menyumbangkan segala pemikiran dan solusi terkait permasalahan hukum dan ketatanegaraan. Refly yang kini menjadi Komisaris Utama PT Jasa Marga dan Direktur di LSM Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct) itu kepada Media BPP banyak berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya serta pendapatnya terkait putusan MK tentang verifikasi faktual.

### AKTIVITAS 8

JENDELA BPP 12-15

KILAS BERITA 42-43

SAINS DAN  
TEKNOLOGI 42

GAYA HIDUP 44

RESENSI BUKU 46

RESENSI FILM 48

KOMIK 49

SASTRA 53

OPINI

BANGKITNYA BECAC DI IBUKOTA,  
MASALAH ATAU SOLUSI? 54

MENUJU DESTINASI WISATA  
DUNIA 56

CATATAN  
GUBERNUR CERDAS 58

DAERAH 32

### ALTERNATIF WISATA DI JALUR PANTURA

Medio Desember 2017 lalu, Media BPP berkesempatan mengunjungi Brebes dan Cirebon. Sulit dibayangkan ternyata Brebes tidak hanya melulu telur asin, atau Cirebon yang tidak pernah lepas dari Keraton Kasepuhannya. Ternyata ada tempat-tempat lain yang unik dan menarik yang bisa dijadikan tempat wisata alternatif ketika melintasi pantura. Tempat-tempat tersebut mungkin akan membuat kita ingin kembali lagi ke sana.



### LAPORAN UTAMA 16-23

## SESUAI DI PROGRAM, TAK ROYAL DI PENDANAAN

MEMASUKI TAHUN ANGGARAN BARU, BPP (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) KEMENDAGRI TERUS BERBENAH MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEBAGAI LEMBAGA RISET YANG AKUNTABEL, NYATA, DAN OPTIMAL. BERAGAM PROGRAM TELAH USAI DILAKUKAN PADA 2017 HINGGA MENUAI RAGAM APRESIASI BAIK DARI MENTERI DALAM NEGERI MAUPUN DARI PEMERINTAH DAERAH. BPP DINILAI KIAN MENGARAH KE JALAN YANG BENAR. PROGRAM-PROGRAM YANG DIJALANKAN SUDAH SESUAI KEBUTUHAN.

NAMUN, HADIRNYA PROGRAM-PROGRAM ITU TAK BERBANDING LURUS DENGAN ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN SETIAP TAHUN. LEMBAGA RISET TERSEBUT, SELALU MENDAPAT DANA TERKECIL JIKA DIBANDING KOMPONEN LAINNYA DI KEMENDAGRI. PADAHAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MENJADI UJUNG TOMBAK KEMENTERIAN DALAM NEGERI, SEBAGAI PERUMUS KEBIJAKAN SERTA MENGHASILKAN KEBIJAKAN YANG YANG TEPAT SASARAN.



# PEREKAT PERSAUDARAAN DAN KERJA SAMA DI BPP KEMENDAGRI

Inovasi menjadi kunci kemajuan sebuah lembaga. Inovasi juga tidak akan terjadi ketika iklim pekerjaan yang kondusif tidak tercipta di lingkungan tempat di mana bekerja. Untuk itu, pada awal Februari 2018 ini, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri menyelenggarakan kegiatan *outbound*. Kegiatan ini diharapkan bisa mempererat persaudaraan dan kerja sama di antara para pegawai di lingkungan BPP Kemendagri.

**D**esa Sinarwangi tepatnya di bawah kaki Gunung Salak menjadi salah satu pilihan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri melaksanakan kegiatan rutin tahunan yang diikuti seluruh pegawai BPP Kemendagri, tak terkecuali Kepala BPP Kemendagri, acara dilaksanakan tepatnya di The Highland Park Resort Hotel Bogor, Jawa Barat pada 7-8 Februari 2018. *Outbound* berlangsung secara meriah, penuh dengan kekeluargaan, semangat baru, dengan tema *Dare to be Innovative* (berani berinovasi).

Hari pertama, dengan menggunakan seragam merah bertuliskan *Dare to be Innovative*, para peserta berkumpul setelah satu jam perjalanan Jakarta – Bogor. Tiba di sana, para peserta disambut dengan rintik hujan yang menyelimuti Bogor. Namun, hujan tidak menjadikan peserta patah semangat untuk menciptakan kehangatan dalam acara rutinan keluarga besar BPP Kemendagri itu.

Dengan penuh canda tawa, saling berpegangan tangan dalam lingkaran, peserta hanyut dalam permainan interaktif membuat suasana dingin dengan rintik hujan semakin hangat. “Saat saya katakan naik sepeda maka teman-teman bisa cari satu pasangan untuk berlagak seperti naik sepeda saat saya bilang ‘bang jo’ teman-teman

membentuk tiga orang untuk membuat lampu merah. Kemudian saat saya bilang bunga bermekaran, teman-teman membentuk kelompok yang terdiri dari lima orang, dan empat orang melingkari satu orang sambil bergaya bak bunga yang baru bermekaran,” kata pemandu *outbound*.

Peserta semua tertawa, membaur satu sama lain, seolah tanpa sekat jenjang tingkatan jabatan. Baik laki-laki, perempuan, tua, dan muda semua membaur, membuat kelompok hingga ditentukan dua orang terbaik yang masih bertahan membentuk isyarat *selfie*, *bang jo*, dan bunga bermekaran.

Tidak hanya permainan interaktif seperti di atas, peserta BPP Kemendagri diminta berhitung 1-10 untuk membentuk suatu kelompok yang untuk berkompetisi dalam permainan yang lebih seru lagi.

Terhitung ada 10 kelompok yang memainkan permainan menangkap bola, berjalan dengan mata tertutup, mendayung di kolam, dan memindahkan gelang dalam kawat dari tiang satu ke tiang yang lain. Selama searian peserta diminta untuk menyelesaikan permainan satu per satu dan dihitung seberapa besar kekompakkan, kerja sama tim, dan keberhasilan mereka mencapai misi permainan. “Kelompok terbaik nanti akan ada hadiah dari Kepala BPP di malam acara nanti,” kata koordinator *outbound*.



## Arahan Kepala BPP

Menjelang malam, Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji memberikan arahan. Dodi mengapresiasi jalannya kegiatan dan ia merasa puas dengan pemilihan lokasi yang ditetapkan. Ia berharap lokasi yang dipilih bisa membuat para peserta semangat. “Yang paling penting adalah kita tetap semangat bisa tetap bersatu dan menciptakan sumber daya manusia kompeten setelah acara ini,” tuturnya.

Dodi menyarankan agar para peserta bisa memahami makna setiap kegiatan. Sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, ia juga membeberkan pengalamannya kepada para peserta. Bagaimana pengalamannya sebagai Pj Gubernur dan mengelola pemerintahan di daerah. Ia juga mengaitkannya dengan pengalamannya yang malang melintang di dunia birokrasi. “Kita mesti bersemangat lagi untuk berjuang dan berkata inilah saya untuk siapa



dipilih dan mengerjakan berbagai tugas negara, kita harus sadar hingga ke arah sana. Saya berharap banyak pegawai baru memiliki kompetensi di BPP Kemendagri, saya yakin di BPP juga banyak orang pintar.” ucapnya.

Dodi kemudian mempertegas “Oleh karena itu, di 2018 ini akan banyak persoalan yang dihadapi. karena dunia yang semakin berkembang. Mudah-mudahan setelah ini ada hal yang bisa diperlihatkan, BPP bisa bekerja sama dan menunjukkan kemampuannya,” tutupnya.

## Harus inovatif

Setelah pidato Kepala BPP Kemendagri, malam itu acara dilanjutkan dengan hiburan dan ramah tamah. Namun sebelumnya acara diisi oleh pemberian motivasi bekerja oleh motivator ternama Yosi Martinus. Menurut Yosi inovasi adalah hal yang wajib dilakukan jika lembaga ingin maju.

Alasannya cukup masuk akal, karena semua terus mengalami perubahan. “Coba kita perhatikan bagaimana *handphone* Nokia di tahun 80an, berapa harganya, kemudian ke *Blackberry* dan sekarang semua itu sudah ditinggalkan,” terangnya.

Yosi menjelaskan kesalahan sebuah institusi tidak kunjung berinovasi atau jalan di tempat. Menurutnya kadang institusi tersebut sudah merasa puas dengan hal yang sudah ada, selain itu juga selalu merasa, keadaannya baik-baik saja. Menurut Yosi yang harus dilakukan agar memperoleh kemajuan dan melangkah dengan pasti adalah harus berpikir besar dan dimulai dari yang sederhana. “Tentu ini yang harus ditekankan dalam diri masing-masing, karena institusi itu tergantung dari SDM

yang ada di dalamnya,” jelasnya.

Terakhir Yosi mengatakan inovasi bisa dimulai dengan yang sudah ada kemudian diperbarui. Inovasi juga bisa tercipta ketika iklim dan suasana pekerjaan kondusif. Hal itu bisa tercipta ketika semua orang di instansi tersebut berpikir positif. Sebagai contoh ia meminta para peserta menyalakan lampu di *handphone* masing-masing. Kemudian lampu ruangan dimatikan. Bintik-bintik cahaya lampu *handphone* peserta tampak memenuhi ruangan dengan indah. Ia kemudian meminta peserta mematikan lampu tersebut secara perlahan hingga ruangan gelap kembali. Kejadian tersebut memberi makna, pengaruh positif seseorang bisa menular kepada rekan kerja yang lain, begitu juga dengan hal negatif. “Ketika lampu mulai padam, maka yang lain akan mengikutinya, dan itu juga terjadi di bagian lain. Seperti itu juga pengaruh positif dan negatif,” tutupnya.

Acara motivasi dan hiburan sekaligus menutup acara pada malam itu. Hingga pagi kembali, para peserta tetap semangat membawa energi positif ke rumahnya masing-masing.



# Mendagri Lantik Kepala BPP Jadi Pj Gubernur Kalbar

**JAKARTA** – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Dodi Riyadmadji menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, di Gedung Kemendagri di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/1). Pelantikan sesuai dengan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/P/2018 tanggal 12 Januari 2018.

Pelantikan dilakukan karena masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH dan wakilnya Christiandy Sanjaya periode 2013-2018 telah berakhir pada Sabtu (4/1) kemarin.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat gubernur Kalimantan Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa,” kata Dodi mengulang sumpah yang diucapkan Tjahjo.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan tersebut, di antaranya anggota DPR yang berasal dari Dapil Kalimantan Barat beserta para pejabat Kemendagri.

Cornelis dalam sambutannya berharap Dodi Riyadmadji bisa sukses memimpin Kalimantan Barat hingga Oktober 2018 mendatang. Ia juga mengingatkan kepada Dodi, Kalimantan Barat merupakan wilayah yang sangat luas, berhadapan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan, serta dengan negara tetangga seperti Malaysia.

“Luas Kalimantan Barat 1,5 kali pulau Jawa, berhadapan dengan Malaysia dan Laut China Selatan. Namun puji Tuhan selama 10 tahun menjabat



■ Kepala BPP Kemendagri mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Mendagri Tjahjo Kumolo.

hanya 17 konflik terjadi, dan tidak ada isu SARA,” terang Cornelis.

Cornelis MH menambahkan dirinya siap membantu memberi saran dalam setiap pengambilan keputusan. Cornelis mengimbau jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik provinsi, kabupaten/kota di Kalbar untuk bekerja sama dengan Penjabat Gubernur.

“Bupati, wali kota, dan SKPD agar taat dan patuh pada penjabat gubernur. Beliau wakil pemerintah pusat di daerah. Saya juga siap membantu untuk hanya sekedar memberikan saran,” ujar Cornelis.

## Bangun tata kelola pemerintahan

Dalam kesempatan tersebut Mendagri juga mengingatkan kepada Penjabat Gubernur untuk mengelola daerah dengan sebaik-baiknya.

“Harus diingat, tugas pemerintah daerah adalah membangun tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, serta mempercepat reformasi birokrasi,” tuturnya.

Mendagri juga berpesan, agar selalu melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan setiap kebijakan.

“Kalbar sangat luas, lebih luas dari Jawa, berdekatan dengan beberapa perbatasan. Saya mengingatkan, Penjabat Gubernur baru harus selalu membangun komunikasi yang intensif dan rutin dengan berbagai pihak. Harus selalu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Sekda, DPRD, DPR RI daerah pemilihan setempat. Begitu juga dalam mengambil keputusan harus selalu melibatkan kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, ulama, atau bahkan perguruan tinggi,” ucap Mendagri. (MSR)



■ Diskusi dan rapat terkait pengembangan fungsional peneliti di Aula BPP Kemendagri, Januari 2018

# Peneliti Sulit Menjadi Profesor Riset

**JAKARTA** - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri terus mendorong para peneliti untuk menjadi profesor riset. Salah satu yang masih menjadi kendala sebagai syarat menjadi profesor riset adalah wajibnya melakukan orasi ilmiah.

Menurut Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kpegawai, dan Sisdur Serta Evaluasi Kinerja ASN (PJKSE) BPP Kemendagri Nurdin mengatakan, kendala belum adanya orasi ilmiah dikarenakan biaya yang sangat mahal. Menurut Nurdin biayanya mencapai Rp 100 juta per orang.

“Biaya tersebut sudah dipatok sama LIPI, selain itu, program tersebut harus dipersiapkan setahun sebelumnya. Artinya jika mau dilaksanakan bisa dimasukkan di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun berikutnya,” ucap Nurdin dalam Rapat Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti di Aula BPP Kemendagri.

Namun menurutnya, hal itu bisa disiasati jika seandainya ada peneliti untuk menjadi profesor riset.

Ia sepakat dengan Kepala BPP Kemendagri untuk mengajukan kerja sama dengan lembaga donor seperti Ford Foundation, KSI (Knowledge Sector Initiative) atau Plan-C yang rutin mengadakan kerja sama dengan Kemendagri.

“Ini yang disarankan oleh Kepala BPP Kemendagri, salah satu solusi untuk pengembangan BPP yang akan datang jika dana tidak memungkinkan,” tuturnya.

Profesor riset menjadi penting, pasalnya selama ini keberadaan profesor riset di Indonesia masih sangat minim. Jumlah profesor riset yang masih aktif Indonesia hanya berjumlah sekira 218, atau hanya 2,27 persen dari 9.685 jumlah peneliti nasional. Padahal, untuk meraih kemakmuran bangsa, peran peneliti dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) menjadi salah satu syarat utama.

BPP berperan dalam mendorong para peneliti untuk meningkatkan publikasi ilmiah. Hal itu dilakukan, sebagai upaya untuk menambah jumlah profesor riset di Indonesia yang masih sangat minim.

## Perlu roadmap fungsional peneliti

Upaya mendorong peneliti hingga menjadi profesor riset juga terus dilakukan BPP dengan beberapa program pembinaan peneliti. Pada tahun sebelumnya, misalnya, beberapa program seperti kerja sama pusat inovasi dengan University of the Sunshine Coast Australia, program *joint research*, dan pengembangan karya ilmiah.

Hasoloan Nadeak Peneliti BPP Kemendagri mengatakan, perlunya BPP Kemendagri membentuk *roadmap* tata kelola pembinaan fungsional peneliti yang baik.

“Misalnya berapa kebutuhan peneliti di sini, lulusan S1, S2, atau S3 dari berbagai bidang keilmuannya,” tuturnya.

Nurdin menambahkan, beberapa pembinaan akan terus dilakukan pada tahun ini seperti percobaan elektronik *research (e-research)*. *E-research* nantinya bisa dalam bentuk kolaborasi penelitian.

Sebagai contoh dalam waktu dekat, menurut Nurdin, BPP akan

melaksanakan survey elektabilitas pasangan calon di Pilkada 2018, dan hitung cepat (*quick count*) hasil Pilkada 2018.

“Jadi BPP Kemendagri kalau mau dikenal harus ada produk, *nah* kita akan melakukan *survey* elektabilitas dan *quick count* Pilkada tahun ini, ungkapnya.

#### Rekrut peneliti baru

Agar pembinaan peneliti sukses hingga menjadi profesor riset, perlu dilakukan perekrutan dari sejak dini khususnya bagi parapraja yang ditempatkan di BPP Kemendagri. Kepala Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional PJKSE BPP Kemendagri Rachman Kosasih mengatakan pentingnya sosialisasi dalam rangka merekrut calon peneliti. Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di mana pun.

“Perlu sosialisasi ke IPDN, sehingga ketika ada yang akan ditempatkan di BPP Kemendagri mereka sudah niat menjadi peneliti,” ucap Rahman.

Sosialisasi menurut Rachman dimaksudkan agar para praja yang ditempatkan di BPP Kemendagri benar-benar memiliki *passion* di bidang penelitian, sehingga tidak ada lagi cerita, jika sudah ditempatkan kemudian mereka bebas pergi lagi dalam waktu singkat.

Selain itu menurutnya, BPP juga tengah kekurangan peneliti, pasalnya aturan baru tidak memperbolehkan rangkap jabatan, sehingga di BPP Kemendagri harus kehilangan 11

peneliti, karena lebih memilih jabatan struktural.

Rachman menuturkan ada beberapa permasalahan terkait jabatan fungsional peneliti saat ini di BPP Kemendagri di antaranya aturan rangkap jabatan yang masih perlu kejelasan, serta para peneliti yang sudah melakukan sertifikasi tidak mau menjadi peneliti.

Terkait hal itu, Rachman berharap beberapa permasalahan di atas bisa segera ditemukan jalan keluarnya. “Kita masih menunggu dari LIPI, semoga masih bisa diperjuangkan sehingga tidak ada yang dirugikan,” tuturnya. (MSR)

Rachman Kosasih mengatakan Sosialisasi untuk merekrut peneliti. “Perlu sosialisasi ke IPDN, sehingga ketika ada yang akan ditempatkan di BPP Kemendagri mereka sudah niat menjadi peneliti,” ucap Rahman.

## Kepala BPP Melantik Pejabat Esselon IV BPP Kemendagri



**JAKARTA** - Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji melantik delapan pejabat Esselon IV BPP Kemendagri pada Jumat (12/1) di Aula BPP Kemendagri.

Adapun kedelapan orang tersebut adalah Nursabar yang mengisi Kepala Subbagian Data dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Perencanaan Sekretariat BPP Kemendagri, Elisabeth Eni PL mengisi Kepala Subbagian Kerja Sama Kelitbangan, Hukum, dan Peraturan Perundang-Undangan

Para pejabat Esselon IV mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Kepala BPP

pada Bagian Perencanaan Sekretariat BPP Kemendagri, Purnama Dewi Kassubag Verifikasi Keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Badan Litbang, dan Muhammad Yusuf Ridha Kassubag Akuntansi dan Pelaporan pada Bagian Keuangan Sekretariat BPP Kemendagri.

Di Pusat Litbang Dodi melantik Revota Dwibakti Kasubbid Provinsi pada Bidang Otonomi Daerah Puslitbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum, Leydi Silvana Kepala Subbidang Aparatur dan Perkembangan Desa pada Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan, Danang Binuko Kasubbid Potensi Inovasi Daerah pada Bidang Pengembangan Inovasi Daerah Pusat Litbang Inovasi Daerah, dan Muksin Kassubid Investasi Daerah pada Bidang Ekonomi Daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuda.

Menurut Dodi, pelantikan sengaja dipercepat dan dilakukan di awal tahun agar bisa dievaluasi di akhir 2018. Dodi juga mengingatkan dengan tegas akan dilakukan evaluasi bagi semua pejabat yang ada di BPP Kemendagri di Akhir 2018.

Dodi berpesan kepada para pejabat yang dilantik, agar posisi yang baru sebagai kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. “Mudah-mudahan posisi baru untuk para pejabat yang dilantik saat ini bisa memberikan kesempatan yang luas untuk mengetahui lebih jauh tentang bidang pekerjaan yang akan digelutinya,” ucapnya. (MSR)

## BPP Selenggarakan Rapat Koordinasi Usulan Kegiatan Program dan Anggaran 2019



Keseriusan peserta dalam rapat penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran 2019, di Aula BPP Kemendagri.

**JAKARTA** - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri menyelenggarakan rapat penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran TA 2019, di Aula BPP Kemendagri, Senin (22/1).

Rapat tersebut menitikberatkan pada pembahasan usulan rencana kerja BPP Kemendagri tahun anggaran 2019, *review* capaian target rencana kerja BPP Kemendagri 2017, dan penandatanganan kinerja eselon III dan IV lingkup BPP Kemendagri.

Kepala Bagian Perencanaan Mohammad Noval mengingatkan semua usulan program kegiatan 2019 harus sudah dikumpulkan secepatnya.

“Usulan RKP 2019 BPP Kemendagri sudah diminta Bappenas untuk masuk hari ini, ada beberapa yang sudah masuk di antaranya dari Puslitbang

Adwil, Pemdes, dan Kependudukan,” tuturnya dalam rapat tersebut.

Noval kemudian menegaskan, program yang akan dilaksanakan perlu mengacu pada prioritas nasional rancangan awal RKP 2019, yang di antaranya pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional kesuksesan pemilu.

“Poin terakhir kiranya menjadi penting untuk diperhatikan, karena selama ini pemilu menjadi isu nasional

yang sangat penting untuk dikaji, dan dibutuhkan oleh Kemendagri,” ucapnya.

#### Dimulai dari Internal

Dalam rapat tersebut, beberapa Kepala Puslitbang juga menuturkan wacana program yang akan dilaksanakan di 2019. Mereka juga menyinggung beberapa program yang akan dilaksanakan di 2018. Salah satu Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Syafrizal mengatakan program Puslitbang Inovasi Daerah pada 2018 akan berkaitan dengan semua Puslitbang yang ada di BPP Kemendagri dan Direktorat yang ada di Kemendagri.

Untuk program 2018 sendiri, Puslitbang Inovasi Daerah menurut Syafrizal akan diarahkan pada replikasi inovasi sebesar-sebesarnya. Syafrizal menambahkan inovasi daerah harus dimulai dari internal Kemendagri sendiri. “Bagaimana mau berbicara inovasi, kalau di dalam internal kita sendiri tidak inovatif,” katanya.

Misalnya, menurut Syafrizal pengurusan perizinan cuti, di pemerintah daerah sudah ada yang satu jam langsung keluar. Sementara di pusat harus menunggu berhari-hari. “Kita harus mulai benahi ini, di samping mengembangkan inovasi di daerah. Ini menjadi catatan, karena selama ini daerah banyak yang bertanya Kemendagri sudah inovasi apa?” ucapnya.

Terkait program *Innovative Government Award*, Syafrizal mengatakan pemberian penghargaan akan direncanakan pada Oktober atau November. “Tentu itu sesudah menyelesaikan penilaiannya,” tuturnya. (MSR)

# Ciptakan Indeksasi Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan sering kali tidak diikuti dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

**R**endahnya kemampuan mengelola keuangan dan aset masih menjadi pekerjaan rumah sejumlah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Lemahnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban mengakibatkan munculnya indikasi korupsi, pemborosan, salah alokasi serta banyaknya berbagai macam pungutan yang justru mereduksi upaya pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu, Transformasi pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan krusial.

Presiden Joko Widodo melalui Nawacitanya telah mengingatkan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Sejalan dengan amanat Nawacita tersebut, BPP Kemendagri melalui Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri akan melakukan pengkajian mengenai indeks pengelolaan keuangan daerah.

Indeksasi ini berupa pengukuran kondisi keuangan daerah dan transparansi keuangan daerah serta melihat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah. Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri, **Horas Mauritz Panjaitan** mengatakan, program ini merupakan cara untuk meminimalisasi praktik korupsi di daerah.

“Karena banyak sekali daerah yang masih belum akuntabel, transparan, dan disiplin dalam melakukan pengelolaan anggaran,” terangnya.

Sebenarnya, kajian yang akan menjadi program andalan pada 2018 ini merupakan kelanjutan dari program anggaran 2017 yang selama ini sudah berjalan

di pusat yang baru dipimpinnya beberapa bulan itu. Pria asal Medan, Sumatera Utara itu menyebutkan, ada beberapa daerah yang pengelolaan anggarannya sudah bagus, menurut hasil kajian pusatnya pada 2017 lalu, yakni Jawa Timur.

“Di Jawa Timur, sistem pengelolaan anggarannya sudah menggunakan *e-budgeting*, seluruh penganggarannya sudah *e-money* (non tunai), sehingga minim adanya penyelewengan dana,” terangnya.

Salah satu contoh penerapan di Jawa Timur itulah yang ingin direplikasi ke beberapa daerah. Hal itu mengingat di pemda Provinsi Jawa Timur dan pemkot Surabaya serta kabupaten lainnya telah menerapkan kebijakan integritas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bahan rekomendasi kajian nantinya bisa digunakan beberapa daerah dalam meniru gaya pengelolaan anggaran Jawa Timur ataupun daerah-daerah yang su-

dah maju seperti DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Mauritz itu memang optimis, beberapa lokus kajiannya bisa meniru daerah yang bagus dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami nantinya akan ke seluruh daerah. Tapi untuk mengoptimalkan itu, kami menggunakan data pembanding dari BPK (Badan Pengawasan Keuangan) terkait opini laporan keuangan pemerintah daerah, dan hasil kajian indeks keuangan dari UGM. Tentu setelah itu, kami akan ke lapangan untuk memverifikasi lebih lanjut,” jelasnya.

Morits mengatakan kunjungan ke lapangan itu merangkul ke 8 daerah perwakilan, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan kalau bisa sampai Papua. Tak tanggung-tanggung, untuk menggelontorkan ke daerah tersebut, Puslitbang ini mengalokasikan dana sebesar 600 juta. (IFR)



FOTO: HTTP://BKD.MATARAMKOTA.GO.ID

# Pengawasan Dana Desa yang Akuntabel



FOTO: HTTP://WWW.LAMPOST.CO

**P**uslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan BPP Kemendagri yang kini telah memiliki kapten baru. Per November 2017 lalu, Kapuslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan Subiyono, telah digantikan oleh Kurniasih, mantan Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri.

Perempuan kelahiran 9 November 1963 itu memang terbiasa dengan yang berbau ‘hukum’, terutama produk hukum daerah seperti Perda. Baginya masalah Administrasi Kewilayahan, Pemerintah Desa, dan Kependudukan masih banyak terkait dengan latar belakang pengalamannya di tempat yang dulu. Maka tak heran, Asih begitu optimis menentukan dan mengawal program kerja ke depan.

Ada 3 program utama dalam Bidang

yang digawangi oleh Asih, yakni Kependudukan, Pemerintahan Desa dan Administrasi Kewilayahan. Namun, dari beberapa program unggulan, Asih menjelaskan secara spesifik tentang kajian yang akan dibuatnya bersama tim.

Dari program Pemerintahan Desa, Asih menginginkan setiap desa mampu menyalurkan dana desa dengan optimal. Menciptakan kondisi ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing.

“Kami inginnya Desa itu mampu menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin, agar tercapai semua tujuan dan cita-cita Nawa Cita Jokowi,” terangnya.

Penggunaan dana desa menurut Asih memang belum berjalan dengan optimal, ada penggunaan anggaran yang dipaksakan oleh suatu daerah untuk

memajukan industri, ekonomi kreatif dan produk yang sebenarnya tidak sesuai dengan suatu daerah itu.

“Misalnya di daerah pertanian, daerahnya maju dengan hasil tani dan inovasi yang bagus dengan dana desa, lalu daerah lain mencontohnya, Padahal mungkin saja itu daerah pantai. Jadi replikasi itu tidak bisa sembarangan, semestinya dilihat kapasitas dan komoditas daerah itu sendiri,” imbuhnya.

Bagaimana desa menjadi basis penyelenggaraan pemerintahan desa dan otonomi dengan baik? Asih menilai itu harus dimulai dari tata kelola keuangan desa itu sendiri.

“Yang kita tahu dana desa itu semestinya bisa dilaksanakan secara akuntabilitas dan terjamin. Nanti kami juga akan koordinasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa, sebenarnya ada isu hot apa di pemerintah desa. Misalnya anggaran desa bisa mempercepat infrastruktur, kelembagaan, gotong royong. Itulah hal-hal yang kita coba buka pemahaman dengan Pemdes. Kira-kira apakah bisa dititikberatkan pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) disesuaikan dengan karakter desa. Kita akan melihat bagaimana dana desa bisa menunjang komoditas desa tersebut,” tandasnya.

Dari penggunaan dana desa yang akuntabel dan transparan itu nantinya bisa tercipta suatu lingkup yang maju dan mandiri.

“Bahkan saya berharap desa bisa menciptakan sistem *1 village 1 product*,” harapnya. (IFR)

## Targetkan 540 Daerah Ikut Indeks Inovasi Daerah

Setelah sukses menggelar IGA (*Innovation Government Award*) di pengujung 2017, Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri atau yang biasa dikenal dengan Puslitbang Inovda akan melaksanakan penyusunan indeks inovasi daerah yang terintegrasi dengan semua K/L yang memiliki kompetensi pembinaan inovasi daerah. Peta tersebut akan menggambarkan kemajuan inovasi yang berhasil dicapai oleh seluruh pemerintah daerah. Sehingga dengan data yang cukup pemerintah dapat mendorong dan memfasilitasi lebih giat lagi untuk penerapan inovasi.

Kepala Puslitbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan, nantinya Puslitbang Inovda akan memunyai semacam peta data inovasi daerah.

“Untuk mendukung hal tersebut, maka akan dilakukan kegiatan penyusunan pedoman penilaian indeks inovasi daerah, penjarangan data inovasi daerah, penyusunan sistem informasi indeks inovasi daerah, pengumpulan

data, pengukuran, penilaian indeks inovasi daerah dan publikasi hasil indeks inovasi daerah serta pemberian penghargaan pemerintah daerah inovatif,” terangnya.

Pada 2017, sebenarnya pendataan semacam itu sudah pernah dilakukan dalam rangka pemberian penghargaan untuk pemerintah inovatif. Namun hanya berupa penjarangan untuk kategori IGA 2017 saja. Pada tahun lalu juga bisa mengumpulkan sebanyak 120 Pemda (Pemerintah Daerah) yang mendaftarkan.

“Tahun ini kita berharap ada 540 daerah yang mengikuti indeks inovasi daerah,” harapnya.

Target itu bukan sembarang target, tentu Safrizal dan tim sudah mengatur langkah agar angka tersebut bukan hanya angan-angan belaka. Mereka akan mendata ke semua daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, membuatkan Kepmen (Keputusan Menteri) tentang indeks inovasi daerah 2018.

“Jadi ada peringkat mana Pemda terbaik, kasih penghargaan, yang belum

baik nanti akan ada pembinaan dari pusat dan provinsi bagi kabupaten/kota,” tambahnya.

Bahkan Safrizal mengaku, pihaknya sedang menggandeng Kementerian dan Lembaga untuk bersama sama menciptakan inovasi daerah yang terintegrasi.

“Kita akan berjuang untuk menyatukan inovasi tidak hanya di litbang bahkan ada di setiap komponen kemendagri dan K/L,” terangnya

Kerja sama penyusunan indeks inovasi daerah bersama K/L yang dimaksud adalah agar semua KL memiliki standar yang sama dalam melihat inovasi daerah.

“Saat ini tiap-tiap KL memiliki standar masing-masing. Ini membingungkan daerah, oleh karenanya nanti kita akan duduk bersama menyusun indeks yang dapat digunakan oleh semua KL dan daerah. Jadi kita akan berkolaborasi dengan KL,” harapnya menutupi perbincangan. (IFR)

■ Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan Innovative Government Award 2017 kepada pemerintah daerah inovatif, Desember lalu di Jakarta.



FOTO: HTTP://INFOSULSEL.COM

## Kaji Pilkada Papua Demi Perkuat Otsus



■ Pilkada di Kabupaten Lanny Jaya Menggunakan Sistem Noken

FOTO: HTTP://BERITADAERAH.CO.ID

Setelah sukses menyemarakkan program pemberian penghargaan pada Kepala Daerah melalui *Leadership Award*, Puslitbang Otda, Politik dan Pemerintahan Umum kembali menyelenggarakan ragam kegiatan kajian menarik lainnya.

Puslitbang yang masih dipimpin oleh Syabnikmat Nizam itu mulai memetakan langkah strategis program 2018 mendatang. Ada sekira 4-5 program kerja dari 3 bidang yang dipimpinnya. Itu berarti pada 2018, Syabnikmat akan melaksanakan 13 program kajian litbang yang menjadi andalan Syabnikmat adalah kebijakan pelaksanaan Pilkada di Papua dalam memperkuat Otonomi Khusus.

Seperti yang diketahui, Papua mempunyai sistem pilkada yang berbeda

dari kebanyakan daerah di Indonesia, tak terkecuali daerah otonomi khusus lainnya. Menurut Syabnikmat, sistem Pilkada Papua masih menggunakan metode perwakilan, yakni diwakili oleh kepala suku setempat. “Kalau di Papua itu kan masih menggunakan dengan sistem noken, yang memang menjadi kearifan budaya setempat karena keterbatasan jangkauan penyelenggaraan KPU ke pelosok-pelosok Papua seperti pegunungan,” jelas Syabnikmat.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis KPU Papua No 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara. Sebenarnya Noken berasal dari nama tas yang terbuat dari akar atau ranting pohon yang biasa digunakan penduduk setempat untuk membawa sesuatu. Noken digunakan

sebagai simbol dari ke-khas-an budaya Papua yang selalu membawa Noken kemanapun dan kapan pun, mereka menolak menggunakan besi kotak yang biasa dipakai, dan menggunakan sistem perwakilan dari tiap kepala suku.

“Keputusan MK menghargai kearifan lokal di sana, masyarakat yang datang mewakili penduduknya biasanya memilih kandidat pasangan calon dan dimasukkan ke dalam noken, biasanya sistem begini hanya 1-3 orang yang memilih. Nah, yang kita ingin kaji adalah bagaimana supaya partisipasi di Papua ini meningkat,” paparnya.

Peningkatan antusias warga Papua dalam menggunakan hak memilihnya bukanlah hal yang mudah, salah satu faktor terbesarnya adalah persoalan ekonomi dan jauhnya TPS (Tempat Pemungutan Suara), untuk itu diharapkan kajian dari Puslitbang Otda, Politik dan Pemerintahan Umum dapat memberikan masukan bagi KPU agar dapat memberikan pendampingan ke daerah, atau menjemput bola suara-suara terdalam. “Ya meskipun kita juga tahu, ongkos kirim ke daerah pelosok tidaklah murah. Tapi saya yakin ada beberapa kebijakan yang bisa ditinjau oleh pemerintah setempat dan mencari jalan keluar dari permasalahan Pilkada Papua dan Papua Barat ini perlu pengkajian pelaksanaannya dalam memperkuat otonomi khusus” tutup Syabnikmat dengan penuh harap. (IFR)

# SESUAI DI PROGRAM, TAK ROYAL DI PENDANAAN

MEMASUKI TAHUN ANGGARAN BARU, BPP (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) KEMENDAGRI TERUS BERBENAH MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEBAGAI LEMBAGA RISET YANG AKUNTABEL, NYATA, DAN OPTIMAL. BERAGAM PROGRAM TELAH USAI DILAKUKAN PADA 2017 HINGGA MENUAI RAGAM APRESIASI BAIK DARI MENTERI DALAM NEGERI MAUPUN DARI PEMERINTAH DARERAH. BPP DINILAI KIAN FOKUS MENJALANKAN PROGRAM-PROGRAM YANG DIBUTUHKAN.

NAMUN, HADIRNYA PROGRAM-PROGRAM ITU TAK BERBANDING LURUS DENGAN ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN SETIAP TAHUN. LEMBAGA RISET TERSEBUT, SELALU MENDAPAT DANA TERKECIL JIKA DIBANDING KOMPONEN LAINNYA DI KEMENDAGRI. WALAUPUN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEHARUSNYA DIPERANKAN SEBAGAI UJUNG TOMBAK KEMENTERIAN DALAM NEGERI, DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN GUNA MENGHASILKAN KEBIJAKAN YANG TEPAT SASARAN.



Awal 2018, menjadi awal yang berbeda dari BPP Kemendagri. Beragam kegiatan dan fenomena telah terjadi pada penghujung 2017. Wajah baru dan program baru yang lebih implementatif bermunculan, harapan baru pun mulai tumbuh seiring dengan kerja BPP yang dituntut harus nyata dan berguna bagi masyarakat.

Penghujung tahun kemarin, BPP Kemendagri sukses mendapatkan ragam apresiasi dari media massa, Pemerintah Daerah, bahkan Menteri Dalam Negeri sendiri. Mendagri mulai melirik kinerja BPP yang selama ini dianggap kurang berkontribusi terhadap kajian dan riset dari setiap kebijakan yang lahir. Beberapa penerapan implementatif seperti acara IGA (*Innovation Government Award*) dan *Leadership Award*, menjadi pemacu daerah untuk berinovasi dan menciptakan pemimpin yang berkualitas. Namun, sebagai lembaga yang memang tidak bisa luput dari banyak kekurangan dan mencoba bangkit dari keterpurukan, program BPP tersebut lahir juga bukan tanpa kritik dan masukan.

Perlahan namun pasti, BPP Kemendagri mencoba menata program baru yang lebih baik lagi, dan menjadi koreksi bersama. Seperti yang dilontarkan oleh M. Noval, Kepala Bagian Perencanaan. Menurutnya, BPP Kemendagri perlahan mulai mengatur langkah implementatif supaya lembaga ini tetap eksis. Pria berpostur tinggi besar dan gemuk itu memang terkenal sebagai kepala perancang segala sesuatu yang terjadi di BPP Kemendagri sekaligus memberikan banyak masukan dan bantuan pada ke-empat Puslitbang BPP.

Noval bahkan mengatakan, ada beberapa Puslitbang yang memang mendapatkan slot anggaran besar dibandingkan dengan Puslitbang lainnya.

“Ada 4 puslitbang di kami, ada Puslitbang Inovasi Daerah, Puslitbang Adwil, Pempdes, dan Kependudukan, Puslitbang Pembangunan dan Keuda, dan Puslitbang Otda, Politik dan PUM. Dari ke-empat puslitbang itu, yang paling besar anggarannya memang Puslitbang Inovasi Daerah, karena kegiatan IGA kemarin, Pak Menteri sempat berkata untuk dilanjutkan di tahun-tahun berik-

kutnya,” jelas Noval.

Noval menjelaskan, dari hasil beberapa evaluasi kegiatan, memang Puslitbang di BPP Kemendagri mulai bergerak ke arah implementatif, karena dilandasi oleh PPN (Program Prioritas Nasional). Ada banyak kajian yang mengikuti isu-isu yang sedang terkini ke arah kebijakan yang lebih baik. “Kami menghadirkan banyak rekomendasi beberapa kajian ke Pak Menteri, dan berharap apa yang sudah menjadi kajian teman-teman peneliti di sini dapat menjadi kerangka acuan menteri dalam perumusan dan penerapan kebijakan,” bebernya.

BPP Kemendagri menurut Noval tahun ini mendapatkan anggaran sebesar 48 miliar, dengan belanja operasional sebesar 28 miliar, dan belanja non operasional hampir sebesar 20 miliar. Anggaran sebanyak itu, kemudian dibagi-bagi oleh 4 puslitbang, dan sekretariat. Bila dibandingkan dengan komponen lainnya, BPP Kemendagri serin kali mendapatkan anggaran paling kecil atau nomor bontot dari 12 komponen Kemendagri yang ada.

“Tapi anggaran tahun ini ada kenaikan dari tahun sebelumnya, karena beberapa kegiatan program penelitian mulai dilirik dan diberi slot anggaran yang lebih besar. Misalnya itu tadi, Puslitbang Inovda mendapat anggaran sebanyak 5 miliar, Puslitbang Keuda mendapat sekira 2,7 miliar, Puslitbang Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan PUM mendapat anggaran sekira 2,9 miliar, dan Puslitbang Adwil mendapat sekira 2,64 miliar,” terangnya.

Pembagian tersebut berdasarkan rencana program kajian masing-masing pusat dan permintaan Menteri Dalam Negeri. Misalnya seperti Inovda, dan Polpum yang diharapkan setiap tahun terselenggara IGA dan *Leadership Award*. “Tapi sayangnya *Leadership Award* tidak bisa dilakukan setiap tahun, karena mencari pemimpin terbaik setiap tahunnya *kan* sulit, indikator kita kemarin mereka yang sudah pernah menjabat minimal 4 tahun. Nanti kalau diadakan setiap tahun, maka tidak akan muncul wajah baru bagi para pemenangnya, yang dapat penghargaan itu itu saja,” imbuhnya.



Untuk itu Noval menyarankan Kepala Puslitbang terkait untuk terus mempertajam melalui indikator penilaiannya. “Untuk lebih detailnya nanti silahkan tanya pada Kapus yang bersangkutan,” papar Noval.

Sementara itu saat Media BPP menyinggung siapa Puslitbang yang dinilai paling bagus kinerjanya dan senantiasa konsisten, tak tanggung-tanggung Noval langsung menyebut Puslitbang Keuda sebagai pusat yang paling konsisten dan disiplin, terutama dalam pengoptimalan anggaran dan laporan kajian penelitiannya.

“Bukan hanya penyerapan, tapi juga mereka bisa mengoptimalkan anggaran yang sudah diberikan. Selain itu, Puslit-

bang Keuda menurut saya yang paling disiplin waktu memberikan hasil rekomendasi kajiannya,” katanya.

Ketiga Puslitbang lainnya menurut Noval memang banyak melakukan kajian yang implementatif, sehingga Noval berpikir Puslitbang yang lainnya mungkin terlalu kewalahan dalam menjalani beberapa program kegiatannya yang sudah dijalankan.

Meski program kerja BPP mendapatkan banyak pujian, tapi Noval dan seluruh Kapus pun tetap mengakui masih banyaknya kekur-

■ Gedung BPP Kemendagri, Jl. Kramat Raya 132, Senen, Jakarta Pusat.



ngan dari program yang telah atau belum dijalankan secara sempurna.

“Ya kami juga mengakui, masih banyaknya program yang belum tercapai. Kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan anggaran juga lagi-lagi selalu menjadi

kendala kami. Tapi apa pun itu, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik buat lembaga ini,” imbuhnya.

Masalah SDM dan keuangan memang kerap kali menjadi kendala BPP Kemendagri dan BPP Daerah dalam memajukan penelitian dan pengembangan, ada beberapa daerah yang secara kuantitas kurang SDM, dan ada juga yang bermasalah terkait kualitas SDM itu sendiri.

### Ciptakan e-research

Masalah SDM di BPP Kemendagri memang sudah ada yang mengaturnya, mereka biasa menyebutnya Bagian PJKSE (Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, dan Sisdur, serta Evaluasi Kerja ASN). PJKSE digawangi oleh Nurdin, selaku Kepala Bagian PJKSE yang baru beberapa bulan ini menjabat. Kepada *Tim Media BPP*, Nurdin banyak berbagi informasi terkait ketersediaan SDM, peneliti, termasuk juga pembinaan ke daerah.

“Tahun 2018 ini kami memang akan mempetakan ulang standar pegawai melalui *capacity building action plan*. Kita akan petakan ulang terkait kepegawaian dan jabatan fungsional. Kita punya PNS (Pegawai Negeri Sipil) 158 orang, PTT (Pegawai Tidak Tetap) ada 96 orang, dan di antara PNS itu 56-nya adalah peneliti. Dan 56 peneliti inilah yang semestinya menjadi ujung tombak dari *output* kelitbang,” tutur Nurdin.

Menurut Nurdin, sistem *rooling* pun akan berlaku di setiap tahunnya. “Agar apa? Agar peneliti kaya akan kajian, dan tentu kita juga akan sesuaikan dengan keparannya,” imbuhnya

Tidak hanya itu, ke depan, Nurdin dan Tim juga sudah merancang semacam pangkalan survey bernama *e-research*, untuk memudahkan hasil kajian ke-56 peneliti BPP dalam menjangkau data. “*E-research* itu nantinya semacam aplikasi polling/survey ke daerah-daerah yang memudahkan peneliti untuk melakukan kajian. Peneliti yang keterbatasan jangkauan lokasi daerah penelitian akan terbantu dengan *e-research* dalam survey,” terangnya.

Selain meng-efisiensi anggaran, *e-research* juga memudahkan peneliti

menjangkau daerah-daerah yang tidak sempat dikunjungi. “Namun tentu terlebih dahulu kita memberikan pelatihan secara berlanjut kepada BPP Daerah dalam sosialisasi dan cara penggunaan aplikasi *e-research* tersebut,” jelasnya.

Tentu Nurdin berharap ini menjadi langkah awal peneliti semakin giat melaksanakan kajian-kajian ke daerah tanpa harus memikirkan kendala anggaran. “Kami berharap tidak ada lagi keluhan terkendala SDM atau anggaran, karena kami sudah berusaha membuatkan salah satu jalan keluar dari permasalahan yang selama ini ada, BPP Daerah pun nantinya bisa menggunakan ini secara bersama, jadi meski anggarannya kecil, semua bisa dijangkau dengan mudah,” tandasnya.

Selain permasalahan SDM di BPP Kemendagri selaku pemerintah pusat, permasalahan SDM dan anggaran juga terjadi di BPP Daerah. Hal itu sering



dikemukakan oleh pejabat BPP Daerah saat pertemuan-pertemuan nasional seperti Rakornas Litbang (Rapat Koordinasi Nasional) yang diadakan setiap tahunnya.

### Rakornas kelitbang

Sebagai induk dari BPP daerah di seluruh Indonesia, BPP Kemendagri memang dituntut untuk selalu mengayomi, memfasilitasi, serta menjadi kiblat arah penelitian dan pengembangan di daerah. Untuk itu, setiap tahunnya BPP Kemendagri selalu rutin menggelar pertemuan akbar seluruh BPP Daerah dalam Rakornas Kelitbang. Ditentukan satu titik daerah untuk tempat bertemunya perwakilan litbang dari masing-masing daerah, dan membicarakan ragam persoalan kelitbang, serta tempat penyampaian segala informasi baru terkait kelitbang

dan pemerintahan daerah.

“Tahun ini rencananya Rakornas di Jakarta, di sana nanti ada format yang berbeda dari rakornas-rakornas sebelumnya,” kata Nurdin.

Hal yang berbeda itu, menurut Nurdin juga Noval Rakornas tidak hanya dijadikan ajang curhat para pengelola litbang daerah, tapi lebih memerankan optimalisasi peran litbang sebagai inovasi daerah.

“Banyak program kerja yang semestinya bisa dikerjakan oleh Litbang Daerah, salah satunya adalah mendukung pemerintah daerah melalui inovasi daerah, apalagi BPP sudah mengeluarkan PP tentang inovasi daerah dan memfasilitasi kegiatan inovasi daerah, jadi kami berharap bukan hanya keluhan permasalahan dari teman-teman BPP Daerah, tapi juga semangat berinovasi memajukan daerahnya masing-masing melalui hasil kajian penelitian. Tentu kita berharap pada Rakornas April 2018 ada kolaborasi riset nasional dari hasil pertemuan itu,” imbuhnya. (IFR)

# TUNTUTAN INOVASI DI INTERNAL KEMENDAGRI

Inovasi pelayanan publik bukan lagi barang langka yang sulit dicari. Penghargaan *Innovative Government Award* beberapa waktu lalu menjadi bukti, inovasi sudah menjadi trend yang kian digandrungi pemerintah saat ini. Inovasi menjadi kebutuhan dan keniscayaan dalam menjawab tantangan zaman. Regulasi dihadirkan untuk memperkuat para pelaku inovasi agar tidak lagi ‘gamang’. Regulasi inovasi kemudian memunculkan ragam persepsi, bahwa pemerintah pusat hanya bisa memaksa tanpa tindakan pasti. Agar inovasi tidak sekadar janji, di waktu yang akan datang inovasi diharapkan membumi tidak hanya di daerah, namun di internal pemerintah pusat khususnya di Kementerian Dalam Negeri. Mulai dari internal sendiri.

Bandung Command Center, ruang kontrol Walikota Bandung terhadap masyarakat.

Setelah sukses menggelar IGA (*Innovative Government Award*) dan merupakan simbol pencapaian tertinggi Puslitbang Inovda, IGA kerap menjadi motivasi daerah dalam mereformasi diri agar bisa menghasilkan inovasi yang bisa melayani dan membangun bangsa. Puslitbang Inovda sendiri mengakui betul, acara itu juga tidak terlepas dari kekurangan dan semangat inovasi yang semestinya bisa juga dicontohkan dari Puslitbang Inovda sendiri selaku induk dari inovasi di daerah

Di pengujung 2017 BPP Kemendagri melalui Puslitbang Inovda (Inovasi Daerah) BPP Kemendagri menggelar acara malam penganugerahan IGA (*Innovative Government Award*) untuk memberikan penghargaan pada daerah yang berinovasi dalam pelayanan masyarakat. IGA merupakan simbol untuk memotivasi seluruh daerah agar bersemangat dalam mereformasi diri melayani dan membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pun turut memberikan apresiasinya pada Puslitbang Inovda, agar malam penganugerahan semacam itu juga bisa terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Kepala Puslitbang Inovda, Safrizal mengatakan, Puslitbang Inovda memang akan menyelenggarakan IGA setiap tahun. Namun pada 2018 akan ada *forward* yang berbeda dari tahun sebelumnya. “Pada 2018 program IGA memiliki *design* dan penilaian yang baru. Jika di tahun sebelumnya kita

menggunakan prinsip penilaian berdasarkan QQB yaitu *quality* (kualitas inovasi), *quantity* (banyaknya inovasi yang dilakukan) dan *beneficiary* (dampak/manfaat) dari inovasi itu sendiri. Maka, pada 2018 kita menggunakan indeks penilaian inovasi daerah dengan indikator yang disesuaikan dari K/L (Kementerian/Lembaga) lainnya dan juga mempertimbangkan beberapa aspek pembidangan dan aspek tipologi lainnya, misalnya kategori penggunaan, katagori daerah tertinggal, perbatasan dan sebagainya. Indikator ini akan kita susun bersama dengan K/L lain yang menangani inovasi,” ungkap Safrizal mengawali diskusi.

Safrizal juga menjelaskan, Puslitbang yang dipimpinnya itu akan bekerja sama dengan K/L dalam penyusunan standar indeks dari masing-masing tupoksi K/L. Misalnya Kementerian Industri atau UMKM punya standar yang berbeda-beda dengan IGA dari Puslitbang Inovda. Tahun ini diharapkan standar indeks itu bisa satu suara, bahkan satu pintu melalui BPP Kemendagri. “Karena memang selama ini kami memiliki standar masing-masing. Ini pasti membingungkan daerah, oleh karena itu kita akan duduk bersama menyusun indeks yang dapat digunakan oleh semua K/L dan daerah,” terangnya.

Tahap pemberian penghargaan kepada daerah inovatif tentunya melalui proses yang panjang selama setahun. Setidaknya bagi daerah yang ikut kompetisi dalam ajang bergengsi ini



harus melalui 4 tahapan penilaian. Pertama, tahap penjurian berbagai inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada tahap ini, daerah harus mengirimkan sejumlah bukti terkait inovasi apa yang sudah dilakukan di daerahnya, dan Puslitbang Inovda yang akan menerima serta menyeleksi dengan rentan waktu yang sudah dijadwalkan.

Kedua, yakni tahap verifikasi dan analisis terhadap berbagai inovasi daerah yang telah mengirimkan berkas bukti kegiatan inovatif yang telah dilakukan. Ketiga, tahap penentuan nominasi daerah calon penerima penghargaan pemerintah daerah inovatif (IGA) oleh dewan juri dari berbagai sektor bidang. Lalu yang keempat, penetapan dan pemberian penghargaan pemerintah daerah inovatif kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pemenang. "Tahun lalu kami telah berhasil memberikan inovasi daerah dalam berbagai bentuk yakni, inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik; dan, inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah," jelasnya.

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang dimaksud Safrizal merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *e-planning*, *e-budgeting* dan lain sebagainya. Sementara inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perizinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya. "Sedangkan inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup, dan lain sebagainya," bebernya.

### Agar daerah tetap berinovasi

Tidak hanya itu, ada beberapa langkah



■ Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji memberikan sambutan dalam acara IGA.

yang telah diatur oleh Safrizal dan tim agar daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan inovasi bisa tetap memperjuangkan apa yang sudah baik, bahkan melangkah untuk inovasi-inovasi yang jauh lebih baik lagi. "Langkah pertama adalah dengan membuat sebuah inovasi yang matang menjadi lembaga. Jadi prinsipnya semua inovasi disusun SOP (Standar Operasional Prosedur)-nya dan wajib dilaksanakan oleh semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), pelembagaan inovasi dilakukan dengan membentuk simul dan kolaborasi secara berjenjang," jelasnya.

Kedua, untuk menjamin pelembagaan yang keberlanjutan, inovasi daerah diharapkan dapat membuat dasar hukum inovasi. "Kami menyiapkan payung hukum dari pusat melalui PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemda menindaklanjuti dengan regulasi turunannya, agar setiap siapa saja kepala daerah itu berganti, inovasi yang sudah tercipta dapat tetap berjalan," terangnya.

Lalu langkah ketiga, menyediakan program serta anggaran yang didukung untuk pengembangan inovasi yang memadai dan tiada henti. "Terakhir keempat, menjadikan inovasi sebagai kebutuhan bukan hanya kewajiban, dimana inovasi harus semakin lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, *easier*,

*cheaper, faster*. Inilah prinsip utama inovasi menurut kami," tandasnya.

### BPP sebagai leader inovasi

Tidak dimungkirkan memang acara kemarin juga masih banyak kekurangan, kritik, serta masukan Puslitbang Inovda agar bekerja lebih baik lagi. Seperti pertanyaan terkait inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Puslitbang Inovda sendiri dalam hal inovasi di Pemerintah Pusat. Sementara untuk Pusat memerintahkan daerah berinovasi namun Pemerintah Pusat justru belum terlihat inovasinya.

Secara tegas Safrizal menjawab, "Kita memang sedang menyusun pemetaan inovasi daerah di 540-an pemerintahan daerah, inovasi di pusat kita sedang menggandeng K/L untuk bersama-sama menciptakan inovasi daerah yang terintegrasi. Level pusat membuat kebijakan untuk daerah, untuk itu pusat juga harus melakukan Inovasi, kita akui itu," kata Safrizal.

Inovasi di tingkat Pemerintah Pusat, menurut Safrizal akan menciptakan akselerasi, berjuang menyatukan inovasi yang tidak hanya di BPP tapi juga ada di setiap komponen Kemendagri. "Kita akan jadikan inovasi itu dalam satu *gate*. Di dalam sistem yang kita susun, nanti ada inovasi misalkan dari Ditjen Bina Pemdes ada *e-village* untuk mengetahui *database* pemerintahan desa, dari Ditjen Otda nanti ada sistem informasi pembinaan dan pengendalian

perangkat daerah, di Puspen nanti ada SAPA Kemendagri. Nah, kita berharap akan satukan semuanya dalam satu *dashboard*, dan jika memungkinkan akan bisa diakses dari *appstore* dan *playstore*," ungkapnya.

### Sosialisasi PP Inovasi

Masukan lainnya, selain mempertanyakan inovasi apa yang dilakukan oleh Puslitbang Inovda sendiri selaku induk dari pemerintah daerah ialah, terkait sosialisasi PP tentang Inovasi Daerah. Meski sudah ditetapkan pada akhir Oktober 2017 lalu, namun kenyataannya masih banyak daerah yang belum tahu bahkan mengenai apa itu PP Inovasi Daerah. Saat *Tim Media BPP* bertanya pada Syafrizal, bagaimana upayanya agar masyarakat dan pemerintah daerah mengenal dan mengamalkan PP tersebut secara menyeluruh, Safrizal mengatakan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada daerah melalui beberapa acara kegiatan besar seperti Rakornas Kelitbang atau dengan cara mendatangkan secara langsung.

"Sebagai produk hukum baru kita akan terus sosialisasikan, memang beberapa kali kita sudah melakukan secara sporadis, ke depan nanti kita terus sosialisasikan tersebut sambil penerapannya secara langsung. Diharapkan ada semacam penyampaian informasi berjenjang dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, agar semua komponen berbagi tugas dan menyayangi kesempatan yang sama dalam membina inovasi daerah. Kita juga akan membangun *dashboard* atau pangkalan data khusus untuk pusat litbang inovasi daerah, *dashboard* ini sifatnya online. Pemda, Dinas bahkan dapat melihatnya di *website* pribadi, kita integrasikan ke *website litbang.kemendagri.go.id* diharapkan informasi mengenai PP 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah dapat menjadi informasi bersama bagi pusat dan daerah," terangnya.

### Anggaran tertinggi

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, begitu banyaknya program kegiatan yang telah dirancang oleh Puslitbang Inovda membuat Puslitbang ini butuh banyak anggaran yang lebih banyak agar semua program itu tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu, maka tidak heran jika Puslitbang Inovda mendapatkan anggaran yang paling tinggi di antara 3 Puslitbang lainnya, yakni sekira 5

milliar untuk program kegiatannya saja.

Anggaran semacam itu sebenarnya dinilai sedikit oleh Kepala Bagian Perencanaan, Mohammad Noval saat menjabarkan anggaran tiap-tiap Puslitbang. "Anggaran segitu sebenarnya sedikit, kalau kita merincikan itu secara rigid justru malah kurang," terang Noval.

Dijelaskan oleh Safrizal, anggaran itu nantinya akan dipergunakan untuk 5 program kegiatan besar lainnya, yakni Pertama, layanan pembinaan inovasi daerah di dalamnya ada pemetaan daerah pembinaan inovasi daerah. Kedua, ada Kebijakan Inovasi Daerah didalamnya memuat Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penilaian Inovasi Daerah, yang merupakan turunan dari PP 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.

Lalu yang ketiga ada layanan penilaian inovasi daerah. Di dalamnya terdapat, penyusunan pedoman penilaian indeks inovasi daerah, penjurian data inovasi daerah, penyusunan sistem informasi indeks inovasi daerah, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah dan publikasi hasil indeks inovasi daerah serta pemberian penghargaan pemerintah daerah inovatif.

"Lalu yang ke empat ada PPN (Pogram Prioritas Nasional), replikasi model hasil inovasi daerah. Target utama untuk 2 lokasi daerah tertinggal, namun kita berharap ada 34 daerah target yang akan mereplikasi. Pusat litbang inovasi daerah akan menyiapkan 7 model inovasi daerah yang nantinya akan dapat direplikasi oleh semua daerah," paparnya.

Bentuk dari model replikasi inovasi ini nantinya akan berbentuk *opensource* atau semua Pemda dapat memiliki tanpa ada batasan hak cipta. "Lalu pada program yang kelima ada 3 kajian aktual dan 3 kajian kompetitif. Kajian ini untuk mendukung dan meyempurnakan seluruh kegiatan di pusat litbang inovasi daerah," ungkapnya.

Meski mengakui akan banyak kegiatan yang dijalankan pada 2018, Safrizal mengaku bahwa pihaknya tetap rea-

litasi dan fokus pada salah satu kajian yang menjadi tupoksi dan andalannya. "Kita harus realistis juga bahwa kita tidak mungkin bercita-cita dengan terlalu banyak hal besar. Kita akan fokus dalam melaksanakan penghargaan IGA bagi pemerintahan daerah, kita berharap terus ada perbaikan dan peningkatan. Kita akan lebih banyak di publikasi, ini untuk mendorong bagaimana masyarakat mengetahui apa itu inovasi daerah. Kita juga akan ada target dari program IGA itu. Jika sebelumnya kita hanya mampu mengumpulkan 120 Pemda yang mendaftar, tahun ini target kita 540 Pemda seluruhnya harus mengikuti kegiatan indeks inovasi daerah. Kita harus mendata ke semuanya. Nantinya kita akan buat Kepmen (Keputusan Menteri) tentang indeks inovasi daerah 2018, jadi ada peringkat mana Pemda terbaik. Nah, bagi yang belum baik nanti akan ada pembinaan dari pusat," imbuhnya.

Untuk mewujudkan mimpi semua itu, Safrizal dan tim juga sudah menerapkan banyak langkah agar angan itu tak hanya menjadi program ideal semata, tapi bisa diwujudkan dengan cara: "Pertama, BPP harus memiliki visi yang sama dalam melayani negeri bahwa tentunya tujuannya adalah untuk menjadikan BPP sebagai ikon-nya Kemendagri. Di Puslitbang Inovda kita berusaha menghimpun data, membuat model inovasi untuk direplikasi dan membuat jejaring yang baik dengan K/L. Kedua, bahwa segenap pihak yang tergabung dalam BPP harus bekerjasama secara terintegrasi, Ketiga, harus bersemangat dalam mewujudkan visi dan misi," tandasnya dengan semangat.

Saat ditanya untuk terakhir kalinya, apakah dirinya yakin Puslitbang Inovda bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi, dengan lantang Syafrizal menjawab "Ya, kami sangat optimis, kalau kita mau, kita pasti bisa," jelasnya. (IFR)



# TETAP KONSISTEN PADA KEGIATAN PENELITIAN

Tahun 2018 merupakan tahun politik bagi sebagian daerah di Indonesia. Sekira 115 daerah akan memilih Kepala Daerahnya masing-masing. Puslitbang yang ada di BPP Kemendagri mencoba menelaah itu dari ragam perspektif kajian tahun politik Pilkada 2018 untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan sesuai cita-cita yang diharapkan, seperti yang dilakukan oleh Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan BPP Kemendagri.

Memasuki awal 2018, Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan BPP Kemendagri fokus pada kajian tahun politik, yakni *quantity* menyukseskan Pilkada serentak 2018. Kepala Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan, Kurniasih bahkan menyebutkan, pihaknya dan tim nya telah merancang kegiatan di tiap-tiap bidang yang telah ia gawangi. “Di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendukung kelancaran program DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu),” kata Asih mengawali perbincangan.

Cara mengawal DP4 yang dia maksud adalah mengawal agar penerapan DP4 sesuai dengan apa yang sudah didata, tidak ada manipulasi DP4 pada Pilkada berikutnya, sehingga tercipta Pilkada yang jujur, transparan dan berdemokrasi. “Kita akan bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melihat DP4 2018 ini, lalu kita coba telaah apakah ada permasalahan pada Pilkada 2018, dan ini nanti yang akan menjadi fokus kajian untuk rekomendasi ke Menteri Dalam Negeri,” terang Asih.

DP4 yang menjadi lokus kajiannya,



akan diprioritaskan di Kalimantan Barat, mengingat, Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji menjadi Pj. Gubernur Kalimantan Barat per 14 Januari 2018 lalu. “Terlebih Pak Kaban di Kal-Bar kita tentu akan konsen DP4 di sana dan harapannya bisa dipermudah, walaupun tidak spesifik kita mengawal seluruhnya, kita akan mengambil salah satu contoh di sana,” paparnya.

Sedangkan di dua bidang yang digawangi Kurniasih, yakni Bidang Pemdes (Pemerintahan Desa) dan Adwil (Administrasi Wilayah) mencoba melakukan kajian yang berbeda. Bidang Pemdes sendiri melakukan kajian terkait pengelolaan dana desa. “Kami cari tahu isu terhangat tentang dana desa, apakah selama ini sudah terjamin dan mendapatkan dukungan kerja pemerintah Kabupaten/Kota melalui infrastruktur, apakah dengan dana desa ini juga sudah tercipta ketahanan desa, apakah APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sudah terdistribusi dengan baik, kalau belum apa dan bagaimana solusinya, kita ingin cari

tahu ke sana,” katanya.

Asih juga berharap di masa yang akan datang pengelolaan dana desa bisa semakin kuat dengan UMKM (Usaha Menengah Kecil Menengah), uang desa digunakan sesuai dengan komoditi desa masing-masing. “Kita ingin mencetus, *one village one product*, artinya jika desa A komoditinya adalah perikanan, maka produk ikan lah yang ditonjolkan, jangan mereplikasi dari daerah pertanian, itu tidak cocok dan memaksakan kondisi,” ungkapnya.

Di Bidang Pemerintahan Desa ini nantinya juga berkaitan dengan program kajian di Bidang Kependudukan, Kurniasih mengatakan Bidang Kependudukan lebih fokus pada kemudahan bisnis di daerah melalui layanan cepat, tepat, dan transparan pelayanan perizinan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Jika sudah terbentuk *one village, one product* dan masyarakat mendirikan UMKM, pasti yang dibutuhkan adalah perizinan dan pengembangan karer ke depan. Semua itu butuh izin dari Dinas

Perizinan PTSP. “Selama ini kan izin usaha masyarakat banyak sekali jendelanya, dan itu yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Tahun ini Indonesia sudah naik peringkat kemudahan berbisnis dari 100 sekian menjadi urutan 90 an, dan target presiden tahun ini Indonesia bisa menduduki angka 40an,” terang Kurniasih.



Saat Tim Media BPP bertanya, mengapa dari ke-empat Puslitbang, hanya tempatnya lah yang tetap melakukan kajian tanpa program implementatif, dia menjawab. “Kami mencoba untuk tetap sesuai pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan,,” celerahnya.

Lalu bagaimana jika naskah rekomendasi itu hanya berujung pada ketidakjelasan, dan selalu berhenti di Menteri Dalam Negeri tanpa ada tindak lanjut. “Ya kami berusaha agar itu semua mendapat masukan sebaik mungkin, untuk itu menjadi tugas kami mengemas kajian tersebut dengan semenarik mungkin. Kami tidak akan menyarankan untuk merivisi regulasi, karena saya yakin regulasi itu selalu dirancang dengan sebaik mungkin, namun implementatifnya selalu tidak berjalan. Itulah yang ingin kita cari tahu solusinya,” bebernya.(IFR)

## LEADERSHIP AWARD PERLU LANDASAN HUKUM

Salah satu kesuksesan malam penghargaan Kemendagri kepada daerah adalah pemberian penghargaan kepada kepala daerah yang menunjukkan keberhasilan kepemimpinan dan berdedikasi terhadap daerahnya melalui Leadership Award. Tak banyak yang tahu, ada Puslitbang Otda, Kesatuan, Politik, dan PUM yang dalam pelaksanaannya.

Penyelenggaraan *leadership award* kemarin terbilang sukses digelar bersamaan dengan IGA (*Innovative Government Award*). Sebanyak 5 Gubernur, 12 Bupati, dan 7 Walikota terbaik menerima penghargaan *Leadership Award 2017*. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pun berpesan, agar agenda semacam ini bisa terselenggara setiap tahun.

Namun, saat *Tim Media BPP* menyanggah Syabnikmat, Kepala Puslitbang Otda, Kesatuan, Politik, dan PUM mengatakan, pihaknya tidak akan menyelenggarakan kegiatan semacam ini secara rutin, hanya saja digantikan dengan menyiapkan indikator pemimpin daerah terbaik setiap tahunnya. “Pemberian penghargaan akan kita lakukan minimal setiap 3 tahunnya, sementara indikator pemimpin akan terselenggara setiap tahun,” jelas Syabnikmat.

“Syarat mengikuti ajang *Leadership Award* itu dinaikkan menjadi usulan minimum telah menjabat selama 5 tahun atau satu periode, tapi tentu hal itu sulit jika si kandidat bukan pemimpin dua periode.”

Hal itu disebabkan, pencarian pemimpin terbaik setiap tahun bukanlah perkara yang mudah, kalau diadakan setiap tahun, maka tidak akan muncul wajah baru dalam pemberian penghargaan. Yang dapat penghargaan bisa jadi Gubernur/Walikota/Bupati yang itu-itu saja. “Sedangkan kemarin Pak Menteri bilang, hampir 70 persen adalah wajah lama, kami menanti wajah baru mendapatkan penghargaan, agar Indonesia tidak krisis kepemimpinan,” imbuhnya.

Wajar saja, karena penilaian *Leadership Award 2017*, melalui berbagai kajian kepemimpinan kepala daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang antara lain aspek: (1) Kapabilitas; (2) Akseptabilitas; (3) Kompatibi-

litas; (4) Kredibilitas; (5) Integritas; (6) Rekam Jejak, dan (7) Inovatif. Setelah melalui tahapan dan rapat-rapat pembahasan materi pemberian penghargaan Kepala Daerah, BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kemendagri telah mempertimbangkan masukan dan saran dari para pakar/narasumber serta peserta rapat. “Syaratnya adalah minimal pemimpin tersebut telah memasuki masa jabatan minimum 4 tahun, dan sudah memberikan dampak positif kepada masyarakatnya,” terangnya.

Kalau syarat demikian terus diterapkan, itu artinya tidak ada kesempatan bagi pemimpin baru untuk mendapatkan penghargaan, bahkan Syabnikmat menyebutkan, syarat mengikuti ajang *Leadership Award* itu dinaikkan menjadi minimum telah menjabat selama 5 tahun atau satu periode, tapi tentu hal itu sulit jika si kandidat bukan pemimpin dua periode. “Landasannya adalah, kalau 4 tahun itu tanggung, biasanya malah cara kerja kepemimpinan seseorang dilihat dari akhir masa jabatannya, pertanggungjawabannya melalui RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) itu apakah sudah dapat dilihat hasilnya, sesuai apa belum,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, landasan rencana diselenggarakan setiap 3 tahun sekali itu

dimaksud agar pemimpin daerah yang baru diberi kesempatan untuk menunjukkan *performance* terbaik dalam manajemen daerahnya masing-masing. “*Nah*, landasannya adalah indikator kepala daerah yang setiap tahun akan kita rencanakan,” paparnya.

Selain indikator tersebut, Syabnikmat juga berharap program ini ada payung hukum sebagai landasannya. Pada 2017, sebenarnya Syabnikmat dan tim sudah merancang semacam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang mengatur mengenai indikator penilaian dan termasuk *reward*-nya. Mengingat kegiatan macam ini sudah pernah dilakukan oleh berbagai lembaga sebelumnya, namun hal tersebut belum berhasil dilaksanakan karena terkendala waktu. “Pada 2006-2009 *Leadership Award* pernah diselenggarakannya Kemendagri, sementara 2010 - 2011 penyelenggaranya Kemendagri. *Nah*, dengan adanya landasan hukum itu, diharapkan semua penghargaan ini bisa satu pintu, dan menjadi indikator yang jelas antar lembaga,” jelasnya.

Untuk menciptakan itu semua, Syabnik-

mat mengatakan Puslitbangnya perlu anggaran yang memadai agar landasan hukum *leadership award* dapat tercipta. Maka tidak heran jika tahun ini saja, Puslitbang Otda, Kesatuan, Politik, dan PUM mendapatkan anggaran terbesar ke-dua setelah Puslitbang Inovda, yakni sebesar 2,9 miliar atau hampir 3 miliar. Saat ditanya kemana sajakah nanti anggaran itu bermuara, Syabnikmat menjelaskan, bahwa fokus kajiannya sebenarnya pada indikator kepemimpinan daerah, namun ada beberapa program kajian penelitian lainnya yang tidak kalah penting, yakni: Seperti di Bidang Otda, ada 4 kegiatan utama. 1) mengkaji kebijakan pelaksanaan Pilkada di Daerah Papua dan Papua Barat dalam memperkuat Otonomi Khusus, 2) terkait Penyusunan Kebijakan Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah dan Sinergitas Hubungan dengan DPD, 3) rekomendasi indeks kepemimpinan Kepala Daerah, dan 4) Rekomendasi Proyeksi/Perkiraan Strategik Nasional.

Sementara di Bidang Politik ada 1) menakar peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam peningkatan partisipa-

si masyarakat dalam Pilkada di Daerah, 2) Peran Organisasi Kemasyarakatan dan Parpol dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2018, 3) keberadaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam Pilkada serentak tahun 2018, 4) peluang dan pemanfaatan penerapan teknologi pada pemilu tahun 2019.

Lalu di Bidang PUM (Pemerintahan Umum), ada 5 program kajian: yakni 1) Sinergitas Pemerintah dan Pemda dalam rangka penanganan konflik sosial, 2) Penguatan pemahaman ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 3) Evaluasi keberadaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah, 4) evaluasi keberadaan kelembagaan pemerintah umum di daerah, 5) Efektivitas keberadaan forum pembaruan kebangsaan di daerah.

Dari beragam kegiatan itu, saat ditanya Syabnikmat dengan lantang menjawab. “Kami optimis itu semua bisa selesai dengan tepat waktu, sesuai dengan waktu dan anggaran yang tersedia, dibutuhkan kerja keras dan komitmen bersama,” tutupnya. (IFR)

# PETAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**S**empat berganti kepemimpinan sebanyak 3 kali dalam setahun, tidak membuat Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah goyah. Beberapa program berhasil diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai target, bahkan hal tersebut mendapat pujian dari Kepala Bagian Perencanaan, M. Noval. “Dari ke-4 Puslitbang di BPP, Puslitbang Keuda memang yang paling disiplin dan sesuai dengan rencana programnya meski setahun mengalami 3 kali pergantian kepemimpinan,” terang Noval.

Saat *Tim Media BPP* menyambangi ruangan Horas Mouritz Panjaitan, Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda BPP, Mouritz begitu ia disapa memang yang bekerja keras merampungkan semua laporan kajian penelitian di akhir tahun dan di awal masa jabatannya. Seperti program kajian integritas pengelolaan keuangan daerah, kajian pengelolaan uang non tunai, pengelolaan akuntansi berbasis akrual, akuntabilitas dan efektivitas dana desa, penguatan fungsi camat, dan perda yang menghambat investasi.

Saat ditanya apa program kegiatannya di 2018, Mauritz menjawab hal itu masih ada sangkut pautnya dengan program kerja 2017. “Masih berkaitan, hanya saja di 2018 kita ada beberapa kegiatan yang lebih progresif dibandingkan tahun sebelumnya,” jawabnya.

Setidaknya, ada 6 program kerja yang Mauritz jabarkan pada *Tim Media BPP* terkait program kerjanya selama 2018. Di antaranya terkait indeks pengelolaan keuangan daerah. Program ini juga disebut-sebut Noval sebagai program implementatif dari 3 program puslitbang lain-

nya. “Maksudnya indeks pengelolaan keuangan daerah begini, kita akan lihat sehat tidaknya dalam pengelolaan anggaran, seperti kemampuan untuk mematuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan operasional serta mengantisipasi keadaan darurat, solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan, transparansi, akuntabel, dan terpenuhi rasio belanja wajib. Misalnya 20 persen pendidikan, 10 persen kesehatan, pengelolaan bayar sudah transparan belum, dan pada tahun ini target kita adalah semua daerah masuk dalam pemetaan indeksasi pengelolaan keuangan daerah ini,” paparnya.

Meski diakui, beberapa kajian penelitiannya menggunakan data sekunder dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 2016 dengan menggunakan opini pemeriksaan BPK setiap daerah, dari situ nanti terlihat urutan daerah mana yang sudah transparan, data BPK juga sudah pernah digunakan oleh peneliti UGM (Universitas Gajah Mada) dalam meneliti hal yang sama, untuk itu Puslitbang Keuda juga akan bekerja sama dengan UGM dalam pengelolaan data. “Tapi kami akan verifikasi ke lapangan dengan penelitian ke beberapa daerah tertentu, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Papua, dan Sulawesi Selatan,” terangnya.

Indeksasi ini nanti menjadi pangkalan data BPP, dari Puslitbang kami, yang mungkin bisa digunakan sebagai landasan pemberian penghargaan semacam IGA, *Leadership Award*, atau pemberian anggaran belanja. “Kami berharapnya demikian,” imbuhnya.

Selain itu, program kegiatan lainnya yang masih berkaitan dengan program pengelolaan anggaran yang transparan, Puslitbang Pembangunan dan Keuda juga nantinya akan mengkaji terkait implementasi *e-budgeting* (pengelolaan keuangan daerah melalui sistem *online*). “Kami berharap seluruh daerah sudah menggunakan sistem *e-budgeting*, bukan hanya daerah-daerah yang sudah maju saja. Seperti Surabaya dan DKI Jakarta sudah menggunakan sistem *e-budgeting* selama ini, dan berharap hal yang sudah baik ini bisa ditularkan ke daerah lainnya,” tambahnya.



## Program non keuangan

Tidak hanya masalah keuangan daerah yang menjadi kajian Puslitbang Pembangunan dan Keuda, tetapi ada beberapa kegiatan lainnya yang di luar kajian keuangan daerah namun tetap berhubungan terkait pembangunan dan isu terkini. Mauritz mengatakan beberapa kajian itu seperti mengkaji dana pilkada termasuk isu pilkada yang menyedot dana pusat, sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah. “Ada isu dimana dana calon atau kandidat masuk ke parpol berupa dana mahar, untuk itu kita akan mengkaji bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi lagi, bagaimana caranya? Yakni dengan memberikan sanksi kepada pelakunya, parpolnya, dan kandidatnya juga. Karena sebelum ini itu sudah berlangsung lama tapi tidak ada



efek jera, sehingga kami adakan sanksi yang tegas, Misalnya kalau Parpol yang bersangkutan ketahuan meminta mahar pada kandidatnya, maka parpol yang ber-

sangkutan tidak diizinkan untuk pilkada, pileg, atau pilpres supaya mereka tidak melakukan hal tersebut lagi,” jelasnya.

Selain itu program lainnya dari Puslitbang Pembangunan dan Keuda adalah terkait dampak kebijakan ekonomi kreatif terhadap pengembangan produk unggulan daerah dan memaksimalkan fungsi inspektorat sebagai lembaga daerah pengawas keuangan yang selama ini tidak independen. “Banyak intervensi dan penangkapan kepala daerah tanpa pengawasan dan arahan inspektorat daerah terlebih dahulu selaku orang pertama yang tentu mengetahui gerak-gerik kepala daerah,” paparnya.

Hal tersebut yang nantinya diatur lebih lanjut terkait program kajian Puslitbang Keuda lainnya terkait turunan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada banyak sekali PP (Peraturan Pemerintah) yang belum diturunkan dari UU Pemerintahan Daerah tersebut. “Kita juga nanti lihat dinamika problematika termasuk solusinya, di situ nanti juga kita berharap fungsi inspektorat dalam pengawasan dana desa yang akuntabel, baik, dan independen, lalu juga soal pembagian wilayah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, model penerapan BUM Desa, strategi pengembangan ekonomi kreatif terhadap produk unggulan daerah,” ungkap Mauritz.

Mauritz berharap semua program yang sudah dipaparkan itu dapat berjalan sesuai dengan target, seperti tahun-tahun sebelumnya bahkan jauh lebih baik. “Tahun lalu serapan kami 95 persen, dan *output*nya jelas, kami berharap ke depan akan terus seperti ini bahkan jauh lebih baik lagi,” harapnya. (IFR)

# Cirebon Butuh Peneliti

*Lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menelurkan regulasi turunan, salah satunya PP 18 tahun 2016 tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah). PP tersebut mengamanatkan beberapa lembaga yang semula sebagai bidang penunjang pelayanan pemerintah, harus mendirikan lembaga sendiri. Salah satunya adalah Lembaga Litbang (Penelitian dan Pengembangan). Namun ternyata bukan perkara yang mudah untuk membentuk lembaga baru, mereka semua mayoritas terbentur masalah SDM dan juga anggaran penelitian.*

**S**ejak lahirnya PP mengenai OPD, beberapa daerah di Indonesia memang langsung gencar menata OPD baru tiap daerahnya. Ada banyak cerita dari masing-masing daerah yang berjuang menata OPD baru, di balik perjuangannya yang tidak mudah, dan dengan harapan lembaga ini dapat berkembang menjadi cikal bakalnya segala kebijakan pemerintah yang lahir.

Meski begitu, ada beberapa daerah yang memang secara geografis, jumlah penduduk, dan APBD-nya (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mampu untuk membuat litbang sebagai lembaga yang berdiri sendiri dengan kapasitas SDM yang cakap. Namun, bagi beberapa daerah, terutama bagi daerah yang anggarannya kecil, dan tidak mendapatkan dukungan pemerintah daerah setempat, kebutuhan SDM terutama peneliti sangat susah dibangun. Seperti di Kabupaten Cirebon misalnya

Pada pengujung tahun 2017, **Media BPP** mendatangi Bappeda Litbang Kabupaten Cirebon dan Litbang Kota Cirebon untuk mencari tahu bagaimana kedua lembaga itu terbentuk pasca lahirnya PP tentang OPD.

Belum ada peneliti

Saat itu, jarum jam masih menun-

jukkan pukul 05.00 subuh, Tim Media BPP sudah meluncur dari Jakarta menuju Litbang Kabupaten Cirebon dengan menggunakan kendaraan roda empat. Perjalanan panjang tanpa halangan macet pun kami tempuh selama 4 jam. Tepat pukul 08.00 pagi kami tiba di kantor Litbang Kabupaten Cirebon setelah lama berputar-putar menelusuri jejeran gedung kantor pemerintahan Kabupaten Cirebon yang dalam satu kompleks besar.

Di sana, **Media BPP** diterima baik oleh Lina Marlina (Kasubbid Sosial Budaya) dan Imamul Hakim (Kasubbid IPTEK). Litbang Kab. Cirebon

masih menempel dengan Bappeda (Badan Pembangunan Daerah) Kab. Cirebon dan menjadi Bidang Litbang yang mengurus urusan Bidang Perencanaan. Namun setelah lahirnya PP tentang OPD, Bidang Litbang itu mulai membentuk Sub Bidang dengan lebih memfokuskan kajian kelitbangan yang dibutuhkan masyarakat. “Tadinya tugas kami adalah sebatas membantu bidang lain, terutama Bidang Perencanaan,” terang Imam.

Pria alumnus UGM Yogyakarta itu menyebutkan, Bidang Litbang yang dulunya bernama Bidang Statistik, Penelitian, dan Pengembangan yang

memimpin dua kasubbid, yakni Sub Bidang Statistik, Evaluasi, dan Pelaporan, dan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. Namun kini namanya telah menjadi Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan 2 Sub Bidang yang dikepalai oleh Imam dan Lina itu.

“Saya dengan Bu Lina ini tadinya orang perencanaan, dan tugas kami ya membantu riset-riset perencanaan. Seperti: apakah program perencanaan sudah berjalan dengan baik atau belum selama ini,” terangnya.

Imam dan Lina sama-sama orang baru dan belum begitu terbiasa dengan dunia penelitian. Mereka juga sama sekali tidak paham, mengapa mereka bisa dipindah di Bidang Litbang, membawahi 1 staf PNS, dan 2 PTT (Pegawai Tidak Tetap). “Di sini sangat terbatas sekali SDM-nya, masing-masing sub bidang hanya punya staf PNS 1 orang, itupun sudah usia lanjut yang 2-3 tahun lagi pensiun, jadi kami benar-benar sangat terbatas sekali untuk melakukan kegiatan penelitian dengan kuantitas dan kualitas SDM yang ada,” keluh Lina.

Pernyataan ini kemudian ditimpal oleh Imam, katanya jangankan tenaga peneliti, tenaga staf dan administrasi saja kurang, apalagi peneliti dan tuntutan *output* hasil penelitian. “Makanya kami di sini juga kebingungan waktu awal 2017 Bidang Litbang ini terbentuk, kami harus apa, dengan anggaran yang hanya 300 juta dan tuntutan *output* real penelitian,” jelasnya.

Bidang Litbang Kabupaten Cirebon memang belum mempunyai peneliti, dan program kegiatan penelitian yang jelas. Sesekali mereka tetap membantu kegiatan perencanaan, sambil beberapa merintis kegiatan penelitian dengan membuka kompetisi karya ilmiah di kalangan Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah.

Kegiatan semacam itu, dianggap Imam sebagai tahap awal di tempatnya bekerja kini, dalam mengemban tugas pokok dan fungsi baru. “Ada beberapa kegiatan yang sudah kami





fokuskan memang untuk penelitian. Misalnya tahun ini, kami mencoba menjangkau naskah penelitian di beberapa Perguruan Tinggi dan anak-anak SMK. Kami mau memetakan dulu apa isu strategis yang menjadi hal menarik mereka para peneliti, bagaimana model penulisan karya penelitian yang benar dari Perguruan Tinggi di sini. Dengan kompetisi itu *kan*, kita jadi tahu dan banyak belajar, sekaligus ada *output* yang jelas terkait penelitian dari hasil karya orang lain,” paparnya.

Meski begitu, memang tidak sedikit menurut Imam hasil karya peneliti dosen di situ yang kurang bagus, karena jumlah PT di Cirebon juga sedikit. “Itulah dilematis kami, PT di sini sangat sedikit, mau bekerja sama dengan PT pun terbatas SDM yang cakap, makanya kami coba kerjasama dengan pihak luar Cirebon juga ke depannya, memanfaatkan jaringan alumni sekolah saya dulu di UGM,” ungkap Imam.

Imam memang dikenal sangat vokal

soal penelitian dan beberapa harapannya terhadap lembaga yang sekarang tempatnya bernaung. Kepada *Tim Media BPP*, dia banyak menceritakan soal terkait rencana program kerjanya di masa yang akan datang untuk memajukan Kabupaten Cirebon.

“Saya pernah membuat riset kecil-kecilan bersama teman saya terkait ketahanan pangan. Ternyata memang Indonesia tidak bisa melakukan itu. Kabupaten Cirebon ini semua serba impor luar Cirebon, ada yang impor dari Jawa Tengah/Timur, belum lagi soal daging dan kebutuhan lainnya. Bahkan mangga saja, kita kalah dengan Indramayu. Padahal Cirebon punya mangga yang khas, namanya gedong gincu. Tapi orang justru lebih mengenalnya itu bukan dari Cirebon, padahal itu asli dari Cirebon. Selain itu terkait beras. Saya dan teman saya di UGM pernah menghitungnya, ternyata 2030 ketersediaan beras di Cirebon akan habis dengan kondisi lahan tani yang juga semakin habis



akibat pembangunan gedung, apa iya kita mengandalkan impor dari luar terus? Makanya saya sedang gencar untuk mengubah *mindset* orang-orang agar mencoba beralih dari nasi ke singkong, ubi, atau gandum sebagai pengganti nasi, agar ketahanan pangan tetap terjaga,” jelasnya.

Dari obrolan panjang bersama *Tim Media BPP* dan *Tim Jurnal BPP*, terlihat Imam juga memunyai antusiasme yang tinggi untuk memajukan lembaga dengan ragam kegiatan yang akan dijalaninya. Hal itu terlihat saat *Tim Jurnal BPP* menyosialisasikan bagaimana agar Bidang Litbang Kab. Cirebon memunyai *output* melalui jurnal. “Kita kebetulan memang ingin sekali membuat jurnal, dan ada rencana konsultasi sana-sini. Kami terimakasih banyak teman-teman sudah hadir, jadi kami yang tidak perlu repot-repot ke Jakarta. Semoga suatu saat kami juga bisa memunyai jurnal sebagai BPP Kemendagri,” terang Imam di akhir sesi konsultasi jurnal dan kunjungan Media BPP.

BPPPPD Kota Cirebon

Masalah yang sama tidak hanya terjadi pada Kabupaten Cirebon, tapi juga terjadi pada BPPPPD Kota Cirebon (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), di sana kami disambut oleh banyak staf dan pejabat litbang. Ada Agus Hedyana (Sekretaris BPPPPD

Kegiatannya pun masih sebatas mendukung kegiatan perencanaan, seperti tahun-tahun sebelumnya. “Ya terus mau bagaimana lagi? Kami juga bingung mau mengerjakan apa, sebab di sini juga dituntut harus membuat RIK (Rencana Induk Kelitbang), tapi kami sendiri tidak tahu model RIK itu seperti apa,” terangnya.

Mereka juga menceritakan bagaimana lembaga itu terbentuk setelah lahirnya PP tentang OPD. Dari hasil penelitiannya, lembaga yang memang baru terbentuk itu juga tetap menempel pada Bappeda yang mereka kenal dengan nomenklatur BPPPPD. “Program kami di sini ya masih sebatas membantu perencanaan untuk tahun ini. Tadinya kami bernama Bidang Litbang dan Kemasyarakatan yang di bawahnya terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Peneliti dan Pengembangan Pemda, Sub Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat,” terangnya.

Namun sejak lahirnya UU 23 sebagai hasil dari revisi dari UU 32 tentang Pemerintahan Daerah. BPPPPD Kota Cirebon mulai mengamati, bahwa ada amanat didirikan Litbang sebagai fungsi penunjang daerah. “Wah saat itu kami berpikir, berarti semestinya bisa diperkuat lagi melalui Permen. Maka sebelum Permendagri tentang Pedoman Kelitbang itu keluar, sejatinya kami juga sudah menata tata kelola kerja kami dengan menghadirkan segala SDM yang mesti ada di Litbang,” terang Agus.

Dalam beberapa kesempatan pertemuan tersebut, Agus memang yang paling banyak berbicara dan mengontrol segala pembentukan lembaganya hingga menjadi BPPPPD. Ia yang lulusan hukum tentu paham betul mengenai payung hukum dari terciptanya suatu lembaga. Karena belum ada yang keluar dari pemerintah pusat. Ia dan beberapa pegawainya berinisiatif mendatangi Pemrov Jawa Barat untuk menyusun pedoman kelitbangan daerah.

ah. “Karena kami rasa memang pantas membuatnya semacam Permendagri sendiri,” terangnya.

Namun sayang, idenya tidak seperti gayung bersambut. Malah, beberapa fungsi kelitbangan di tempatnya dihapus karena penilaian klasifikasi mengatakan Kota Cirebon cukup badan litbangnya digabung dengan lembaga lain dalam nama BPPPPD.

“Saya sebetulnya mendukung PP OPD tersebut, karena kami ingin berkembang, tapi saran saya, kalau memang ingin menciptakan regulasi yang baik, harus membuat penjelasan-penjelasan terperinci tentang itu. *Lah* ini, Permendagri baru keluar setelah 2 tahun UU Pemda ditetapkan, kan lambat sekali. Selain itu kita yang di daerah dituntut inovasi, buat penelitian yang baru, padahal tata kelola manajemen pegawai dan penelitiannya saja belum beres,” tandasnya.

Meski banyak kendala yang dialami kedua lembaga tersebut, kedua lembaga satu provinsi beda wilayah itu punya misi yang berbeda-beda. Kabupaten Cirebon lebih menyibukkan diri dengan program kegiatan yang mengarah pada penelitian, sementara Kota Cirebon masih menata tata kelola struktur dan rutin mengikuti segala arahan dan koordinasi dari pusat (Kemendagri). “Tentu kami berharap, Pemerintah Pusat segera merampungkan RIK (Rencana Induk Kelitbang) yang bisa menjadi pedoman di daerah, kami terus terang saja, anggarannya sedikit dan fungsinya belum optimal,” terang Agus.

Hal itu ditambahkan oleh Imam, menurutnya justru ini kesempatan bagi Kemendagri untuk membina dengan baik tangan-tangan di daerah. “Kemendagri adalah kementerian yang paling luas dan menjangkau hingga ke daerah. Ini justru menjadi momentum Kemendagri untuk menguatkan yang kecil-kecil di daerah itu. Semoga beberapa masukan dari kami (*daerah-red*), bisa menjadi beberapa pertimbangan dan fasilitator yang lebih baik lagi dari pemerintah pusat,” tutup Imam dengan penuh harap. (IFR)

# Alternatif Wisata di Jalur Pantura

Medio Desember 2017 lalu, *Media BPP* berkesempatan mengunjungi Brebes dan Cirebon. Sulit dibayangkan ternyata Brebes tidak hanya melulu telur asin, atau Cirebon yang tidak pernah lepas dari Keraton Kasepuhannya. Ternyata ada tempat-tempat lain yang unik dan menarik yang bisa dijadikan tempat wisata alternatif ketika melintasi pantura. Tempat-tempat tersebut mungkin akan membuat kita ingin kembali lagi ke sana.



**SAMBIL** duduk Rizal (25) sibuk mengambil kuah santan dengan ceng-tong, kemudian menyiramkannya ke atas piring yang sudah terisi potongan lontong. Di samping kirinya Akhmad juga sibuk mengiris lontong, sesekali menyapa pembeli yang datang tak pernah henti. Itulah kesibukan pemilik warung Sate Blengong Kasturi Razak Brebes, ketika *Media BPP* datang ke Brebes Desember 2017 lalu.

Brebes ternyata tidak hanya memiliki telur asin. Sate bebek blengong adalah opsi bagi para pecinta kuliner ketika melancog ke Brebes. warung Sate Blengong Kasturi Razak merupakan warung sate paling legendaris di Brebes. Selain unik, makanan yang satu ini berasal dari hewan hasil perikanan antara bebek dan mentok (entok), sehingga tekstur dari dagingnya sangat lembut.

Sate yang disajikan di warung ini tidak sesederhana warungnya jika dilihat dari seberang jalan. Warung tersebut hanya seluas 3x3 meter persegi dengan bangku-bangku panjang yang ditata melingkari meja. Di atasnya tersaji beberapa baskom kuah santan lengkap dengan sate-sate dengan potongan daging yang besar dan tusuk sate yang panjang serta kerupuk khas yang disajikan.

Menurut Rizal, warung sate ini sudah lebih dari 40 tahun berdiri. "Nama Kasturi itu kakek saya, sedangkan Razak itu bapak saya," ucapnya.

Warung Sate Blengong rupanya tidak hanya menjadi primadona bagi warga sekitar, namun menurut pengakuan Rizal, warung yang sederhana tersebut juga kerap dikunjungi para selebriti tanah air ketika berkunjung ke Brebes.

Sebut saja Bedu, Ivan Gunawan dan beberapa artis lainnya sudah pernah mencicipi. Tidak hanya artis, rupanya Sate Blengong dari Warung Kasturi Rajak ini juga selalu dipesan istana untuk hidangan acara-acara negara di sekitar Jawa Tengah.

Selain itu, baru-baru ini, Sate Blengong Kasturi Rajak juga diundang dalam pameran makanan Nusantara di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten. Menurut Rizal ia menyiapkan lebih dari 2000 tusuk sate. Hasilnya sate blengong yang dibawanya ludes tak tersisa di hari kedua.

Keberadaannya memang cukup laris, ketika *Media BPP* mengunjunginya pukul 4 sore, sudah terlihat antrian pembeli menunggu dilayani, ada yang hanya makan di tempat atau pun sekadar dibungkus. Warung sate ini menyediakan tiga menu andalan yaitu sate bakar, sate masak, dan kupat. Kupat menjadi makanan pendamping dengan kuahnya yang kaya akan bumbu dan terasa pedas.

Rizal membanderol Rp 60 ribu untuk 20 tusuk sate blengong bakar, sedangkan Rp 6 ribu per tusuk, dan Rp 12 ribu untuk satu porsi kupat. Warung sate ini pun buka dari jam 3 sore sampai sate habis.

"Biasanya tidak sampai jam 8 malam sudah habis, kita menyediakan 200 tusuk saja," kata Akhmad.

Meski sudah lama berdiri, Warung

Sate Blengong Kasturi Razak ini sengaja tidak direnovasi, warungnya yang kecil dan berada di persimpangan jalan tetap dipertahankan, bahkan saat ini hanya tersisa satu petak yang berdiri di atas sungai kecil di persimpangan Jl. KH. Hasyim Ashari. Tempatnya dibiarkan apa adanya. Namun soal rasa memang juara.

## Vihara tua

Hari berikutnya sebelum bergegas menuju Jakarta, *Media BPP* singgah di Cirebon. Beruntung pagi itu cuaca cerah meningkahi perjalanan. Awalnya *Media BPP* berencana mengunjungi beberapa kawasan wisata alam di sekitar Cirebon, namun karena lokasi wisata yang jauh dan diprediksi akan memakan waktu tempuh cukup lama, akhirnya *Media BPP* memilih



kan berdiri sejak 1595 tersebut menjadi bukti, Cirebon merupakan salah satu daerah yang sarat dengan akulturasi budaya dan agama. Terletak di Jl Kantor No 2, Kampung Kamiran, Kelurahan Panjunan, dan Kecamatan Lemah Wungkuk. Lokasinya bersebelahan dengan bangunan kuno bekas gedung Nederlandsch Indische Es-compto Maatschappij, sekarang menjadi Bank Mandiri.

Selangkah melewati pintu gerbang utama, aroma dupa tercium kuat. Alunan musik klasik dari *guzheng* (kecapi Cina) mengiringi dengan lembut dan menambah suasana ketenangan. Seorang penjaga mempersilakan kami untuk masuk dan melihat-lihat, belum sempat diwawancara ia kemudian pergi entah ke mana.

Dari hasil pengamatan *Media BPP*, Vihara ini memiliki beberapa keunikan selain terdapat patung Dewi Welas Asih (Kwan Im), Vihara memiliki jangkar raksasa yang menjulang bagian samping ruang utama dan dipercaya sebagai peninggalan Laksmana Cengho. Dari beberapa sumber informasi terpercaya, Laksamana Cheng Ho pernah mendaratkan armadanya di kota ini, ia juga sempat membangun mercusuar di pesisir pantai.

## Istana kerajinan kerang

*Media BPP* juga mengunjungi sebuah



mengunjungi beberapa tempat unik di sekitar kota Cirebon.

Vihara Dewi Welas Asih menjadi pilihan pertama. Vihara yang diperkirakan

tempat usaha kerajinan kerang yang semakin hari semakin ramai dikunjungi orang. Bukan untuk berbelanja, namun hanya sekadar melihat dan berfoto ria di dalamnya. Maklum saja

beberapa bulan terakhir tempat tersebut sedang ramai dibicarakan *netter* sebagai lokasi yang *instagramable*.

Kerang-kerang diolah menjadi kerajinan bernilai tinggi, dari mulai souvenir, perlengkapan rumah tangga seperti meja rias, kursi, lampu hingga replika hewan sebesar unta, menghiasi setiap ruang rumah kerang tersebut. Produk yang dihasilkan memiliki keunikan tersendiri, ada yang berwarna alami, silver, bening, dan keemasan.

Para pemilik dan penjaga tokonya juga tidak keberatan jika ada orang yang berkunjung hanya sekadar untuk berfoto. "Tidak apa-apa kalau cuma mau foto *doang*, kita sudah biasa *mas*," kata perempuan penjaga *Shellcraft* Cirebon tersebut.

Menurut salah seorang satpam, toko yang dikelola oleh CV. Multi Dimensi tersebut berdiri sejak 2000 dengan mengekspor kulit kerang simping, kulit kerang yang belum diolah, empat tahun kemudian pada 2004, toko tersebut mengembangkan sayapnya dengan memproduksi kulit kerang dan mengubah tempat usahanya menjadi istana kerajinan kerang. "Sekarang hasil kerajinannya yang diekspor hingga ke luar negeri," ucap seorang satpam.

Istilah istana kerajinan kerang kian lekat dengan *Shellcraft* Cirebon ini. Keberadaannya semakin populer setelah banyaknya para *netter zaman now* mempostingnya di *instagram*, istana kerajinan kerang pun kemudian semakin populer dan mulai dikembangkan secara profesional sebagai lokasi wisata. Belum lama ini di laman *shellcraft.com*, laman resmi kerajinan kerang ini, mengajak masyarakat untuk menjadikan Rumah Kerang Cirebon yang terletak di Jalan Ki Ageng Tapa, Desa Astapada, Kabupaten Cirebon ini destinasi wisata utama ketika berlibur.

Istana kerajinan kerang menjadi tempat terakhir persinggahan *Media BPP* mengunjungi Brebes dan Cirebon. Meski dalam beberapa jam, beberapa tempat yang dikunjungi mampu memahat kesan impresif dalam hati. Di lain hari *Media BPP* pasti akan kembali lagi. (MSR)

# Otonomi Khusus Perlu Dievaluasi

*Pelaksanaan otonomi khusus perlu dievaluasi. Pemerintah daerah perlu didampingi agar dana itu tepat sasaran. Kerja bersama yang berkelanjutan juga penting agar bencana itu tak terulang.*



JAKARTA — Kepada Kompas beberapa waktu lalu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati menyatakan, munculnya krisis kesehatan di Asmat menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah penggunaan dana otsus Papua yang digelontorkan pemerintah pusat dengan jumlah cukup besar sejak tahun 2002.

Menurut Diah, pada 2017, berdasarkan data Kemendagri, alokasi dana otonomi khusus (otsus) Papua mencapai Rp 5,5 triliun. Dana itu masih ditambah dengan dana tambahan infrastruktur yang tahun lalu mencapai Rp 2,4 triliun. "Dana otsus itu sudah diperintahkan oleh undang-undang bahwa penggunaannya harus diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Dana otsus dan dana tambahan infrastruktur dari tahun ke tahun kian meningkat," ujarnya.

Diah menambahkan, Kemendagri telah membentuk tim internal untuk mengevaluasi pelaksanaan otsus di Papua. "Kelihatannya memang harus ada pendampingan dan pendekatan khusus supaya dana otsus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat Papua," katanya.

Senada dengan Diah, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan kepada *Republika*, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap dana otonomi khusus. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas penggunaan dana otonomi khusus dalam mengurangi ketimpangan.

"Jadi memang dievaluasi itu berarti benar nggak peruntukkan dana otonomi khusus itu sesuai dengan rencana untuk mengurangi ketimpangan," ujar Jusuf Kalla.

Adapun, dana otonomi khusus diperuntukkan untuk daerah Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Jusuf Kalla mengatakan, dana ini digunakan untuk kepentingan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, dan kesehatan. Apabila dalam evaluasi ditemukan penyimpangan dan indikasi korupsi, maka pemerintah akan segera memperbaikinya.

"Diperbaiki pada apa yang akan datang, korupsi bukan saja dana otonomi khusus. Dana apa saja selama dikorupsi harus diperiksa," kata Jusuf Kalla.

Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho mengatakan, kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat bisa jadi hanya puncak gunung es dari persoalan kesehatan di Papua. Yanuar menilai, persoalan yang muncul di Asmat saat ini juga berkaitan dengan persoalan tata kelola pemerintahan di level pemerintah daerah (pemda). "Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mendampingi pemda guna meningkatkan kapasitas pemda," ucapnya.

Penanganan krisis kesehatan di Kabupaten Asmat tidak bisa hanya berhenti pada pengobatan, tetapi perlu upaya jangka panjang untuk mengubah pola hidup dan kebersihan lingkungan. Belum diterapkannya pola hidup sehat serta lingkungan yang kotor berpotensi memicu berbagai penyakit.

Kondisi itu, di antaranya, bisa ditemui di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat. Dari pantauan Kompas, Senin, ada lokasi permukiman kumuh di sekitar Pasar Dolok. Di sana, anak-anak mandi dan bermain di sungai yang kotor. Sebagian tubuh mereka terkena gatal-gatal. Area bermain di kampung selama ini terbatas. Sebab, daratan kampung itu didominasi lumpur.

Tampak juga anak-anak makan nasi bungkus di pinggir jalan tepat di samping tong sampah. Nasi bungkus itu langsung diletakkan di papan di pinggir jalan tanpa alas piring.

Di salah satu sudut Agats, anak-anak bermain di tempat sampah. Mereka mencari sampah yang bisa dijadikan mainan. Ada juga anak yang berbaring di jalan tanpa memakai baju. Adapun para ibu memandikan anak di ruang tamu.

Pola hidup yang tidak sehat juga terlihat pada orangtua pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Agats. Orangtua pasien merokok sambil menggendong anaknya di teras rumah sakit. Anak-anak bebas mengonsumsi mi instan yang diberikan orangtuanya. Tak hanya pola hidup, lingkungan masyarakat pun kumuh. Sampah berserakan di sekitar permukiman. Bahkan ada warga yang membuang sampah di halaman rumah.

## Ditangani menyeluruh

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, persoalan KLB campak dan gizi buruk di Asmat tidak bisa diselesaikan hanya

melalui pendekatan kesehatan. Sebab, persoalan kesehatan yang muncul itu terkait dengan kondisi lingkungan dan tata ruang di wilayah tersebut.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, untuk menangani kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Papua dibutuhkan solusi terpadu dan menyeluruh yang meliputi masalah kesehatan dan lingkungan, ketersediaan bahan pangan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.

Uskup Keuskupan Asmat Mgr Aloysius Murwito saat berkunjung ke Redaksi Kompas, Senin, mengatakan, bencana kemanusiaan di Papua perlu ditangani dalam jangka panjang. Ketika masa tanggap darurat usai, pemerintah tetap harus memperhatikan kondisi mereka.

Hal yang tak bisa diselesaikan dalam jangka menengah dan panjang adalah menanamkan cara hidup sehat. Setelah itu, diperlukan pembangunan infrastruktur dan jaringan komunikasi. "Di sana, ketersediaan air bersih minim. Air sumur berwarna abu-abu. Jaringan telepon pun susah," katanya.

Mgr Aloysius didampingi para pengurus Yayasan Widya Cahaya Nusantara, sebuah yayasan yang membantu warga Papua. Rombongan diterima Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo. (Diolah dari berbagai Sumber)

## Tjahjo Batalkan Permendagri soal Aturan Penelitian

JAKARTA - Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) akhirnya dibatalkan usai menuai polemik di kalangan akademisi.

Permendagri itu sendiri awalnya untuk menggantikan aturan yang telah ada sebelumnya, yaitu Permendagri No 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri No 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

"Dengan berbagai pertimbangan saya sebagai Mendagri membatalkan Permendagri tersebut," ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Dengan dibatalkannya permendagri tersebut, maka otomatis aturan mengenai aturan soal penerbitan SKP kembali ke permendagri yang lama.

Untuk perbaikan, Kementerian Dalam Negeri rencananya akan meminta masukan terlebih dulu dari para akademisi dan peneliti serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui focus group

discussion (FGD). "Menyerap aspirasi kalangan akademisi, lembaga penelitian dan DPR," kata Tjahjo.

Permendagri tersebut awalnya dikeluarkan untuk mengatur rencana pelaksanaan penelitian di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan diterbitkan SKP itu sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian. Akan tetapi, tak dijelaskan lebih lanjut soal ukuran dampak negatif tersebut. Hal inilah yang memicu penolakan publik.

### Klaim Mudahkan Peneliti

Sementara itu Soedarmo mengklaim Permendagri yang dibatalkan itu justru dibuat dengan tujuan memudahkan para peneliti tanpa maksud mengekang ruang gerak.

Soedarmo mengatakan pihaknya menilai Permendagri No 64 Tahun 2011 dan Permendagri No 7 Tahun 2014 yang

sebelumnya dipakai dinilai mempersulit seorang peneliti melakukan penelitian. "(Permendagri terbaru) lebih simpel. Simplifikasi banyak yang kita berikan. Kita memberikan pelayanan yang terbaik, yang tercepat bagi peneliti itu sendiri," ucapnya.

Pada permendagri terbaru, jelas Soedarmo, seseorang hanya perlu mengajukan permohonan penerbitan SKP kepada Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota apabila cakupan tema penelitiannya sebatas kabupaten/kota. Tidak perlu mengajukan permohonan ke Kemendagri di Jakarta.

Permendagri terbaru juga tidak berlaku bagi mahasiswa atau pelajar yang melakukan penelitian tugas akhir seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Pula, tidak berlaku bagi instansi pemerintah yang sumber dana penelitiannya berasal dari APBN/APBD. Pengajuan permohonan itu pun, kata Soedarmo, sepenuhnya dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga izin penelitian lebih cepat diproses. (Diolah dari berbagai sumber)

# Mencari Alternatif Pj Gubernur

JAKARTA - Wacana mengganti gubernur yang kembali maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan perwira polisi belum menemui titik terang. Presiden Joko Widodo belum juga mengambil keputusan meski masalah ini relatif mendesak untuk ia selesaikan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memahami munculnya pro kontra terhadap rencana penempatan perwira tinggi polisi menjadi Penjabat Gubernur. Ia mengatakan Pilkada serentak tahun ini memang berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya. "Hal itu dikarenakan aroma pilkada 2018 sudah berbau Pemilihan Presiden (Pilpres)," ujarnya.

Pilkada tahun ini sekaligus menjadi ajang pemanasan semua partai, menjelang pesta demokrasi yang lebih besar. Karena itu sangat wajar, jika banyak respon beragam terhadap suatu isu yang berkembang. Namun Mendagri menegaskan dalam bekerja ia selalu menelaah setiap keputusan yang diambil dari sisi payung hukum dan regulasi. "Jika memang langkah yang diambilnya itu dipandang kontraproduktif, ia siap bertanggungjawab jawab dan siap salah," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan dua alasan mengapa ia mengusulkan hal ini. Pertama, dengan polisi menjadi gubernur sementara—istilah Undang-undangnya penjabat (pj) gubernur, maka keamanan dan netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) bisa dimaksimalkan. Alasan kedua adalah tidak cukupnya stok pejabat eselon I di Kemendagri.

Dalam Pasal 201 ayat (10) UU No 10 Tahun 2016, disebutkan, "untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Sementara dalam Permendagri No 1 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 2: "penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi."

Apa yang dimaksud "pejabat tinggi madya" berdasarkan Pasal 131 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah mereka yang tergolong ke eselon IA dan eselon I B. Di Kemendagri, mereka yang masuk dalam kategori itu ada 16 orang, akan tetapi lima di antaranya masih berstatus belum tetap, atau pelaksana tugas (plt).

orang eselon I Kemendagri minus yang masih berstatus plt, maka memang betul roda organisasi mereka akan terganggu. Sulit membayangkan sebuah kementerian bisa berjalan tanpa ada satu pun pejabat eselon satu di dalamnya.

Namun, defisit eselon I tidak serta merta bisa jadi pembenaran



Menurut Tjahjo, eselon I yang masih berstatus plt tidak bisa ditunjuk menjadi pj gubernur. Ia juga enggan menugaskan semua eselon I di Kemendagri menjadi pj. "Kalau semua dilepas, kosong Kemendagri," kata Tjahjo, Kamis (25/1) lalu.

## Alternatif yang tidak bikin gaduh

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Arief M Edie, pekan lalu, ada sembilan daerah yang membutuhkan pj gubernur dan dua wilayah pjs (penjabat sementara). Jika seluruh daerah yang membutuhkan pj/pjs diisi oleh orang-

sapaan Baidowi kepada Tirto.

Ia menampik kekhawatiran kalau pejabat eselon I non-Kemendagri tidak mampu mengemban tugas sebagai pj gubernur. Sebab, katanya, jabatan tersebut lebih membutuhkan mereka yang cakap kemampuan manajerialnya, terlepas dari apa latar belakang disiplin ilmu masing-masing.

"Kalau pendekatannya disiplin ilmu pemerintahan, maka kepala daerah [sekarang] banyak yang tidak sesuai," ujarnya.

Menurutnya, menunjuk pejabat eselon I dari dari luar Kemendagri lebih baik ketimbang menempatkan polisi, bahkan TNI sekali pun. Karena menurutnya jika sampai polisi atau TNI yang jadi pj gubernur, justru potensi gaduh di wilayah tersebut akan semakin tinggi.

Terlebih kalau ternyata di tempat itu ada calon gubernur/wakil gubernur yang berasal dari TNI-polri. Kecurigaan adanya penyalahgunaan wewenang justru semakin kental. Dan memang demikian. Asisten Operasi Kapolri, Irjen Pol M. Iriawan disebut bakal menjadi pj Gubernur Jawa Barat, mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad Heryawan mulai 13 Juni 2018. Sementara di sana, salah satu kandidat yang maju adalah mantan Kapolda Jabar, Anton Charliyan.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf punya pandangan yang sedikit berbeda. Meski setuju dengan solusi menempatkan pejabat eselon I sebagai pj gubernur, akan tetapi menurutnya posisi tersebut baiknya diisi pejabat wilayah terkait.

"Bisa diambil bukan hanya dari kementerian saja, tapi juga bisa dari Sekda (Sekretaris Daerah) misalnya. Sekda kan juga eselon I B, bisa dijadikan pj/pjs," ujar Asep kepada Tirto.

Mengenai kecurigaan Kemendagri soal Sekda yang bakal berpihak pada petahana, Asep mengatakan bahwa itu tidak beralasan. Menurutnya jika yang jadi pertimbangan adalah karena faktor kecurigaan, maka sebetulnya penunjukan polri/TNI pun bisa dicurigai.

"Sekarang saya balik tanya, apa benar dari polisi tak ada keberpihakan? Jaminannya apa?" tanya Asep, retorik. "Hemat saya, lagi-lagi itu bergantung pada pengawasan," katanya.

Pilkada tahun lalu, sebenarnya, Tjahjo melakukan langkah yang sama, ketika menempatkan Irjen Polisi Carlo Tewu, sebagai Penjabat Gubernur di Sulawesi Barat. Ketika itu, tidak satu pun protes muncul. Berbeda dengan sekarang, usulan pengangkatan pj gubernur dari Polri menuai banyak kritik.

Ia minta wartawan meremfresh ingatannya, kembali membuka file berita tahun lalu, ketika dirinya juga mengangkat Irjen Carlo Tewu sebagai penjabat. Carlo Tewu, ketika jadi penjabat juga adalah perwira tinggi aktif di kepolisian. Tentang ini, Tjahjo menjelaskan berulang kali dalam beberapa kesempatan. Menurutnya hal tersebut bukan keputusan sepihak dari dirinya atau Kemendagri. Pertimbangannya pun jelas, agar pilkada berjalan aman dan damai. (TIRTO.ID/MSR)

untuk menarik polisi aktif jadi pj gubernur. Selain karena melanggar Pasal 28 ayat (3) UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang melarang polisi aktif berpolitik, sebetulnya ada opsi lain yang sangat mungkin bisa diambil tanpa perlu melanggar aturan apapun, dengan merekrut pejabat eselon I dari kementerian lain.

Berdasarkan riset Tirto, hingga Januari 2018 ada 481 pejabat eselon I dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Jumlah yang jauh lebih besar ketimbang yang dibutuhkan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, mengatakan, hal tersebut dimungkinkan. "Tidak semuanya (pj atau pjs) bisa diambil dari eselon I Kemendagri," ujar Awiek,

# SI PENGKRITIK YANG DISUKAI PEMERINTAH



**REFLY HARUN,**  
PENELITI DAN PENGAMAT  
HUKUM KETATANEGARAAN

*Mengawali karier sebagai wartawan menjadikan Refly Harun banyak menyumbangkan segala pemikiran dan solusi terkait permasalahan hukum dan ketatanegaraan. Refly yang kini menjadi Komisaris Utama PT Jasa Marga dan Direktur di LSM Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct) itu kepada Media BPP banyak berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya serta pendapatnya terkait putusan MK tentang verifikasi faktual.*

**S**iapa yang tidak kenal dengan sosok Refly Harun, pria kelahiran Palembang 26 Januari pada 48 tahun silam itu kerap muncul di layar TV sebagai pakar ahli ketatanegaraan dalam acara *talkshow* atau berita politik di Indonesia. Bapak dua anak itu memang terkenal cerdas dan ideologis. Banyak tulisan-tulisannya yang dimuat di media massa dan menjadi masukan beberapa permasalahan pemerintah. Ia bahkan pernah menjadi Staf Ahli Kepresidenan.

Bukan tanpa sebab, segala profesi yang berbau sosial politik itu ia jalani. Sejak duduk di bangku S1 dulu di UGM, Refly pernah menjabat sebagai Wakil Pimpinan Redaksi Pers Mahasiswa di Fakultasnya. “Dulu itu saya sebenarnya sekolah SMA jurusan IPA, tapi saya merasa *passion* saya di sosial, jadi saya mencoba mendaftar SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional) di UGM (Universitas Gajah Mada),” terangnya mengawali pembicaraan.

Pilihan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM adalah salah satu pilihan terbaik Refly selagi SMA. Ia yang berasal dari SMAN 5 Palembang itu mendaftar ke 3 perguruan tinggi ternama, pertama Fakultas Hukum UGM, Psikologi Unpad (Universitas Padjajaran), dan Fakultas Hukum Unsri (Universitas Sriwijaya). Tapi karena ingin memutuskan merantau ke Pulau Jawa dan mencoba petualangan baru, Refly yang kala itu masih berusia belasan tahun terbang ke Jogja dan mengenyam pendidikan selama 5 tahun. “Namun karena saya aktif berorganisasi, maka kuliah saya lebih lama dari teman-teman seangkatan saya,”

Di UGM, Refly memang terkenal aktif. Ia bergabung dengan Pers Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya mengantarkan dia menjadi Ketua BEM Fakultas. Selesai kuliah, dan sebelum prosesi wisuda dilaksanakan, Refly sudah terlebih dahulu diterima pekerjaan di SKH (Surat Kabar Harian) Jawa Pos sebagai wartawan di Surabaya. Sebulan di Surabaya, Refly kemudian dipindahtugaskan ke Jakarta. “Di Jakarta itu saya tidak

lama, karena menulis tentang kritik terhadap Peradi yang membuat saya akhirnya dikeluarkan dari Jawa Pos. Redaksi melihat saya terlalu berani mengkritik berita tentang Peradi, padahal kalau dilihat dari tulisan berita sehari-hari, saya termasuk wartawan baru yang paling produktif. Tapi *ya* sudah *lah*, akhirnya saya di Jawa Pos hanya 3 bulan,”

Setelah keluar dari Jawa Pos, Refly ditawarkan oleh Alm. Adnan Buyung Nasution, pengacara kondang. Untuk menjadi asistennya di LBH (Lembaga Bantuan Hukum) miliknya. “Kerja di LBH itu berat, bayarannya suka-suka juga, lagi pula kerjanya tidak jelas, jadilah saya keluar dan mencoba melamar di media kembali,” terangnya.

“**KARENA SAYA MEMANG ORANGNYA SUKA TANTANGAN LEBIH, DAN HARUS BERANI MENGUNGKAPKAN APA YANG MEMANG MENURUT KITA BENAR, DAN APA YANG MEMANG SALAH DAN PERLU DIBENAH**

Refly lantas melamar pada salah satu Group Kompas Gramedia, yakni Tabloid Bola. Ia diterima di Tabloid Raket yang berisikan berita mengenai Olahraga Tenis dan Badminton hingga tabloid itu tutup pada 1998. Tiga tahun di tabloid olahraga, Refly sempat menganggur selama enam bulan. Saat itu krisis moneter merambah kemana-mana, mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, ia terpaksa menganggur dan mencari pekerjaan ke sana kemari. “Tapi selang berapa lama di 1990 saya diterima kembali di Tabloid Realitas (Media Group) pada saat itu tabloid itu juga tidak

berlangsung lama, hanya setahun saya bekerja terus tutup, dan sebagian besar karyawannya dipindahkan ke Koran Media Indonesia. Dan pada tahun 1999 sampai 2003 lah saya bekerja di MI (Media Indonesia) sampai pada tahun 2000 saya jadi asisten redaktur,” paparnya.

Sambil menjadi asisten redaktur di MI yang menurut Refly tidak terlalu menguras waktu seperti saat dirinya menjadi reporter, Refly memutuskan untuk melanjutkan studi S2 nya di UI dengan jurusan yang sama. “Tahun 2002 lulus S2 dari UI, saya memutuskan untuk keluar dari Media Indonesia, karena saya waktu itu mengkritisi kebijakan redaksi, akhirnya saya keluar lah dari MI,” terangnya.

Keluar dari MI pada 2003, Refly lantas mengajukan diri sebagai staf ahli/asisten hakim di MK (Mahkamah Konstitusi) diajak oleh Jimly Assidiqly selama 5 tahun lamanya. “Selama menjadi staf ahli atau asisten hakim di MK, saya mendapatkan beasiswa S2 ke Notre Dame University, Amerika Serikat. Jadi saya sekarang ini *double degree* untuk gelar S2,” terangnya.

Sejujurnya, di awal-awal bekerja di MK, Refly merasa nyaman, namun belakangan dia merasa tidak nyaman dengan sistem kerja *office hour* dan birokrat terus menerus yang dianggapnya begitu kaku dan tidak fleksibel seperti di Media. Pada 2008 Refly akhirnya keluar dari MK dan bergabung dengan Centre of Electoral Reform (CETRO) sebagai peneliti. Di Cetro ia malah sering dipanggil oleh MK (tempat kantornya sebelumnya) untuk menjadi narasumber atau *judicial review*.

Namun karena waktu itu Direktur Cetro diminta menjadi ketua KPU pada 2012, akhirnya Cetro bubar. “Kita lantas mendirikan lembaga lagi bernama Correct (Constitutional & Electoral Reform Centre) yang juga sebenarnya adalah nama baru Cetro. Correct didirikan oleh Dirut Cetro yang lama, namanya Bang Hadar. Setelah Bang Badar selesai menjalankan tugas sebagai Ketua KPU. Di Correct saya

menjadi peneliti senior hingga sekarang saya menjadi Direktur Eksekutif,” ceritanya.

Selama aktif di Correct, Refly juga sembari mengajar UGM dan melanjutkan jenjang S3 nya di Universitas Andalas, Padang. Saat ini dia menjabat sebagai dosen tetap di Universitas Tarumanegara, dan dosen tidak tetap UGM serta menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Jasa Marga (Persero). “Jadi ceritanya saya waktu itu sering diundang Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri untuk dimintai pendapat dan arahan terkait hukum. Sebenarnya saya bukan prioritas pertama saat ditawarkan menjadi Komisaris Utama PT. Jasa Marga, tapi prioritas ketiga. Namun karena kedua teman saya begitu sibuk, mereka menolak. Akhirnya saya lah yang terpilih,” jelasnya.

### Penyederhanaan Parpol

Meski begitu, nama Refly Harun kerap muncul di layar TV membahas beragam persoalan bangsa. Seperti masalah Putusan MK soal verifikasi faktual parpol kemarin. Menurut Refly, putusan MK merupakan perintah yang terang-benderang, yang tidak boleh ditafsirkan lagi. “Namun sayangnya putusan MK terkait verifikasi faktual tersebut sering dicari lubang tikusnya untuk tidak dilaksanakan,” jelasnya.

Menurutnya, sebenarnya putusan MK itu tinggal dilaksanakan dengan konsekuensi-konsekuensi penyesuaian jadwal. “Verifikasi itu tidak pula harus diikuti dengan perubahan aturan, baik revisi undang-undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Putusan MK itu ialah dasar hukum yang tingkatannya sama dengan undang-undang,” bebarnya.

Bapak dua anak ini banyak menukilkan ide dan gagasan terkait masalah pemilu di media. Ia menyarankan, seharusnya sistem pendaftaran KPU menerapkan beberapa standar prosedur UU Pemilu. “Seandainya aturan yang dibuat itu menyatakan bahwa parpol yang lolos *parliamentary threshold (PT)* dalam Pemilu 2019 otomatis menjadi peserta pemilu ber-



kutnya, aturan itu dapat dikatakan rasional dan konstitusional. Semua peserta memiliki kesempatan yang sama karena hasil pemilu belum diketahui (*unpredictable in result*). Dalam konteks seperti inilah, ke depan saya mengusulkan tidak perlu lagi dilakukan verifikasi faktual, yang jelas-jelas menguras banyak biaya dan tenaga,” kata Refly.

Padahal, menurut Refly belum tentu parpol yang lulus verifikasi itu benar-benar mengakar di masyarakat. Penentuan peserta pemilu lebih baik ditentukan dari hasil pemilu itu sendiri, dengan cara undang-undang harus mengatur parpol yang lolos PT pada pemilu terdekat otomatis dapat mengikuti pemilu berikutnya. “Parpol yang tidak lolos PT tetap dapat mengikuti pemilu berikutnya, tetapi terbatas untuk pemilu tingkat lokal (pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota). Demikian pula parpol-parpol baru, terlebih dulu harus mengikuti pemilihan ting-

kat lokal, tidak boleh begitu saja ikut pemilu nasional,” jelasnya

Bila parpol-parpol itu dapat memperoleh kursi di lebih dari setengah jumlah DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota (minimal satu kursi di masing-masing DPRD dimaksud), parpol tersebut dapat mengikuti pemilu nasional lagi (pemilihan anggota DPR).

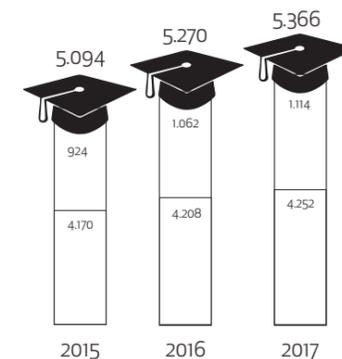
Dengan cara yang demikian, secara alamiah akan terjadi pembatasan jumlah parpol di tingkat nasional,” imbuhnya menjelaskan masukan.

Saat *Tim Media BPP* bertanya, mengapa dirinya lebih memilih jalur sebagai orang yang cenderung dikatakan ‘pemberontakan’ dan kerap berpindah-pindah kerjaan. Refly menjawab. “Karena saya memang orangnya suka tantangan lebih, dan harus berani mengungkapkan apa yang memang menurut kita benar, dan apa yang memang salah dan perlu dibenahi,” tutupnya. (IFR)

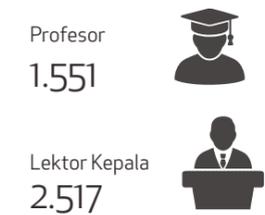
## Professor Minim Karya Ilmiah

Menjadi guru besar merupakan idaman banyak dosen. Namun, setelah gelar profesor melekat di depan nama mereka, tugas utama, yakni riset dan publikasi ilmiah, terlupakan.

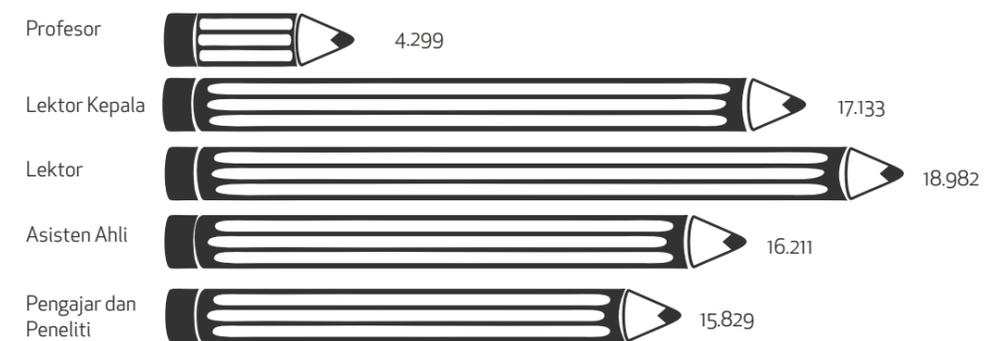
### Posisi Guru Besar



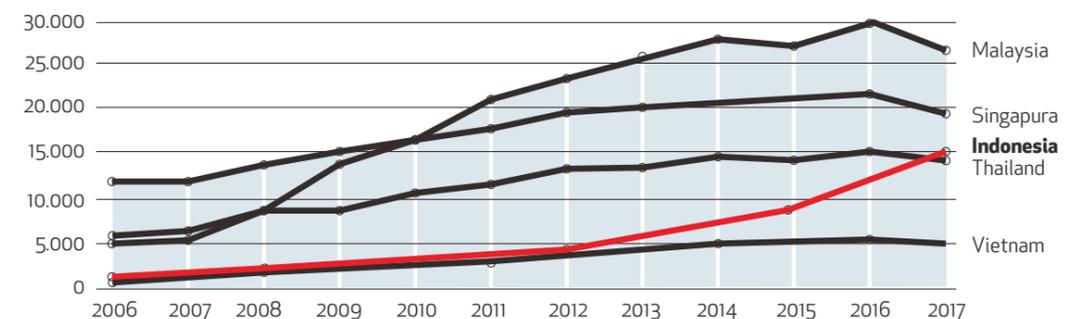
### Lolos Publikasi Peraturan Menteri No 20/2017



### Terdaftar di Jural Nasional Terindeks Sinta (Science and Technology Index)



### Tren Publikasi Internasional 2016-2017



# PENJELASAN ILMIAH MENGAPA FIRASAT dan Deja vu SERING TERJADI

Ortak manusia memiliki semacam *wireless fidelity* atau Wi-fi, yang mengumpulkan informasi tentang orang lain. Ini kemudian melahirkan intuisi atau firasat. Beberapa penelitian telah mengungkap bahwa kita dapat terhubung dengan pikiran orang lain saat berbin-cang. Otak memiliki peran penting dalam hal ini.

Profesor Digby Tatum, ahli psikoterapis klinis di University of Sheffield, melakukan penelitian tentang kerja otak dan bagaimana orang berkomunikasi.

Tatum mengatakan, otak manusia memiliki semacam *wireless fidelity*

peran dalam komunikasi. Misalnya saja, seorang pemain poker profesional. Ia mampu menangkap “pesan” dari lawannya hanya dengan melihat gerakan kecil atau tanda-tanda visual lainnya.

Menurutnya, manusia memiliki kemampuan menangkap pesan di alam bawah sadar. Hal tersebut ditulis Tatum dalam bukunya berjudul *The Interbrain* yang diterbitkan oleh Jessica Kingsley Publisher.

“Kita dapat mengetahui secara langsung tentang emosi orang lain dan apa yang mereka perhatikan. Hal ini didasarkan pada hubungan langsung antara otak kita dan orang lain. Saya menyebutnya *interbrain*,” kata Tatum

eo. Ini justru akan mengganggu proses koneksi antar otak dan itu berbahaya.

“Perasaan emosional akan menular secepat kecepatan cahaya, bukan kecepatan transmisi elektronik. Tatap muka secara visual akan disertai faktor suara, isyarat, bau keringat, sentuhan, dan koneksi,” ujarnya.

## Mengapa Manusia Mengalami Deja vu?

Selain itu, menurut How Stuff Works, seorang peneliti dari Amerika, terkadang manusia bisa saja mengalami *Deja vu*, bahkan ia menyebutkan, 70 persen populasi manusia pernah mengalami *deja vu*. Yang paling sering

merasakannya adalah orang-orang berusia 15-25 tahun. *Deja vu* sering kali disebut bagi Anda yang berada dalam situasi atau lingkungan yang sama sekali baru, tetapi rasanya pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Hal ini disebut dengan *deja vu*, yang dalam bahasa Perancis berarti “sudah terlihat”.

Meski umum, *deja vu* sangat sulit dijelaskan dan dipelajari karena pengalaman tersebut sulit untuk ditiru di laboratorium. Para peneliti hanya dapat memberikan teori mengenainya.

Pada 2006, para ilmuwan di Leeds

Memory Group berpikir bahwa mereka berhasil menciptakan sensasi serupa di laboratorium. Mereka menggunakan hipnosis untuk memicu bagian dari proses pengenalan otak. Penelitian ini berdasarkan pada teori bahwa dua proses kunci terjadi di otak saat kita mengenali sesuatu atau seseorang yang *familiar*. Awalnya otak akan mencari tahu ingatan kita untuk melihat apakah pernah merasakan sebuah kejadian, kemudian jika menemukan yang sesuai, sebuah area terpisah dari otak mengidentifikasinya sebagai sesuatu yang *familiar*.

Dalam *deja vu*, bagian kedua dari proses ini bisa dipicu secara tak sengaja. Untuk mengetahui hal ini, para peneliti merekrut 18 peserta untuk melihat 24 kata umum. Lalu, mereka dihipnosis untuk menganggap bahwa kata-kata yang berada dalam bingkai merah familiar, dan kata-kata dalam bingkai hijau tak ada dalam daftar asli.

Setelah keluar dari hipnosis, para peserta diberi rangkaian kata dalam bingkai warna berbeda, termasuk yang tidak ada dalam daftar asli. Dari semua peserta, 10 orang berkata bahwa mereka merasakan sensasi aneh saat melihat kata baru dalam bingkai merah. Lima orang di antaranya bahkan menyebut perasaan itu seperti *deja vu*.

Selain penjelasan di atas, para ilmuwan juga pernah menjelaskan bahwa *deja vu* adalah semacam gangguan sirkuit jangka panjang dan jangka pendek di otak. Artinya informasi baru dapat mengambil jalan pintas langsung ke ingatan jangka panjang.

Dengan kata lain, ini melompati mekanisme yang biasanya digunakan otak untuk menyimpan informasi. Jadi, rasanya kita mengalami sesuatu dari masa lalu.

*Deja vu* juga bisa dikaitkan dengan korteks rhinal, yaitu area otak yang membuat kita merasa akrab. Sayangnya, belum diketahui bagaimana meng-



aktifkan area ini tanpa memicu area lain terkait memori. Itulah mengapa sangat sulit untuk menentukan apa yang terasa akrab dengan *deja vu*. Sebab, rasa akrab itu biasanya samar, tidak spesifik pada obyek atau orang.

Teori lain dari *deja vu* adalah bahwa perasaan ini diawali oleh kenangan palsu. Valerie F Reyna, seorang psikolog terkemuka tentang kenangan palsu mengatakan pendapatnya. “(*Deja vu*) pasti terkait dengan dengan memori palsu dalam arti bahwa ini adalah jenis disosiasi memori, yang membedakan realitas dari ingatan Anda,” ungkap Reyna dikutip dari Science Alert

“Ada berbagai macam pengalaman disasosiatif yang bisa terjadi. Terkadang Anda tidak dapat memastikannya, misalnya apakah Anda memimpikan sesuatu atau mengalaminya, apakah Anda melihatnya di film atau terjadi dalam kehidupan nyata,” imbuhnya.

Namun sayangnya, penelitian terbaru tentang *deja vu* yang dilakukan oleh Akira O’Connor mengungkapkan hal baru. O’Connor menyebut bahwa kenangan palsu mungkin tidak dapat disalahkan. Sebagai gantinya, bisa jadi itu adalah tanda otak sedang me-

eriksa memori.

Untuk mengetahui hal itu, O’Connor mengamati otak dari 21 peserta. Para peserta diminta melakukan serangkaian tes umum untuk memicu kenangan palsu. Para peneliti memberi peserta daftar kata-kata terkait, seperti kasur, malam, tidur sebentar, dan tidur siang. Ketika para peserta ditanya tentang kata sesudahnya, mereka cenderung memberi kata-kata yang terkait dengan apa yang pernah mereka dengar, dalam hal ini tidur.

Untuk mencoba menciptakan perasaan *deja vu*, para peneliti bertanya pada peserta apakah mereka mengetahui kata yang diawali huruf t. Para peserta menjawab tidak tahu. Namun ketika para peneliti bertanya tentang kata tidur, peserta ingat bahwa mereka mungkin pernah mendengarnya, tapi rasanya sama semua.

Dalam penelitian ini, tim berharap melihat area otak terkait dengan memori (hippocampus) menyala. Sayangnya, itu tidak terjadi.

Para peneliti justru menemukan bahwa area yang terlibat dalam pengambilan keputusan aktif. Oleh karena itu, O’Connor berpikir bahwa daerah frontal otak bisa membalik-balik ingatan kita. Area tersebut mengirimkan sinyal jika ada ketidakcocokan antara apa yang kita pikir telah dialami dengan apa yang sebenarnya.

Temuan ini kemudian dipresentasikan dalam Konferensi Memori Internasional di Budapest. “Daerah otak yang terkait dengan konflik memori, bukan memori palsu, tampaknya mendorong pengalaman *deja vu*,” tulis O’Connor.

“Ini sesuai dengan gagasan kami tentang *deja vu*. Karena kesadaran akan ketidaksesuaian pada sinyal memori telah diperbaiki, *deja vu* menurun seiring bertambahnya usia. Padahal, kesalahan memori cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Jika ini bukan kesalahan, tapi pencegahan kesalahan, ini masuk akal,” sambungnya. (IFR/National Geographic)

## KULIT WAJAH TETAP KINCLONG SETELAH USIA 30 TAHUN

**MEMASUKI** usia 30 tahun, kulit tentu akan mengalami banyak perubahan. Seperti hiperpigmentasi, kerutan, pemecahan kolagen atau terjadi penurunan elastisitas kulit, dan masalah kulit lain yang berubah secara drastis.

Meski begitu, untuk menjaga penampilan kita bisa mengatasi tanda-tanda penuaan dan membantu kulit menua secara anggun. Solusi yang bisa dilakukan yakni melakukan perawatan rutin. Jika usia kita masih berada di akhir 20-an, kita juga bisa merawatnya sejak dini agar saat masuk ke usia 30 tahun kulit masih terlihat awet muda.

Ada perawatan yang bisa kita lakukan secara rutin untuk mencegah penuaan dini dan mencegah masalah kulit terkait usia yang bisa merusak kecantikan alami kulit. Berikut perawatan rutin yang wajib kita lakukan agar kulit tetap cantik meski sudah masuk ke usia 30 tahun.

### **Krim mata**

Kulit di sekitar mata sangat sensitif sehingga lebih mudah mengalami kerusakan. Area mata juga lebih cepat menua daripada kulit yang lain. Itulah mengapa sangat penting untuk memperlakukannya. Mulailah merawat kulit di sekitar mata kita dengan krim mata untuk memastikannya tetap lembab dan terhidrasi dengan baik setiap saat.

### **Facial mist**

Perawatan lain yakni menggunakan facial mist. Seiring bertambahnya usia, kulit cenderung kehilangan cahaya alami. Untuk mencegah hal tersebut kita harus mulai dengan menggunakan facial mist untuk meremajakan dan merevitalisasi kulit. Facial mist bisa membuat kulit lembab dan bercahaya.

### **Scrub wajah**

Bukan rahasia lagi jika pengelupasan kulit sangat penting untuk menghilangkan sel kulit mati. Setelah usia tertentu, hal ini m e n j a d i

suatu keharusan untuk menghilangkan sel kulit mati dan kotoran dari pori-pori kulit yang bisa menyebabkan jerawat. Gunakan scrub wajah dengan lembut sekali atau dua kali dalam seminggu untuk mencegah jerawat.

### **Serum vitamin C**

Vitamin C merupakan antioksidan ampuh yang bisa meningkatkan produksi kolagen di kulit kita dan juga meningkatkan elastisitas keseluruhannya. Serum vitamin C merupakan cara terbaik untuk melawan tanda-tanda penuaan. Ini juga bisa membantu kulit menjadi kencang dan cerah. Cukup masukan serum ini ke dalam rutinitas perawatan kecantikan kita.

### **Face oil**

Sifat ini memungkinkan wajah untuk melawan tanda penuaan dini karena bisa mencegah kulit kusam dan kelelahan. Masukkan minyak wajah bagi kita yang memiliki kulit kering sebagai rutinitas kecantikan agar kulit tetap segar dan awet muda.

### **Krim anti-aging**

Produk perawatan ini merupakan nilai investasi. Sebagian besar krim ini dikemas dengan antioksidan kuat yang bisa melindungi kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Gunakan krim ini untuk menangkal tanda penuaan dini.

### **Masker wajah**

Banyak masker yang diformulasikan untuk kulit yang mengalami penuaan dini. Gunakan masker yang bisa meningkatkan kolagen dan keriput minimal seminggu sekali untuk memastikan kulit terlihat sempurna.

### **Tabir surya**

Ini wajib digunakan saat beraktivitas di luar ruangan. Penyebab paparan sinar matahari akan terlihat saat kita memasuki usia 30-40 tahun. Jadi sebelum memasuki usia 30 tahun, cobalah lindungi kulit dari sinar UV yang berbahaya dengan tabir surya. (IFR/Tabloid Nova)



## CARA MUDAH HILANGKAN BINTIK HITAM DENGAN KULIT JERUK

**BINTIK** hitam di wajah yang sulit hilang pasti membuat kebanyakan kaum hawa jengkel bukan. Dengan hadirnya 'tamu' yang tak diundang ini, tentu membuat penampilan sedikit terganggu. Namun jangan khawatir, ternyata ada cara mudah dan praktis agar kulit kembali bersih.

Bintik hitam ternyata dapat hilang dengan perawatan dari kulit jeruk? Yaps! Kandungan vitamin C dalam buah jeruk tidak hanya terkandung pada daging buahnya saja. Vitamin C juga terkandung dalam kulit buah jeruk dapat berperan mencerahkan kulit dan menyamarkan bintik hitam yang membandel serta mengangkat sel kulit yang mati. Wah, ternyata banyak ya manfaat dari si kecil mungil oranye yang selama ini sering kita buang!

Kulit jeruk bisa diolah menjadi masker dengan dengan campuran bahan alami agar hasil lebih maksimal. Seperti apa racikannya? Yuk simak tips di bawah ini:

### **Bubuk kulit jeruk dan minyak almond**

Anda bisa campurkan 1 sendok makan minyak almond dengan 1/2 sendok teh bubuk kulit jeruk. Setelah tercampur oleskan di seluruh wajah dan tinggalkan selama 5-10 menit. Bilaslah dengan

air hangat setelahnya. Perawatan ini bisa diaplikasikan secara mingguan untuk mendapatkan kulit yang cerah.

### **Bubuk kulit jeruk dan lidah buaya**

Buat campuran 1/2 sendok teh bubuk kulit jeruk dan 1 sendok makan gel lidah buaya. Oleskan campuran tersebut pada kulit dan diamkan 10-15 menit. Untuk membilasnya gunakan air hangat. Gunakan masker ini seminggu sekali untuk mencapai kulit yang cerah.

### **Bubuk kunyit jeruk, bubuk kunyit, dan minyak kelapa**

Masukkan 1/2 sendok teh bubuk kulit jeruk, sejumput bubuk kunyit, dan 1 sendok makan minyak kelapa dalam mangkuk dan aduk menjadi pasta. Basahi kulit wajah dan biarkan selama 10 menit. Kemudian bilas dengan air hangat. Untuk mendapatkan kulit terbaik gunakan perawatan ini dua bulan sekali.

### **Bubuk kulit jeruk dan putih telur**

Pisahkan putih telur dan tambahkan 1 sendok teh bubuk kulit jeruk ke dalamnya. Setelah diaduk oleskan pada wajah dan diamkan selama 10-15 menit. Bilas dengan air hangat setelah kering. Perawatan sebulan sekali ini bisa memanjakan kulit Anda dan membuatnya cerah dan segar.

### **Bubuk kulit jeruk dan minyak zaitun**

Taruh 1/2 sendok teh bubuk kulit jeruk dan 2 sendok teh minyak zaitun. Kemudian aduk hingga menjadi pasta. Oleskan ke wajah dan pijat sebentar. Diamkan selama 10 menit dan cuci dengan pembersih ringan dan air hangat. Aplikasikan masker ini secara mingguan untuk memudahkan bintik gelap pada wajah. (IFT/Tabloid Nova)



# MELIHAT KEMBALI HAK-HAK ASASI PEREMPUAN DALAM ISLAM

**P**EREMPUAN sering dijadikan warga kelas kedua di ranah sosial masyarakat. Keberadaan perempuan juga kerap tidak dihargai karena fisiknya yang dianggap tidak lebih kuat dari laki-laki. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pandangan-pandangan dan pemahaman yang mengecilkan posisi perempuan di ranah sosial dengan dalih agama yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Fakta-fakta tersebut mencoba didobrak oleh Neng Dara Affiah dalam bukunya ini. Ia mencoba memunculkan akar ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan selama ini, yang diperkokoh dengan tafsir-tafsir dan kitab-kitab karangan ulama klasik zaman dulu. Kitab-kitab tersebut selama ini telah mengakar dan otoritatif di masyarakat muslim Nusantara serta dianggap tidak ada kesalahan bahkan anti kritik.

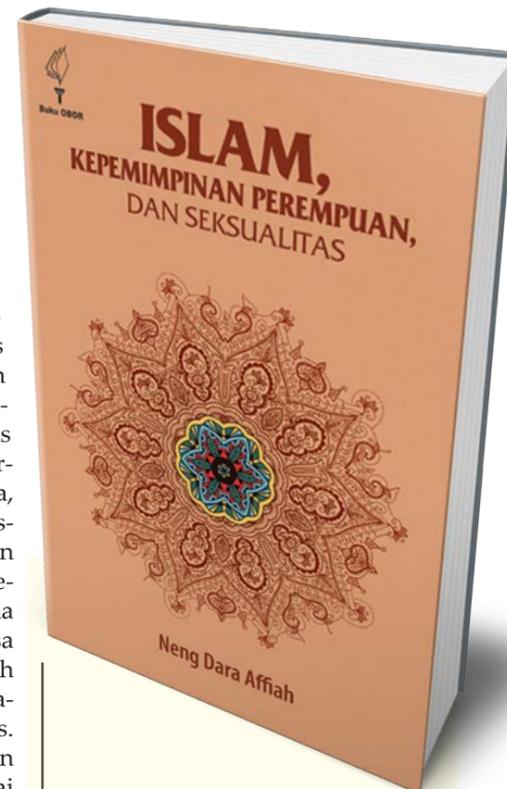
Buku yang ditulis Neng ini sedikit demi sedikit menggeser ruang pikir kitab-kitab kuning yang bagi masyarakat muslim Indonesia sudah menjadi kitab suci kedua. Kitab-kitab tersebut selama ini telah mendominasi wacana pemikiran pesantren di seluruh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu perempuan. Kitab-kitab kuning yang memiliki perspektif perempuan lebih banyak ditulis oleh

laki-laki sehingga berpengaruh terhadap cara pandang dalam membaca teks.

Neng dalam buku ini membahas tiga pembahasan utama yaitu Islam dan Kepemimpinan Perempuan, Islam dan Seksualitas Perempuan, serta Perempuan, Islam, dan Negara.

Pada bagian pertama Neng berusaha meletakkan seksualitas perempuan dan Islam dalam konteks kepemimpinan. Ia berusaha membawa seksualitas ke ranah publik, yang sebenarnya saat ini cukup berbahaya, ditengah isu-isu pemurnian Islam, ajaran Islam oleh sebagian kelompok dianggap telah selesai. Beberapa kelompok berusaha mengembalikan Islam ke masa awal keberadaannya, Islam oleh kelompok tersebut bukan dipahami sebagai sebuah konteks. Padahal Islam adalah ajaran yang terus berproses dan sesuai dengan berbagai zaman.

Neng mengangkat tokoh-tokoh perempuan Islam yang mampu mengubah peradaban. Neng tidak hanya memberikan pengetahuan tentang kehebatan perempuan Indonesia, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang kebangsaan, mengungkap sejarah Indonesia yang ternyata tidak hanya diisi oleh laki-laki yang terus memenuhi ruang publik dan buku-buku se-



## Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas

**Penulis** : Neng Dara Affiah

**Penerbit** : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

**Cetak** : 2017

**Tebal** : 200 hlm

**ISBN** : 9786024335557

**Harga** : Rp 80.000

jarah, namun juga menyadarkan pembaca akan adanya peran perempuan-perempuan hebat yang berpikir dan berbuat untuk Indonesia. Tokoh-tokoh perempuan itu tidak hanya berperan dalam kancah sosial politik namun juga dalam hal keagamaan.

Semakin menarik karena dalam bab selanjutnya Neng mengangkat hal sensitif seperti isu poligami dan jilbab, sekian lama perintah tersebut dipahami oleh sebagian orang hanya dari sisi teksnya. Jilbab kian dipolitisasi terutama pada masa pilkada. Kewajibannya diperkuat pula oleh aturan daerah yang mewajibkan perempuan berjilbab. Implementasi kebijakan tersebut berdampak kepada pembatasan, pembedaan, pengurangan, dan pengucilan terhadap kelompok perempuan non muslim. Selain itu, poligami juga dipahami sebagai sebuah ajaran, bukan dipahami sebagai anjuran serta upaya untuk mengatasi beberapa persoalan mendesak seperti penopang ekonomi para janda dan anak yatim yang telah kehilangan suami dan anak mereka pasca Perang Uhud ketika itu, atau pemerataan distribusi ekonomi secara adil.

Neng mencoba menelusuri bagaimana Islam memandang poligami, dengan menelusuri latar sosial tradisi perkawinan Arab pra-Islam yang sedikit banyak berpengaruh pada tradisi perkawinan Islam. Ia mencoba menyelami latar belakang sosial munculnya tradisi poligami dalam Islam yang dimaksudkan untuk memahami teks dengan latar belakang konteks sosial masyarakat islam awal dan implikasi perkawinan poligami terhadap perempuan. Neng menawarkan perspektif baru dalam memahami poligami.

Ia juga menyoroti masalah krusial lainnya yang dialami perempuan. Dalam memahami fungsi dan aturan perkawinan di halaman 40-42, misalnya, menurut Neng, banyak

tafsir agama hanya menempatkan perempuan di ranah domestik, sementara fungsi perkawinan untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian di antara dua orang manusia laki-laki dan perempuan, pada suatu ikrar atau janji suci atas nama Tuhan tidak mendapat porsi yang banyak.

Fakta tersebut rupanya juga tidak hanya dilakukan oleh para agamawan konservatif dari Islam saja, tetapi juga dari agama lain. Dalam ajaran Katolik, misalnya, ada tafsir yang mengatakan, perempuan hanya sebagai pelengkap suami. Perempuan harus menaati suami sebagaimana mematuhi Yesus.

Menurut Neng, pandangan keagamaan di atas memengaruhi kesadaran masyarakat di berbagai belahan dunia tentang keberadaan perempuan. Posisi perempuan hanya direduksi perannya sebagai ibu dan istri, tidak sebagai manusia utuh yang memiliki otonomi atas kemerdekaan dan kebebasan serta peran yang ingin dimainkannya.

Tidak hanya bagaimana agama melihat posisi perempuan, dalam buku ini, Neng juga mengungkapkan kekhawatirannya yang terjadi selama ini akibat meluasnya kasus intoleransi yang disandarkan atas nama agama di masyarakat. Pada Bab 4 tentang Patriarki dan Sektarian di halaman 159-167, Neng melihat perlu pembenahan dalam pengajaran agama dalam komunitas agama yang selama ini cenderung membentuk fanatisme buta kelompok. Ia menawarkan beberapa poin sebagai upaya memperkecil agar isi dakwah tidak bersifat sektarian, memiliki kesetaraan gender, tidak ritualistik, dan memiliki perspektif kesetaraan iman.

Pasalnya, selama ini materi-materi yang disampaikan oleh para da'i atau misionaris hanya mendukung pemahaman suatu pan-

dangan kelompok tertentu saja, tetapi tidak mengimbanginya dengan pandangan kelompok lain. Pada Akhirnya kemudian memunculkan pelbagai prasangka di antara mereka yang pada gilirannya menimbulkan berbagai benturan dan konflik sosial.

Buku Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas dari Neng Dara Affiah merupakan karya yang harus diapresiasi. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan pemahaman Islam yang kontemporer dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Kehadiran Neng sebagai pemikir perempuan dan ulama feminis menjadi penting di tengah kondisi bangsa yang sedang terjankit irasionalisme dalam beragama. Buku ini menuntun kepada kita, beragama harus dialektis, mendengar korban, dan melihat banyak hal dengan kaca mata yang bisa melihat ke hal terkecil.

Di buku yang lain, Neng mencoba membunikan pengalaman-pengalaman korban yang dikemas dalam perspektif hak asasi perempuan, berselancar dalam dunua intelektualisme dan tradisi Islam dari aspek budaya maupun tekstual dengan mengawinkan tradisi akademik dan aktivis, seperti yang ia tulis dari bukunya yang lain berjudul Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia.

Dalam konteks berbangsa, pemikiran yang diberikan oleh Neng harus diberikan ruang yang lebih besar. Neng berhasil menunjukkan bahwa wajah Islam itu multi-dimensional. Dan suara-suara islam itu sangat beragam. Neng menunjukkan wajah Islam progresif. Dan Itu merupakan terbosan menarik, karena Islam seperti yang digambarkan Neng, yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia. ■

Saidi Rifky

# Pers vs Pemerintah

## The Post

**Sutradara:** Steven Spielberg

**Pemain:** Tom Hanks

Meryl Streep

Alison Brie

Sarah Paulson

Bob Odenkirk

**Skenario:** Josh Singer, Elizabeth Hannah

**Produksi:** 20th Century Fox

**Tayang:** 12 Januari 2018 (Amerika)

**Durasi:** 116 menit



FILM bergenre politik memang jarang diproduksi, namun sekali diproduksi cerita yang ditawarkan selalu mengundang decak kagum para penikmatnya. Sebagai contoh, film *JFK* (1991), yang mengulas peristiwa pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat ke-35 Jhon F Kennedy, dan film *The Insider* (1999) yang mengungkap kebobrokan industri tembakau di Amerika. Kini film dengan tema politik yang terinspirasi dari sejarah Amerika Serikat terkait kasus *Pentagon Papers* (1971) kembali diproduksi. Adalah *The Post* film yang menceritakan konflik politis antara pemerintah dengan pers, dan kini tengah menggerakkan publik AS dan sarat akan kontroversi.

Bercerita tentang Katherine Graham (Meryl Streep), *Publisher* perempuan pertama The Washington Post Bersama editornya Ben Bradlee (Tom Hanks) mengangkat kasus *Pentagon Papers*, yaitu dokumen 7 ribu halaman yang mengungkap informasi sensitif dan rahasia tentang keterlibatan

pentagon dalam perang Vietnam yang disembunyikan pemerintah AS pada 1971. Dokumen tersebut mampu membuka semua rahasia Pentagon.

Dokumen-dokumen tersebut mengungkap kebohongan bertahun-tahun Presiden AS sejak akhir Perang Dunia II dimulai dari Harry Truman sampai Richard Nixon, yang menjadi presiden saat berita tersebut mengemuka. Kebohongan tersebut di antaranya pengiriman pasukan AS terus menerus ke Vietnam untuk menutupi kabar kekalahan AS dalam perang tersebut.

Kebenaran kemudian diungkap pertama kali oleh harian New York Times (Times). Yang pada akhirnya Times dibredel oleh pemerintah saat itu. Pengadilan memutuskan Times bersalah karena dianggap telah mengungkap rahasia negara ke publik. Times diadili dan tidak dapat menerbitkan lebih banyak dokumen.

Secara mengejutkan Post kemudian mengambil alih dokumen *pentagon papers* untuk diungkap

ke publik, padahal sudah jelas dilarang pengadilan untuk tidak dipublikasikan. Graham mengambil risiko besar, yang tidak hanya akan berdampak pada bisnis media yang akan ditutup namun juga akan dicap sebagai penghianat negara.

Dalam film ini Steven Spielberg (Sutradara) mengubah pers menjadi sebuah petualangan, dengan pesan-pesan yang sarat makna, tentang kebebasan pers, kebohongan penguasa, dan peran perempuan di ranah publik. Kebebasan pers digambarkan tidak hanya sebagai kebutuhan, hak, dan kewajiban, namun juga merupakan hal yang membahagiakan.

Film ini semakin menarik karena memadukan dua karakter berbeda antara Graham dan Bradlee. Bradlee sebagai sosok yang statis dan tetap mempertahankan tekadnya, kebebasan pers adalah hal yang mutlak. Graham adalah sosok wanita tegas yang berada di tengah pria.

Film mencapai klimaknya ketika Graham merasa bingung tentang masa depan Post yang ia dirikan. Ia berada di antara dua pilihan apakah dokumen akan tetap diterbitkan atau justru mengubur kebohongan pemerintah terhadap rakyat AS. Ia semakin bingung ketika cita-cita-

nya selangkah lagi membuat Washington Post semakin *go public* di pasar saham harus terkubur, jika ia memublikasikan dokumen tersebut. Apalagi setelah penasihatnya memperingatkannya, "itu tidak akan terjadi jika kertas membuat pemerintah marah"

Graham kemudian menunjukkan perannya sebagai sosok wanita yang kuat di antara banyaknya tekanan, terutama ketika ia memutuskan dan mengizinkan dokumen tersebut dipublikasikan di Washington Post. Perseteruan pun terjadi antara para wartawan tersebut dengan pemerintah. Namun para wartawan yang rela mempertaruhkan karier mereka dan kebebasan mengetahui kebenaran membuat mereka berjuang kuat untuk mengungkap kebenaran yang dikubur dalam. Meski pun ia dan Bradlee bisa saja dipenjara karena pelanggaran keamanan nasional. Siapa sangka ia telah mengubah sejarah AS.

Graham sekaligus mengubah wajah Washington Post yang dilihat orang sebagai surat kabar lokal yang tidak ada apa-apanya menjadi surat kabar terkemuka di AS, terutama ketika Post dalam kurun waktu yang sama mengungkap skandal Watergate (1972) yang menumbangkan Presi-

den AS ke-37. Spielberg sangat beruntung dan cerdas dalam memilih pemeran dalam film ini. Sosok Meryl Streep yang banyak memerankan tokoh kehidupan nyata melengkapi peran Bradlee yang diperankan Tom Hanks.

Film *The Post* disebut-sebut sebagai upaya memperbaiki film bertema jurnalistik sebelumnya *All The President's Men* (1976). *The Post* berusaha menampilkan pertarungan besar Washington Post dengan Presiden Richard Nixon. Berbeda dengan *All The President's Men* meski berkisah tentang Washington Post dalam era yang sama, namun lebih kepada ruang berita. *All The President's Men* mengangkat Tim jurnalis investigasi Washington Post Woodward dan Bernstein yang tidak sengaja menurunkan Nixon dari jabatannya, karena pemberitaan skandal Watergate. Dalam film ini Ben Bradlee masih diperankan, namun Katherine Graham sebagai pemilik Washington Post tidak ditampilkan.

Film yang diproduksi oleh 20<sup>th</sup> Century Fox ini pun meraih penghargaan Film Terbaik 2017 dan diprediksi bakal cukup diperhitungkan di ajang Oscar 2018 mendatang. (MSR)

## Dua Orang Laki-Laki di Depan Lukisan Perempuan

Oleh: Hari Taqwan Santoso

**L**UKISAN seorang pelukis berinisial H.K. menjadi pusat perhatian di sebuah pameran karena detilnya yang mengagumkan. Karya pelukis bergaya realis yang identitas aslinya masih disembunyikan itu tampak hidup. Seorang perempuan bangsawan Eropa Timur abad kedelapan belas dengan gaun hijaunya yang berada dalam posisi membelakangi penonton, itulah isi lukisannya. Rambut merah perempuan itu dibiarkan menjuntai ke depan bahu sehingga jika ditelusuri hingga ke ujung, mata penonton akan menumbuk punggung yang terbuka. Sampai di sana hati mereka akan dipaksa untuk berdecak kagum. Punggung mulus perempuan dalam lukisan itu tampak menjadi pusat lukisan.

Sebenarnya, punggung perempuan dalam lukisan itu tidak benar-benar mulus. Ada bercak-bercak merah yang tidak bisa dilihat dari jarak terdekat dari penonton (penonton harus berada di luar garis pembatas yang jaraknya kira-kira satu setengah meter dari lukisan). Jika tidak mendekat, seseorang harus melakukan perbesaran beberapa kali, barulah dia dapat melihat bercak-bercak merah itu.

Bercak itu adalah salah satu banyak detil lukisan khas pelukis H.K. yang, sekali lagi, mengagumkan. Seperti



*make up* yang terlalu tebal pada wajah seorang perempuan. Dari kejauhan barang kali terlihat bagus, tapi tidak demikian jika dilihat dari dekat; sedikit ketidakteraturan di sana-sini akan terlihat. Sisi itulah yang mampu ditampilkan pelukis H.K. dengan sangat bagus.

Di antara penonton yang terpukau, ada seorang lelaki yang tampak sibuk dengan buku saku dan pensilnya. Dia mengamati lukisan itu lekat-lekat, mencatat, mengacungkan jempol ke arah lukisan sambil memicingkan mata, memutar jempol, mencatat lagi, dan seterusnya. Dia benar-benar tertarik dengan lukisan yang satu itu. Diduga kuat, dia sedang menyarikan pesan-pesan tersirat dari dalam lukisan ke dalam buku catatan yang dipegangnya.

Kesan apapun yang tertangkap tidak dia biarkan lolos. Semua dipindahkan ke buku kecil itu.

Seorang lelaki lain baru tiba di depan lukisan itu setelah merasa penasaran pada karya pelukis H.K. yang menjadi buah bibir para pengunjung pameran. Lukisan itu tidak kelihatan dari kejauhan, jadi dia harus menembus padatnya pengunjung untuk benar-benar sampai di depannya. Setibanya di depan lukisan tersebut, lelaki itu juga menikmatinya tapi dengan caranya sendiri. Ketika ia menoleh ke samping,

matanya melihat lelaki pertama yang begitu antusias. Ia tertarik pada tingkah lakunya. Lelaki kedua itu mengamati sebentar sambil tersenyum, sebelum menepuk bahu lelaki pertama. Puk!

“Serius sekali, Mas,” kata lelaki kedua berbasa-basi.

“Ah! Betul. Saya sangat tertarik dengan lukisan ini. Realis. Fantastis.”

“Anda ahli lukisan?”

“Bukan. Saya hanya penikmat. Hobi saja menikmati lukisan dari segala sisi. Oh iya, omong-omong, nama saya Tommy,” kata lelaki pertama sambil mengulurkan tangan kiri.

Lelaki kedua, yang telah menyaksikan Tommy menggunakan tangan kirinya untuk menyatat, menyadari dia kidal. Dengan begitu dia tidak ragu untuk menyambut tangan itu. Hanya saja, karena dia tidak kidal, dan akan aneh menyambut tangan kiri dengan tangan kanan untuk berjabat tangan, dia menyambut tangan kiri Tommy dengan kedua tangannya, “Irawan.”

Sejurus kemudian, Tommy menyadari dirinya telah berbuat keliru karena refleksi. Seharusnya dia tadi mengulurkan tangan kanan, biar pun rasanya aneh. Khawatir Irawan akan menilainya sebagai ketidaksopanan, Tommy pun buru-buru minta maaf.

“Tidak apa-apa,” Irawan menenangkan. “Saya melihat Mas Tommy mengamati lukisan sejak tadi. Sepertinya asyik. Saya juga tahu, Mas Tommy menggunakan tangan kiri untuk menulis.”

Tommy tersenyum sambil berusaha mencari pengalihan. “Bagus ya, lukisannya.”

“Ya. Saya kira juga begitu.” Irawan menanggapi dengan intonasi khusus. Bagaimanapun dia menyembunyikan perasaannya, intonasi itu tetap menguak kenyataan bahwa dia tidak sependapat. Tommy dapat membaca ketidakberesan pada intonasi itu.

“Sepertinya Anda ragu-ragu.”

Irawan mengerutkan keningnya, tapi lalu menanggapi dengan tegas. “Bukan begitu. Lukisan itu bagus. Bagus sekali. Tapi karena saya bukan ahli lukisan, saya khawatir tidak dapat memerikan kata ‘bagus’ untuk lukisan itu dengan tepat.”

Jawaban itu memantik Tommy untuk memamerkan hasil analisis amatirnya. Dia membuka-buka buku catatannya untuk dibaca kembali. Goresan-goresan tinta yang tadi ditorehkan menggunakan tangan kiri itu kini sudah mengering. Tangan kirinya memang mampu memen-

jarakan informasi dalam bentuk tulisan di permukaan kertas dengan baik, dia melakukannya dengan cekatan. Meskipun harga bagi sifat cekatannya adalah bentuk tulisan itu, yang wujudnya seperti cakaran-cakaran ayam, namun karena informasi itu dia buat hanya untuk dibaca sendiri, dan pada kenyataannya dia dapat memahaminya, tidak masalah.

Tommy pun mulai memaparkan apa yang sudah didapatkannya. “Well, pertama, Anda pasti bisa memberikan sebuah jempol untuk detilnya. Sekali lihat, mata biasa yang tidak terlatih akan mengatakan bahwa lukisan itu adalah foto yang dicetak dalam ukuran besar. Tapi jika kita cukup jeli, dalam sekali lihat itu kita akan dapat membedakannya dari foto. Kuncinya adalah pencahayaan dalam lukisan ini yang boleh dibilang cacat, atau sengaja dibuat seperti itu, sehingga citra yang ditampilkan menjadi khas.”

“Wah, Anda bahkan tahu sejauh itu. Saya mulai ragu kalau mas Tommy ini bukan seorang ahli lukisan.”

“Mas Irawan terlalu memuji, tentang itu saya tidak berbohong. Saya benar-benar tidak pernah mengenyam pendidikan apapun dalam bidang seni. Akan tetapi saya juga tidak akan berusaha merahasiakan kenyataan bahwa saya punya minat yang besar terhadap lukisan. Mengamati dan menilai lukisan dari sudut pandang saya sendiri sudah menjadi hobi, kesibukan yang menyenangkan di waktu luang, selagi tidak sedang mengerjakan pekerjaan utama. Karena saya tidak pernah memublikasikan hasilnya, saya jadi merasa tidak perlu menahan diri dalam memuji lukisan-lukisan yang saya sukai dan mengajukan kritik untuk lukisan-lukisan yang tidak saya sukai.”

Irawan mengangguk-angguk. Dia langsung menyadari bahwa orang yang sedang berdiri di depannya itu *extrovert*. Dia sendiri sebaliknya. Bahkan untuk orang yang sudah lama dikenalnya pun, dia jarang membagi cerita tentang dirinya, apalagi untuk orang yang baru dikenalnya.

Irawan lalu memandang perempuan dalam lukisan itu. Seperti Tommy, dia mencoba menangkap kesan yang diberikannya. Matanya menerawang, jauh ke dalam lukisan di depannya sampai seolah-olah tiada beda antara lukisan dengan kenyataan. Dia membayangkan perempuan dalam lukisan itu nyata dan sedang berada di depannya dengan situasi persis seperti yang diceritakan oleh lukisan itu. Irawan pun terpana, dia tenggelam dalam lamunannya.

“Punggung perempuan itu...” gumam Irawan, tanpa sadar dia menyeletuk tentang kesan pertama yang di-

“  
DIA BENAR-BENAR TERTARIK DENGAN LUKISAN YANG SATU ITU. DIDUGA KUAT, DIA SEDANG MENYARIKAN PESAN-PESAN TERSIRAT DARI DALAM LUKISAN KE DALAM BUKU CATATAN YANG DIPEGANGNYA.”

tangkapnya dalam lamunan itu. Ia lalu berpaling pada Tommy. "Mata saya tidak dapat lepas darinya. Apalagi tali-tali yang mengencangkan gaunnya dari belakang lepas dan karena itu gaunnya setengah melorot. Saya rasa, pelukisnya ingin menyampaikan bahwa penonton dapat menyaksikan punggung telanjang seorang perempuan dengan gratis, barangkali. Bagaimana menurut Anda?"

Tommy sempat melihat lawan bicaranya menelan ludah dengan malu-malu, namun pikirannya terlalu fokus untuk menyusun tanggapan berikutnya tentang lukisan itu, dia tidak sempat menafsirkannya.

"Punggung? Betul! Pendapat yang bagus. Saya perlu mencatatnya. Tapi saya menangkap kesan yang lain. Menurut saya, dia tidak sedang memamerkan punggungnya yang terbuka. Kita dapat melihat posisi bahunya yang sedikit miring, tulang punggung perempuan dalam lukisan itu sedikit menukik. Kelihatannya dia sedang berjalan melenggang, atau semacamnya. Ini cocok dengan posisi pinggulnya."

Mendengar lawan bicaranya menyebutkan-nyebut beberapa bagian tubuh perempuan, apalagi bagian-bagian yang mempunyai daya tarik seksual, Irawan menjadi tidak nyaman. Topik seputar fisik perempuan selalu sensitif baginya. Padahal topik itu adalah topik yang tadi diusungnya sendiri, secara tidak sengaja, tentu saja. Matanya melirik kesana-kemari dan dahinya mulai basah. Jantungnya berdebar semakin kencang, dag-dig-dug tak keruan. Suhu tubuhnya meningkat diikuti rembesan keringat lewat setiap inci pori-pori kulitnya.

Sementara Tommy yang memang suka pamer, mempersiapkan tambahan bagi penjelasannya dengan antusias.

"Mulanya, saya mengira bahwa punggung, yang seolah-olah mulus itu, adalah daya tarik utama lukisan ini. Namun setelah memerhatikan lebih jauh, saya kira justru wajahnya lah yang menjadi daya tarik. Kita tahu, posisi tubuh perempuan itu membelakangi penonton dan seolah memamerkan punggungnya. Kita akan tergelitik untuk membuat kesimpulan yang lain jika kita memerhatikan kepalanya. Kepala perempuan itu menoleh, seperti sedang melihat sesuatu di sebelah kiri secara mendadak. Jika kita baca raut mukanya, perempuan itu tidak sedang terkejut, tapi kagum. Dia telah menemukan sesuatu yang selama ini dicari, didambakan untuk waktu yang lama. Lalu, objek apakah itu? Jawabannya dapat diperoleh dengan menelusuri tatapan matanya..."

"Maaf," Irawan menyela lagi. "Bukan maksud saya untuk berbuat tidak sopan, tapi saya harus pergi sekarang. Permissi."

“TOPIK SEPUTAR FISIK PEREMPUAN SELALU SENSITIF BAGINYA. PADAHAL TOPIK ITU ADALAH TOPIK YANG TADI DIUSUNGNYA SENDIRI, SECARA TIDAK SENGAJA, TENTU SAJA. MATANYA MELIRIK KESANA-KEMARI DAN DAHINYA MULAI BASAH.”

Tanpa membiarkan Tommy menyelesaikan uraian, Irawan meninggalkannya sendiri. Apa yang dia tangkap dari lukisan itu benar-benar lain, dan dia tidak terbiasa dengan bagian-bagian tubuh perempuan yang dipamerkan secara terbuka. Bahkan jika bagian tubuh itu hanya lukisan belaka. Selagi mendengarkan Tommy, pikirannya tak bisa fokus. Selagi jantungnya berdebar, ada segumpal daging pada tubuhnya yang mulai mengeras dan berdenyut-denyut di luar kendalinya untuk menggapai kenikmatan tertentu. Mendapat kenikmatan yang satu itu memang... nikmat, tapi ceritanya akan lain jika dia berada di tempat umum. Celananya sebentar lagi basah ketika sedang berada di antara banyak orang. Alangkah memalukan. Jadi dia beranjak pergi.

Irawan berusaha menahan diri, tapi dia sudah terlambat. Selagi menembus kerumunan peserta pameran yang semakin padat itu, otaknya telah mengirim sinyal-sinyal listrik ke segumpal daging tadi sampai kejang-kejang dan membuat celananya basah sebelum akhirnya kembali ke bentuk semula. Betapapun ia sebenarnya menikmati "kenikmatan" yang baru saja didapatkannya, keyakinannya bersikukuh bahwa itu salah. Menurutnya, seorang lelaki tidak boleh "tegang" selain ketika sedang berada di atas ranjang bersama istri. Dosa!

Kita bisa mengatakan bahwa pikiran Irawan lemah, dalam arti imajinasi joroknya dibangkitkan hanya oleh punggung seorang perempuan dalam lukisan. Objek yang digambarkan dalam lukisan itu, tentu saja tidak nyata, sebab ia hanya lukisan. Namun demikian, Irawan menyalahkan lukisan

itu sebagai penyebab munculnya pikiran kotor, bahkan pamerannya pun dianggap salah. Dia berencana pulang ke rumah, mengajak teman-teman yang dapat menarik kesimpulan serupa untuk membubarkan pameran itu karena dinilai tidak baik untuk kesehatan rohani.

Sementara itu, sepeninggal Irawan, Tommy melanjutkan analisis amatirnya. Banyak pertanyaan yang belum terjawab berlalu-lalang dalam benaknya. Bagaimana otak seseorang dapat mengubah kanvas kosong menjadi latar bagi citra yang tampak nyata? Apa motivasi pelukis H.K. melukis objek berupa seorang perempuan, alih-alih hal lain; pemandangan atau bangunan, misalnya? Kenapa harus bangsawan Eropa Timur abad kedelapan belas? Daftar pertanyaannya banyak tapi tidak memuat satu pertanyaan penting: Bagaimana bisa lukisan di hadapannya itu secara aneh tapi nyata dapat membangkitkan imajinasi jorok dalam pikiran seseorang sampai celananya basah?

*Kos Don Juan, 02 Januari 2018*



# 100 HARI GUBERNUR DKI



# Bangkitnya Becak di Ibukota, Masalah atau Solusi?

**W**acana dilegalkan kembali becak oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik perhatian publik. Legalisasi becak menjadi salah satu daya tarik besar pendatang terutama yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan. Bahkan belum genap satu bulan sejak diwacanakan, 20-an becak dari kota-kota di Jawa sudah datang ke Jakarta menggunakan truk. Hal itu membuat pemerintah DKI kewalahan. Lalu bagaimana seandainya jika becak kembali beroperasi di Jakarta, Apakah akan menjawab solusi transportasi ibukota?

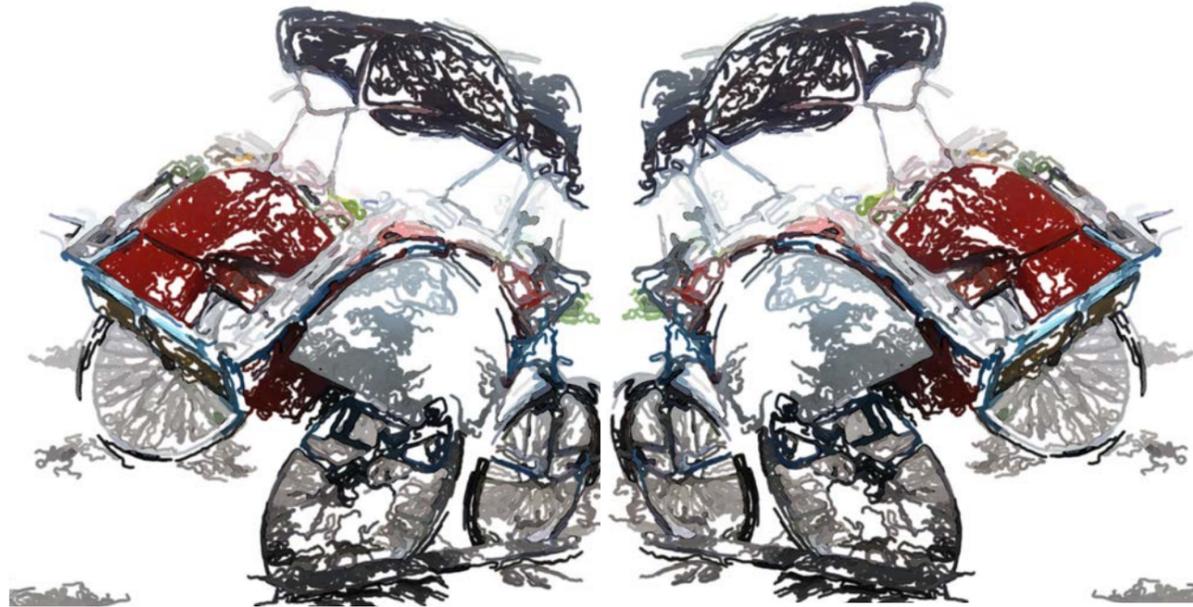
Jika kita merunut sejarah keberadaannya, becak sudah beroperasi di Jakarta sejak 1936, tujuh tahun kemudian becak berjumlah 3.900 unit dan mencapai puncaknya pada 1970 yang mencapai 150 ribu unit, dengan 300 ribu pengemudi kala itu. Kenyataan tersebut memastikan becak menjadi sarana transportasi yang diminati warga kala itu. Becak juga sekaligus menjadi salah satu penyebab daya tarik migrasi yang besar.

Kenyataan tersebut kemudian membuat Gubernur Ali Sadikin mengeluarkan instruksi larangan produksi dan mendatangkan becak ke Jakarta. Sejak saat itu, pergerakan becak untuk beroperasi semakin sempit. Mulai dari larangan melewati jalan protokol dan jalan lintas ekonomi, hingga larangan memproduksi, menjual, bahkan mengoperasikan becak di wilayah ibukota, yang diatur dalam Perda No 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum. Peraturan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang badan atau orang untuk melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan, pemasukkan, mengoperasikan dan menyimpan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak.

Ketika masa krisis ekonomi, becak kembali diperbolehkan pada 1998 melalui instruksi lisan Gubernur DKI Sutiyoso. Namun, izin lisan tersebut segera ditarik karena hanya dalam waktu tujuh hari jumlah becak yang masuk ke Jakarta sudah mencapai 1.500 unit. Dalam kurun waktu 2012-2017 larangan operasi becak tetap dijaga oleh para gubernur penerus Sutiyoso seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.

Becak oleh gubernur saat ini Anies Baswedan kembali diwacanakan kembali sebagai salah satu alat transportasi di Jakarta yang akan beroperasi di kampung-kampung atau melalui pemberlakuan rute khusus. Wacana tersebut memunculkan beragam persepsi. Banyak pengamat memahami wacana ini adalah salah satu kemunduran kebijakan transportasi di Ibukota. Wacana ini juga dianggap sebagai bagian dari kontrak politik saat kampanye pemilihan Gubernur DKI. Namun beberapa pengamat menganggap wacana tersebut merupakan tes ide yang dibuat gubernur untuk mengukur seberapa sensitif warga DKI terhadap kebijakan yang akan dibuat.

Terlepas dari hal tersebut, sebaiknya kita melihat wacana ini dari berbagai sisi, terutama realitas yang ada dan dampak-dampak



yang mungkin akan terjadi.

## Realita saat ini

Sebelum dilarang, alasan keberadaan becak cukup jelas. becak menjadi transportasi yang laris dan diminati warga Jakarta, becak juga menjadi pilihan tepat untuk pendatang yang tidak memiliki keterampilan atau kualifikasi pendidikan, pertumbuhannya pun didukung oleh biaya hidup yang masih rendah di era jaman 'penak' Presiden Soeharto. Bahkan becak dianggap sebagai solusi sementara masa resesi ekonomi yang dapat dipertahankan untuk *men-support* ekonomi warga Jakarta. Tidak dapat dimungkiri, becak pada masa tersebut memang berjaya karena belum banyak pilihan transportasi yang dapat menjangkau kampung-kampung bahkan mengantarkan penumpang beserta barang bawaan hingga *door to door*.

Kondisi saat ini, tentu sangat jauh berbeda dibanding dulu. Jika diamati, becak selalu membutuhkan ruang parkir atau 'mangkal', sementara ketersediaan ruang tersebut semakin berkurang. Becak juga akan bersaing dengan ojek (konvensional maupun online) yang mulai menggantikan fungsi becak, karena cepat, tarif murah, dan praktis. Persaingan dengan ojek konvensional juga dapat memicu persaingan tidak sehat yang dapat memunculkan terjadinya konflik. Kondisi jalan yang semakin padat dengan kendaraan bermotor akan menyebabkan masalah baru di jalan-jalan kampung, seperti kemacetan, udara yang tidak sehat (untuk penarik dan penumpang), hingga dapat menimbulkan kecelakaan.

## Dampak yang akan terjadi

Namun, apabila pemerintah tetap *ngotot* becak dilegalkan kembali sebagai solusi, pemerintah DKI perlu mempertimbangkan

dampak-dampak yang mungkin akan terjadi, di antaranya arus migrasi ke Ibukota, kemacetan dan kecelakaan, status kependudukan dan masalah sosial, serta konflik antar angkutan transportasi.

Legalisasi becak ini akan meningkatkan jumlah penduduk bermur yang lebih banyak berminat jadi tukang becak, hal tersebut bisa berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan publik utamanya layanan kesehatan.

Jumlah titik kemacetan juga dipastikan bertambah khususnya di jalanan kampung di Jakarta. Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan, jalan di Jakarta hanya 0,26 persen dari luas wilayah Jakarta dengan pertumbuhan hanya 0,01 persen per tahun, dan angka kendaraan di Jakarta telah mencapai 8 (delapan) juta unit.

Becak akan besinggungan dengan pengendara pribadi dan angkutan umum sehingga memunculkan kemacetan di perkampungan. Dengan gerak yang lambat dan budaya menerobos masuk ke jalan besar serta kemungkinan melawan arus, becak juga bisa meningkatkan potensi kecelakaan.

Selain itu, migrasi para penarik becak tidak terbanding akan memperbesar beban kerja Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial DKI Jakarta, Status pendatang yang tidak jelas ini dapat menyebabkan mereka lepas dari pelayanan publik dan mengakibatkan permasalahan sosial lainnya, seperti kemiskinan, kesehatan, hingga kriminalitas. Selain itu, dipastikan berpotensi memunculkan permukiman liar dan kumuh yang menyebabkan rusaknya tata kota Ibukota Jakarta, penghasilan rendah. Seiring dengan waktu, *perburuan* penumpang yang hanya sedikit juga dapat serta keberadaan becak di jalan yang lambat, akan mengganggu pengendara atau kelancaran ang-

Hari Prasetyo Sutanto

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP)  
Kementerian Dalam Negeri



kutan transportasi lain dan berpotensi menimbulkan konflik.

Pelegalan becak diharapkan menjadi transportasi yang murah, ramah lingkungan, dan dapat menjadi alternatif dari transportasi untuk warga Jakarta. Penarik becak juga diharapkan bisa hidup sejahtera dan dijamin kehidupannya.

## Alternatif solusi

Untuk itu, perlu inovasi kendaraan becak dan pengemudinya. Pertama becak yang akan dioperasikan sebaiknya tidak lagi dikayuh secara manual, tetapi menggunakan teknologi sepeda listrik. Sehingga becak akan jauh dari *image* transportasi yang tidak manusiawi, pelan dan ketinggalan jaman. Pemerintah perlu mengatur becak dari segi kuantitas dan umur penarik becak. Jumlah becak harus diatur menurut kesesuaian lokasi dan kebutuhannya, Pemerintah DKI perlu melakukan kajian terlebih dahulu terkait hal ini. Pembatasan umur penarik becak juga perlu diatur untuk membuat *brand* baru becak yang kekinian.

Kedua perlu penyediaan ruang yang tepat untuk kenyamanan bersama. Becak harus berada dan beroperasi di wilayah yang tepat. Apabila pemerintah ingin memfokuskan becak sebagai transportasi alternatif, maka becak perlu dioperasikan di wilayah yang tidak dapat dijangkau angkutan umum kota (angkot) dengan kondisi geografis yang cenderung landai. Alternatif lain, becak dapat dimanfaatkan sebagai transportasi yang memberikan *pleasure* sebagai nilai tambah tempat wisata. Becak dapat dioperasikan di tempat-tempat wisata yang luas seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Ancol, Monas, atau Kota Tua.

*Ketiga*, perlunya jaminan sosial untuk para penarik becak. Selain untuk memenuhi kebutuhan transportasi warga DKI, pemerintah DKI juga harus memikirkan kesejahteraan para penarik becak ini. Pemerintah perlu mendata dan memastikan status kependudukan penarik becak agar mendapat pelayanan publik seperti layanan kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Perlu juga dibuat organisasi/perkumpulan penarik becak yang resmi dan dapat bekerja sama dengan pemerintah DKI.

*Keempat*, perlu menjadikan becak sebagai transportasi yang modern dan terintegrasi. Pemerintah DKI perlu melibatkan becak sebagai bagian dari pembenahan transportasi massal dan terintegrasi. Bukan hal yang tidak mungkin seandainya becak dapat berubah menjadi transportasi yang dapat terintegrasi dengan program OK Otrip Gubernur, mendampingi angkot yang saat ini sedang diujicoba. Becak, selain berinovasi dengan tenaga listrik dapat juga dipasang alat *tapping* untuk melayani jalan-jalan yang tidak dilewati angkot.

Pemerintah DKI sepertinya membutuhkan 'energi' yang tidak sedikit untuk menghidupkan becak kembali. Alangkah baiknya apabila energi ini difokuskan pada pembenahan transportasi massal, penyediaan/pelebaran jalan dan manajemen arus lalu lintas agar mengurangi kemacetan di Ibukota. Tidak dengan menambah jenis transportasi berdasarkan aspirasi yang tingkat keberhasilannya belum dikaji secara ilmiah.

# Menuju Destinasi Wisata Dunia

Dalam APBN 2018, pemerintah sepakat mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun atau naik dibanding 2017 yang hanya Rp2.133,3 triliun. Target pendapatan negara juga ditingkatkan menjadi Rp1.894,7 triliun dari sebelumnya Rp1.736,1 triliun pada 2017. Dengan besaran tersebut, target penerimaan perpajakan sekiranya masih menjadi primadona utama APBN, sebesar Rp1.618,1 triliun atau hampir 75 persen dari keseluruhan komposisi pendapatan negara. Sejak 2014, khususnya di era pemerintahan baru, sektor perpajakan memang dijadikan prioritas utama pendanaan APBN. Kondisi ini tak lepas dari semangat migrasi APBN dari sumbangan industri sumber daya alam (SDA) khususnya pertambangan yang sekian lama menjadi kontributor utama pendapatan negara.

Dalam banyak kasus, era ekonomi berbasis SDA khususnya pertambangan, memang tak selamanya bisa diandalkan. Data yang dirilis Kementerian Perindustrian 2014, misalnya, menyebutkan, kontribusi devisa minyak bumi terus menurun dari 2015 hingga 2019. Begitu halnya dengan kontribusi SDA lainnya seperti batu bara, kelapa sawit /Crude Palm Oil (CPO), dan karet. Jika dihitung dengan biaya internalisasi akibat dampak eksternalitas yang dihasilkan, nilai devisa tersebut jelas akan semakin berkurang.

Perlahan tapi pasti, peningkatan justru terjadi dari penerimaan devisa sektor pariwisata. Sejak 2017, kontribusi pariwisata melebihi sumbangan devisa sektor SDA dan diperkirakan akan menjadi penyumbang devisa terbesar pada 2020. Berdasarkan lapangan usaha, sejak 2016 sektor pariwisata memang sudah menempati peringkat kedua sektor utama di dalam PDB setelah CPO, dengan nilai sebesar 13.568 juta dolar AS, menguntit di belakangnya seperti migas, batu bara, pakaian jadi, alat listrik, perhiasan dan kertas. Tak heran jika kemudian pemerintah mulai menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor masa depan Indonesia. Kebetulan Indonesia juga dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa untuk menarik minat para wisatawan baik manca negara maupun domestik.

## Destinasi wisata utama

Pariwisata telah disepakati menjadi salah satu sektor andalan dalam pembangunan nasional Indonesia. Saat ini dan pada masa-masa mendatang, pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi utama dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu, salah satu hal yang paling *urgent* yang harus dilakukan adalah dengan terus memperkuat jejaring yang telah ada untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Penguatan jejaring untuk mendukung peningkatan kinerja kepariwisataan akan tercapai jika hubungan dapat terjalin dengan harmonis di antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Jika merujuk kepada tren perkembangan global di dalam usaha kepariwisataan, dewasa ini telah terjadi pergeseran minat dari

wisatawan (*consumer-behaviour pattern*). Mereka tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati *sun, sea and sand*, melainkan telah mengalami perubahan menuju jenis wisata yang lebih *sophisticated*, meskipun tetap santai tetapi dengan selera yang meningkat, seperti menikmati produk atau kreasi budaya (*culture*), peninggalan sejarah (*heritage*), dan *nature* atau ekowisata suatu daerah atau negara. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat tingginya overvisitasi pada kawasan wisata yang telah terkenal sebelumnya di Eropa dan Amerika serta munculnya kejenuhan wisatawan untuk mengunjungi kawasan *artificial (artificial tourism zone)* yang mengubah lanskap alam dan merusak lingkungan alamiah.

Sejak 2008, pemerintah mencanangkan Program *Visit Indonesia* sebagai cerminan semangat baru bagi masyarakat pariwisata di Indonesia. Melalui upaya promosi peningkatan pelayanan dan membai-knya situasi kemandirian, statistik kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus mengalami peningkatan yang tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2008, misalnya, jumlah wisman yang datang mencapai rekor tertinggi sebesar 6,23 juta orang. Faktor lain yang tak kalah penting adalah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus). Disadari bahwa peranan wisnus merupakan yang terbesar dalam menciptakan dampak ekonomi. maka tidak heran jika Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata semakin gencar mengajak penduduk Indonesia melakukan perjalanan atau wisata di dalam negeri. Dengan slogan “Ayo Jelajahi Nusantara”, “Kenali Negerimu, Cintai Negerimu” diharapkan semakin banyak penduduk Indonesia yang ingin mengetahui lebih banyak tentang negerinya sendiri.

Berbagai perbaikan pada periode sebelumnya tersebut kemudian membuahkan hasil di periode saat ini. Pada periode Januari hingga Oktober 2017, misalnya, pertumbuhan pariwisata Indonesia hanya kalah dari Vietnam sebagai jawara utama pariwisata di lingkup ASEAN. Indeks daya saing pariwisata Indonesia juga terus membaik. Meskipun demikian, ada beberapa indikator pariwisata Indonesia yang masih harus diwaspadai misalnya: keamanan dan keselamatan, kesehatan dan kebersihan, kesiapan infrastruktur penyelenggaraan pariwisata, ketahanan lingkungan sekaligus layanan infrastruktur pariwisata.

Untuk lebih meningkatkan level perbaikan, pemerintah juga memperkenalkan program “Menciptakan 10 Bali Baru” yang membentang mulai dari Danau Toba, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Manda-



lika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai. Dari keseluruhan destinasi utama tersebut, dipilih 3 lokasi terlebih dahulu yang akan dikembangkan pada tahap 1 yaitu: Danau Toba, Borobudur, Bromo Tengger dan Semeru serta Mandalika. Hal ini dijelaskan secara rinci di dalam penetapan TOP-3 dan TOP-10 Kebijakan Prioritas Kementerian Pariwisata di 2017 yang terdiri dari: pengembangan *e-tourism*, homestay desa wisata, *airlines*, branding, TOP-10 originasi, TOP-3 destinasi utama, pengembangan 10 destinasi prioritas, sertifikasi HR dan gerakan sadar wisata, peningkatan investasi pariwisata, serta pengelolaan pusat krisis.

Selanjutnya strategi pengembangan pariwisata dikemas ke dalam skema 3A yaitu: *Atraksi* (9 portofolio strategi pariwisata), *Akses* (infrastruktur utama yang dibangun oleh pemerintah) dan *Amenitas* (diutamakan dilakukan oleh swasta). Jenis atraksi yang dikemas ke dalam 9 portofolio strategi pariwisata meliputi portofolio pelanggan dan portofolio produk. Portofolio pelanggan berusaha menasar kelompok personal berupa wisatawan individu maupun komunitas, bisnis menasar biro travel/UKM/asosiasi sedangkan internasional tetap menjadikan wisatawan mancanegara sebagai ujung tombaknya.

Sementara portofolio produk lebih diarahkan kepada upaya diversifikasi produk pariwisata yang akan dijual baik alam (35 persen), budaya (60 persen) serta buatan manusia (5 persen). Produk wisata alam meliputi wisata bahari, ekowisata serta wisata petualangan. Produk wisata budaya meliputi wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner sekaligus wisata kota dan desa. Terakhir produk pariwisata buatan manusia berupa wisata MICE, olah raga dan obyek wisata terintegrasi.



Joko Tri Haryanto  
Pegawai di Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan RI

Dari aspek pendanaan, pemerintah juga memperkenalkan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata sejak 2017. Harapannya tentu memberikan dukungan nyata bagi pengembangan 10 destinasi Bali Baru. Support lainnya diberikan dalam wujud *free visa endorsement* 2016 dengan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 untuk 169 negara. Selain itu ada juga sertifikasi pengembangan potensi usaha pariwisata yang dimuat di dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 1 Tahun 2014. Beberapa lokasi pariwisata utama juga dibentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan tujuan percepatan pengembangan sektor pariwisata di daerah.

Yang terbaru, pemerintah juga merencanakan untuk menjadikan 2018 sebagai tahun wisata. Bakal banyak sekali perhelatan akbar pariwisata, mencapai kisaran 100 buah pertunjukan. Realisasi target kunjungan wisatawan asing yang hanya 14 juta orang, makin menambah semangat penyelenggara event di 2018. Tak main-main, jika sebelumnya event penyelenggaraan wisata dikelola masing-masing daerah, sekarang pemerintah menggunakan jasa kurator untuk memilih 100 event unggulan sepanjang tahun dengan berbagai atraksi yang berbeda.

Dalam jangka menengah hingga 2019, semua upaya tersebut diharapkan mampu memberikan dampak kontribusi terhadap kenaikan PDB nasional dari 4,23 persen di 2015 menjadi 7,50 persen di 2019, devisa sebesar Rp144 triliun di 2015 menjadi Rp280 triliun di 2019, penyerapan tenaga kerja 11,4 juta orang menjadi 13,0 juta orang di 2019, Indeks Daya Saing dari peringkat 50 menjadi peringkat 30 di 2019 serta target kenaikan jumlah pengunjung baik mancanegara maupun domestik.

Selain itu, investasi total yang diperlukan untuk pengembangan 10 Bali Baru mencapai 20 miliar USD. Dilihat dari rincian pengembangan masing-masing titik lokasi wisata, kebutuhan terbebar adalah pengembangan destinasi wisata Tanjung Lesung sebesar 4,000 juta USD disusul Mandalika sebesar 3,000 juta USD. Pengembangan destinasi Morotai juga membutuhkan dana investasi hingga mencapai 2,900 juta USD. Sementara beberapa destinasi lainnya rata-rata membutuhkan dana investasi sekitar 1,200-1,600 juta USD. Angka yang memang sangat besar untuk sekedar dibiayai oleh APBN semata. Peran investasi swasta kemudian menjadi solusi yang tidak dapat lagi dihindari.

Penetapan target kunjungan wisatawan manca negara 2018 sebesar 17 juta dan wisatawan domestik sebesar 270 juta orang, diharapkan juga menggulirkan roda ekonomi di daerah-daerah. Disinilah diharapkan muncul konektivitas program pemberdayaan daerah dan desa melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana desa. Dengan konektivitas ini, daerah dan desa akan menjadi lebih mandiri secara menyeluruh dengan program-program pembangunan yang terstruktur. Jika sudah demikian, masa depan bangsa yang gemilang sekiranya dapat diwujudkan sesuai misi Indonesia Emas 2030.

## Gubernur Cerdas

**M**endapatkan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota yang cerdas pasca pilkada adalah dambaan semua orang. Kepala daerah yang cerdas diyakini bisa membawa kemaslahatan bagi rakyat. Setidaknya, dengan kecerdasannya itu segala macam persoalan rakyat bisa dicarikan solusinya secara cepat dan tepat.

Kecerdasan kepala daerah senyatanya terletak pada kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Dalam penentuan kebijakan, diasumsikan kepala daerah sudah memunyai wawasan yang luas dan menyeluruh. Meski, tidak secara mendalam, namun kepala daerah yang cerdas pastilah menguasai bidang-bidang terkait di bawahnya.

Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan yang dibuat tidak memberatkan sebagian rakyat, tetapi semua rakyat merasakan manfaat atas kebijakan yang dibuat. Jika kepala daerah mampu menciptakan kebijakan yang adil dan bermanfaat, semua orang akan memuji kecerdasan sang kepala daerah. Maka, dengan parameter itulah, setidaknya secara kualitatif, kita dapat menakar seberapa cerdas seorang kepala daerah.

Sebagai contoh di DKI Jakarta. Pada Pilkada Serentak 2017 lalu rakyat Jakarta telah memilih seorang Gubernur yang dianggap lebih santun, baik, dan sangat cerdas merangkai kata ketimbang Gubernur sebelumnya. Tidak tanggung-tanggung, hampir 58 persen rakyat DKI yang memilihnya. Pasca pelantikan, kecerdasan Sang Gubernur baru itu mulai diuji melalui pelbagai kebijakan yang dikeluarkannya.

Ada beberapa kebijakan, yang katanya cerdas, sudah mulai dijalankan. Pertama, membebaskan kendaraan roda dua melintas di Jalan Jenderal Sudirman hingga M.H. Thamrin. Untuk memuluskan rencana membebaskan sepeda motor di semua ruas jalan, Sang Gubernur mengubah Pergub Provinsi DKI Jakarta No 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dan Pergub No 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas Melalui Kebijakan *Electronic Road Pricing* (ERP).

Kedua, memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan tidak hanya di trotoar tetapi juga di tengah jalan di Tanah Abang. PKL boleh berjualan di badan Jalan Jatibaru Raya sepanjang kira-kira 400 meter mulai pukul 08.00 sampai 18.00 WIB. Bahkan, pada lajur sebelah timur Pemprov Jakarta disediakan 400 tenda sebagai tempat berjualan PKL dengan rincian 115 tenda untuk dagangan kuliner dan 265 tenda untuk non-kuliner.

Ketiga, program rumah DP Rp 0. Pembangunan hunian DP (*down payment*) Rp 0 sebagaimana dijanjikan saat kampanye

lalu dimulai di Pondok Kelapa dengan nama properti Klapa Village. Bentuk huniannya adalah rusunami. Pada tahap awal akan dibangun 703 hunian yang terdiri dari 513 tipe 36 dan 190 tipe 21. Harga per unit untuk yang tipe 36 adalah Rp 320 juta dan tipe 21 harganya Rp 185 juta. Gubernur mengatakan uang muka sebanyak 5 persen akan ditanggung oleh Pemda DKI.

Ketiga kebijakan cerdas itu hanyalah sebagian kecil kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur DKI. Akan tetapi, setelah digulirkan, kebijakan itu malah menuai kecaman dari pelbagai pihak. Pembebasan kendaraan roda dua melintas di Jalan Jenderal Sudirman hingga M.H Thamrin sejatinya hanya menambah ruwet lalu lintas. Kebijakan ini justru menegaskan kebijakan penataan transportasi di DKI Jakarta yang menginginkan rakyat DKI menggunakan transportasi publik.

Selain itu, kebijakan memfasilitasi PKL berjualan di tengah jalan dan trotoar jelas melanggar undang-undang. Dalam UU No 38 Tahun 2004 serta PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan terdapat ketentuan pidana yang sangat tegas, yakni 18 bulan penjara atau denda Rp 1,5 miliar bagi setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan trotoar. Tidak hanya itu, UU No 29 Tahun 2002 juga menegaskan, tidak ada yang bisa menjadikan badan jalan dan trotoar sebagai tempat parkir dan usaha dalam bentuk apa pun. Polda Metro Jaya sudah merekomendasikan agar Jatibaru-Tanah Abang dibuka kembali. Tetapi sampai hari ini rekomendasi itu tidak digubris oleh Gubernur

Lalu, bagaimana bisa rakyat Jakarta memiliki rumah dengan DP Rp 0 sementara tanah tempat membangun rumah itu milik negara? Skema pembayarannya pun sampai hari ini belum jelas. Lagi pula, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya bisa menanggung DP 1 persen. Lalu, empat persen sisanya itu Pemprov DKI yang bayar? Kalau rusunami itu dijual seharga ratusan juta, mau dibayar berapa kali angsuran? Sementara Gubernur hanya punya batasan waktu 5 tahun. Dan, Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan, penganggaran kegiatan tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah.

Melihat realitas, akhirnya publik dapat membuktikan, kecerdasan Gubernur tidak tampak dalam kebijakan cerdas yang dibuatnya. Selama 130 hari memimpin DKI Jakarta, Gubernur malah terhuyung-huyung menghadapi beraneka ragam persoalan ibukota. Gubernur terbukti hanya cerdas beretorika sampai menghanyutkan nalar kritis publik. Padahal, rakyat memilih dan menggaji Gubernur untuk mengelola ibukota, bukan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak cerdas.

● Moh Ilham A Hamudy



**BULAN PURNAMA** sebelum gerhana bulan di Jakarta, Indonesia. REUTERS /Darren Whiteside



**SUPER** blue blood moon dari roof top kantor Media BPP, di ambil pada Rabu 31/1/2018 pukul 19:15 WIB. SAIDI RIFKI/MEDIA BPP

# CALL FOR PAPERS

JURNAL BINA PRAJA

THEME

## HOME AFFAIRS GOVERNANCE

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy  
Politics and Public Administration  
Territorial Administration  
and Rural Governance  
Population and Civil Registration  
Regional Election and Regional Innovation  
Regional Fiscal Policy and Development  
Other Issues in Public Administration



Submit  
a scientific paper  
on the theme of  
Home Affairs Governance  
to [binaprajajournal.com](http://binaprajajournal.com)

INDEXED BY:



Accredited No 735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016



RESEARCH AND  
DEVELOPMENT AGENCY  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) |

For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

## FOR MORE INFORMATIONS CONTACT US

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat  
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)  
[editorial@binaprajajournal.com](mailto:editorial@binaprajajournal.com)